

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka



Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. LKPD Pemerintah Provinsi Jambi TA2019 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD atas pelaksanaan APBD TA 2019. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:



1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang



menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian



yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:



1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;



- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/deficit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.



6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.4. Entitas

Untuk TA 2019, entitas dalam Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Provinsi, Badan, Dinas dan Badan Layanan Umum Daerah.

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Badan
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Badan Keuangan Daerah
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah
 - 6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 7) Badan Penghubung Daerah
 - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 4) Dinas Perhubungan
 - 5) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 6) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 8) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



- 10) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 - 11) Dinas Perkebunan
 - 12) Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah
 - 13) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 14) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 16) Dinas Kominfo
 - 17) Dinas Lingkungan Hidup
 - 18) Dinas Ketahanan Pangan
 - 19) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 - 20) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 21) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 22) Dinas Kehutanan
5. Badan Layanan Umum Daerah.
- 1) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi
 - 2) Rumah Sakit Daerah
 - 3) Rumah Sakit Jiwa.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2019 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2019 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.



Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan posLaporanKeuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasiuntuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEUANGAN DAERAH, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2019 memberikan gambaran tentang ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan tahun 2019 dengan diformulasikan melalui prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang diambil guna mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019.

2.1.1. Kondisi Perekonomian

Perekonomian Provinsi Jambi berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2019 mencapai Rp56.281,9 miliar dan PDRB Perkapita mencapai Rp60,07 Juta atau US\$4.246.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 tumbuh 3,59 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh 9,43 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PK-RT yang tumbuh sebesar 4,97 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 meningkat sebesar 2,38 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Informasi dan Komunikasi menempati pertumbuhan tertinggi dengan persentase sebesar 7,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) yang meningkat signifikan sebesar 31,69 persen. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 (c-to-c) tumbuh 4,40 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,31 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen Pengeluaran Pemerintah yang tumbuh sebesar 10,69 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 27,20 persen. Diikuti oleh Pertambangan dan



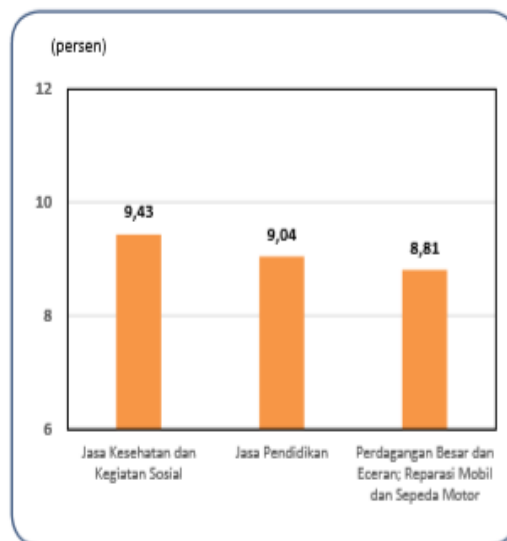
Penggalian sebesar 17,94 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan untuk Komponen Ekspor serta Komponen Impor (sebagai pengurang), masing-masing sebesar 74,25 persen serta 53,55 persen.

A. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

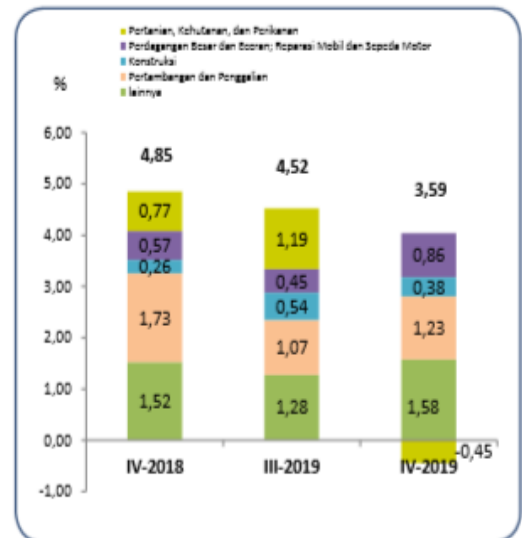
1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 terhadap Triwulan IV-2018

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 (y-on-y) tumbuh 3,59 persen. Pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,43 persen; diikuti Jasa Pendidikan sebesar 9,04 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,81 persen.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2019 (y-on-y)
(data BPS)



Grafik 2.2
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut
Lapangan Usaha Triwulan IV-2019 (y-on-y)
(data BPS)



Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (27,20 persen); Pertambangan dan Penggalan (17,94 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,73 persen); serta Industri Pengolahan (9,94 persen) masih mendominasi PDRB Provinsi Jambi.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 (y-on-y), Pertambangan dan Penggalan menjadi sumber



pertumbuhan tertinggi sebesar 1,23 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,86 persen; Industri Pengolahan sebesar 0,48 persen; serta Konstruksi sebesar 0,38 persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 terhadap Triwulan III-2019 (q-to-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 2,38 persen. Kemarau serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berefek menurunnya hasil panen beberapa tanaman pangan dan perkebunan. Hal tersebut berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (-1,24 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 (q-to-q), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,69 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,48 persen dilanjutkan Pertambangan dan Penggalan sebesar sebesar 0,40 persen.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019 (q to q)
(data BPS)



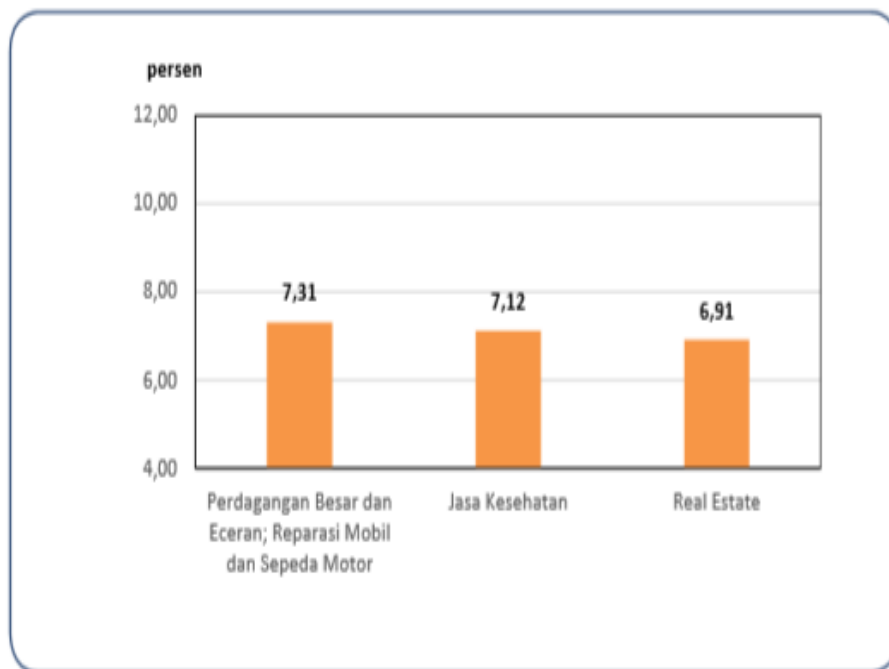
3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I s.d. IV 2019 terhadap Triwulan I s.d. IV 2018 (c-to-c).

Ekonomi Provinsi Jambi kumulatif sampai dengan Triwulan IV-2019 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (c-to-c) tumbuh 4,40



persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,31 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,12 persen; serta Real Estate sebesar 6,91 persen.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV 2019 (c-to-c)
(data BPS)



B. PDRB MENURUT PENGELUARAN

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y)

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 terhadap triwulan IV-2018 (y-on-y) sebesar 3,59 persen terutama didorong oleh pertumbuhan Komponen Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,42 persen. Sebaliknya, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) dan Ekspor justru menurun masing-masing sebesar 2,27 persen dan 1,51 persen.

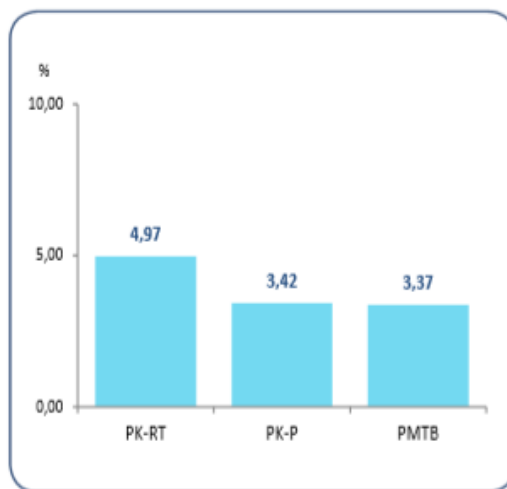
Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Ekspor (74,25



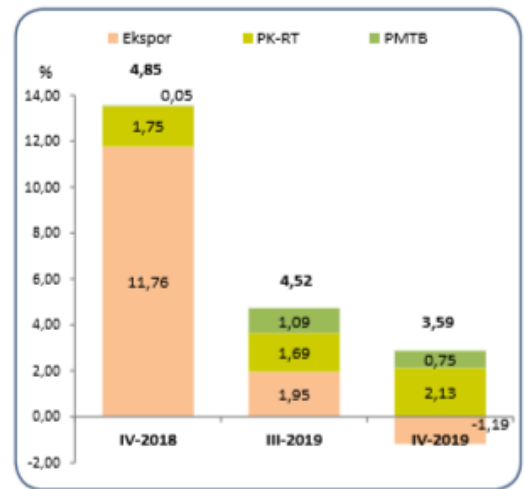
persen) namun terkoreksi oleh Impor (53,55 persen). Diikuti oleh PK-RT yang mencapai hampir separuh PDRB Provinsi Jambi (44,31 persen). Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan inventori relatif kecil.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 (y-on-y) pada sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Rumah Tangga (PK-RT) menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,13 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari komponen PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masing-masing sebesar 0,75 persen dan 0,37 persen.

Grafik 2.5
Pertumbuhan Beberapa Komponen
Triwulan IV-2019 (y-on-y)
(data BPS)



Grafik 2.6
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Beberapa
Komponen Triwulan IV-2019 (y-on-y)
(data BPS)

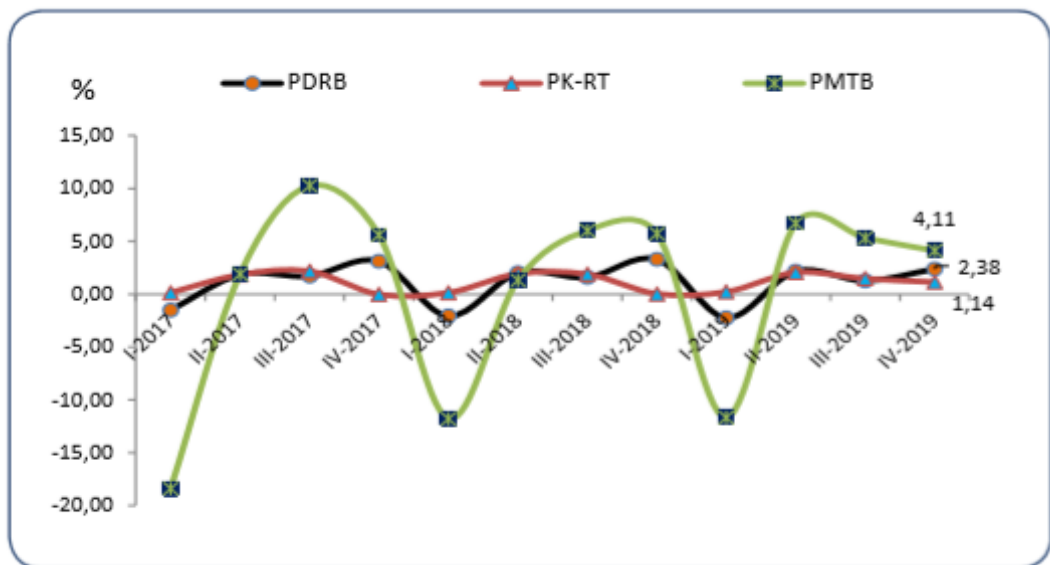


2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan III-2019 (q-to-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2019 terhadap triwulan III-2019 (q-to-q) tumbuh sebesar 2,38 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen PDRB Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 31,69 diikuti oleh pertumbuhan PMTB mencapai 4,11 persen.



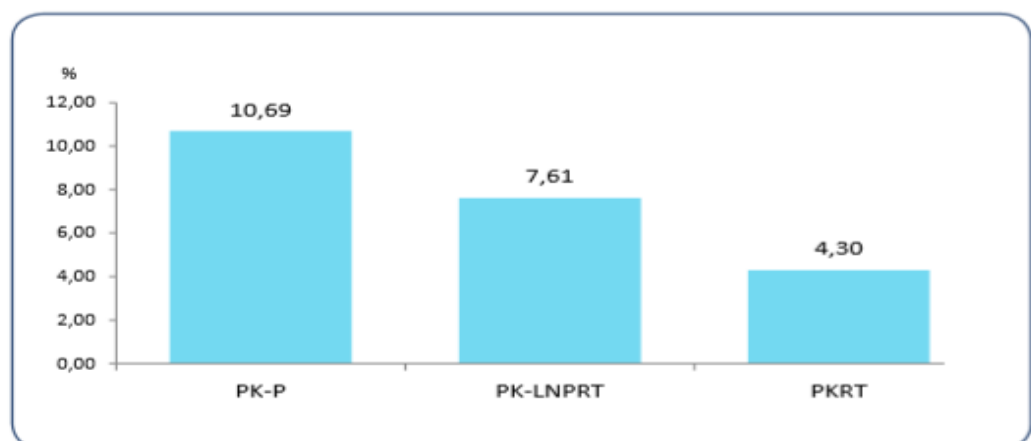
Grafik 2.7
Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2019 (q to q)
(data BPS)



3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I s.d. IV 2019 terhadap Triwulan I s.d. IV 2018 (c-to-c).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi kumulatif (c-to-c) triwulan IV-2019 mencapai 4,40 persen, lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 4,74 persen. Pertumbuhan tertinggi triwulan IV-2019 dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mencapai 10,69 persen, diikuti Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 7,61 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,30 persen.

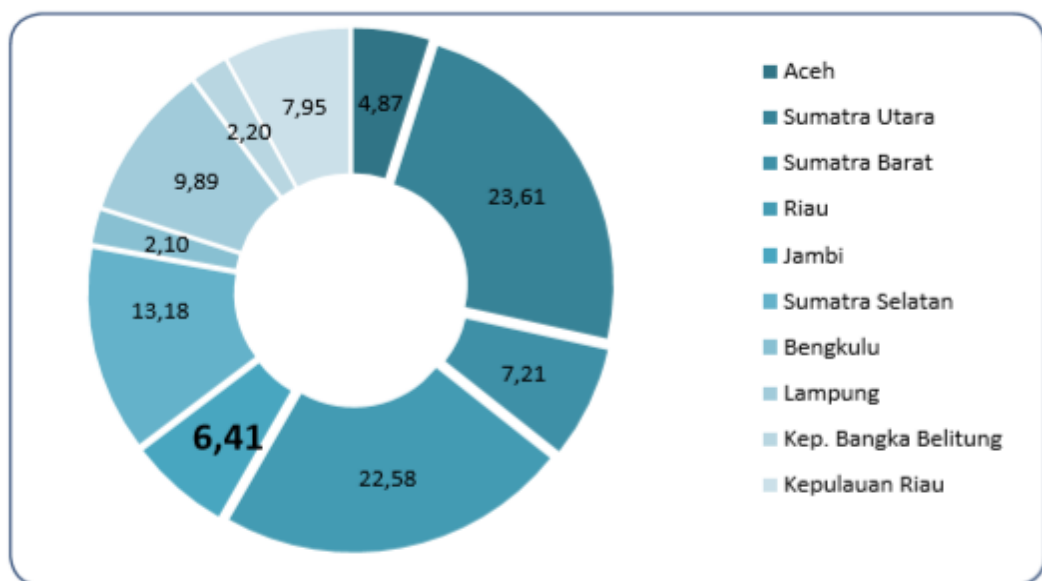
Grafik 2.8
Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV 2019 (c-to-c)
(data BPS)



C. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Struktur perekonomian Sumatera secara spasial pada triwulan IV-2019 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga provinsi dengan share terbesar adalah Sumatera Utara dengan share sebesar 23,61 persen, Provinsi Riau sebesar 22,58 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,18 persen. Provinsi Jambi bila dilihat dari distribusinya terhadap PDRB Sumatera berada pada peringkat ke tujuh, yaitu sebesar 6,41 persen.

Grafik 2.9
PerananProvinsidalamPembentukan PDRB Sumatera Triwulan IV-2019 (persen)
(data BPS)



Tabel 2.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)
(data BPS)



Lapangan Usaha		Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		Triw III-2019	Triw IV-2019	Triw III-2019	Triw IV-2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	15 245,69	15 306,05	9 844,14	9 721,79
B.	Pertambangan dan Penggalian	9 750,90	10 098,21	9 023,12	9 172,50
C.	Industri Pengolahan	5 342,59	5 593,63	3 930,82	4 038,34
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	37,51	38,14	19,94	20,28
E.	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	76,73	78,07	50,22	50,99
F.	Konstruksi	4 119,63	4 390,84	2 809,18	2 987,90
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6 643,75	7 165,22	3 693,09	3 950,82
H.	Transportasi dan Pergudangan	1 766,89	1 703,82	1 218,30	1 223,08
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	652,58	691,07	421,64	445,84
J.	Informasi dan Komunikasi	2 095,19	2 253,32	1 388,14	1 498,22
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 259,19	1 331,23	812,81	857,05
L.	Real Estat	890,28	914,86	558,49	568,39
M,N.	Jasa Perusahaan	668,88	706,68	389,63	407,93
O.	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 688,30	2 815,33	1 282,73	1 330,40
P.	Jasa Pendidikan	1 915,57	2 000,20	1 255,25	1 300,61
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	652,34	667,87	450,11	459,74
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	520,32	527,34	378,04	386,00
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		54 326,32	56 281,87	37 525,67	38 419,88

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
(data BPS)



Lapangan Usaha	Triw III-2019 Terhadap Triw II-2019	Triw IV-2019 Terhadap Triw III-2019	Triw IV-2019 Terhadap Triw IV-2018	Triw I s.d IV 2019 terhadap Triw I s.d.IV 2018	Sumber Pertumbuhan Triw IV 2019 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,07	-1,24	-1,68	2,16	-0,45
B. Pertambangan dan Penggalian	0,49	1,66	5,22	5,17	1,23
C. Industri Pengolahan	2,89	2,74	4,62	2,90	0,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,66	1,68	8,27	5,82	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,27	1,54	2,41	4,00	0,00
F. Konstruksi	4,24	6,36	4,90	6,90	0,38
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,98	6,98	8,81	7,31	0,86
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,12	0,39	1,53	3,69	0,05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,32	5,74	1,80	5,00	0,02
J. Informasi dan Komunikasi	0,08	7,93	5,28	6,00	0,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,78	5,44	8,43	1,92	0,18
L. Real Estat	1,70	1,77	7,57	6,91	0,11
M,N. Jasa Perusahaan	0,67	4,70	3,08	3,96	0,03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,44	3,72	3,02	4,89	0,11
P. Jasa Pendidikan	2,95	3,61	9,04	5,75	0,29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,20	2,14	9,43	7,12	0,11
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-4,09	2,11	-0,75	4,14	-0,01
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,27	2,38	3,59	4,40	3,59

Tabel 2.3
Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)
(data BPS)



Lapangan Usaha		2018		2019	
		Triw III	Triw IV	Triw III	Triw IV
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,11	27,13	28,06	27,20
B.	Pertambangan dan Penggalian	20,54	20,09	17,95	17,94
C.	Industri Pengolahan	10,20	9,72	9,83	9,94
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,14	0,14	0,14
F.	Konstruksi	7,13	7,58	7,58	7,80
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,84	11,87	12,23	12,73
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,14	3,16	3,25	3,03
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,23	1,20	1,23
J.	Informasi dan Komunikasi	3,74	3,93	3,86	4,00
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,23	2,32	2,37
L.	Real Estat	1,53	1,53	1,64	1,63
M,N.	Jasa Perusahaan	1,18	1,21	1,23	1,26
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,54	4,74	4,95	5,00
P.	Jasa Pendidikan	3,39	3,30	3,53	3,55
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,10	1,20	1,19
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,92	0,97	0,96	0,94
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00



Tabel 2.4
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
(miliar rupiah)
(data BPS)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Konstan 2010	
	Triw III-2019	Triw IV-2019	Triw III-2019	Triw IV-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24 712,15	24 783,25	16 490,36	16 678,99
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	309,08	306,50	204,03	202,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4 963,81	6 701,53	3 175,24	4 181,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11 927,36	12 256,94	8 215,83	8 553,74
5. Perubahan Inventori	-1 132,69	581,14	-816,81	416,50
6. Ekspor Barang dan Jasa	39 351,53	41 788,95	28 608,31	28 916,06
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	25 804,91	30 136,43	18 351,28	20 529,70
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	54 326,32	56 281,87	37 525,67	38 419,88

Tabel 2.5
PDRB Perkapita Provinsi Jambi Tahun 2017-2019
(data BPS)

Nilai Perkapita	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku			
- Nilai (Juta Rupiah)	53,99	58,36	60,07
- Nilai (US\$)	4 034,14	4 096,58	4 246,00



Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)
(data BPS)

Lapangan Usaha	Triw III-2019 Terhadap Triw II-2019	Triw IV-2019 Terhadap Triw III-2019	Triw III-2019 Terhadap Triw III-2018	Triw IV-2019 Terhadap Triw IV-2018	Triw I s.d IV 2019 terhadap Triw I s.d. IV 2018	Sumber Pertumbuhan Triw IV-2019 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,47	1,14	3,82	4,97	4,30	2,13
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-8,03	-0,53	2,71	-2,27	7,61	-0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,05	31,69	18,14	3,42	10,69	0,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,32	4,11	4,99	3,37	3,62	0,75
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	6,24	1,08	2,51	-1,51	3,06	-1,19
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,47	11,87	-4,37	4,66	4,63	2,47
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,27	2,38	4,52	3,59	4,40	3,59

Tabel 2.7
Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen)
(data BPS)

Lapangan Usaha	2018		2019	
	Triw III	Triw IV	Triw III	Triw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	42,91	42,04	45,49	44,03
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,54	0,55	0,57	0,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,19	11,50	9,14	11,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,02	21,49	21,96	21,78
5. Perubahan Inventori	1,48	-2,60	-2,08	1,03
6. Ekspor Barang dan Jasa	76,32	77,07	72,44	74,25
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	50,48	50,05	47,50	53,55
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00



Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera
Triwulan IV-2019 (persen)
(data BPS)

Provinsi	Triw III-2019 Terhadap Triw II-2019	Triw IV-2019 Terhadap Triw III-2019	Triw IV-2019 Terhadap Triw IV-2018	Triw I s.d IV 2019 terhadap Triw I s.d.IV 2018	Sumber Pertumbuhan Triw IV 2019 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,93	2,22	5,21	4,15	0,06
Sumatera Utara	3,06	0,40	5,21	5,22	0,26
Sumatera Barat	2,40	0,93	5,13	5,05	0,08
Riau	4,12	0,83	2,91	2,84	0,13
Jambi	1,27	2,38	3,59	4,40	0,05
Sumatera Selatan	3,99	-2,89	5,69	5,71	0,16
Bengkulu	1,28	1,46	4,79	4,96	0,02
Lampung	2,92	-8,42	5,07	5,27	0,11
Kep.Bangka Belitung	1,93	-0,88	3,99	3,32	0,02
Kepulauan Riau	2,30	3,35	5,21	4,89	0,09

E. INFLASI DAERAH

Pada Bulan Desember 2019 Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,38 persen dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 0,21 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi sebesar 136,28 dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Muara Bungo tercatat sebesar 136,30.

Inflasi di Kota Jambi terjadi pada 5 (lima) kelompok pengeluaran. Sedangkan inflasi di Kota Muara Bungo terjadi pada 3 (tiga) kelompok pengeluaran barang dan jasa karena adanya penurunan indeks.

Laju inflasi tahun kalender dan “year on year” Kota Jambi pada bulan ini masing-masing sebesar 1,27 persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan “year on year” Kota Muara Bungo bulan ini masing-masing sebesar 2,61 persen. Dari 23 Kota di Sumatera yang menghitung IHK, sebanyak 17 (tujuh belas) kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Sumatera terjadi di Kota Batam sebesar 1,28 persen dan terendah terjadi di Kota Padang dan Dumai, masing-masing



sebesar 0,07 persen. Dari 82 Kota yang menghitung IHK di Indonesia, sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 1,28 persen dan terendah di Kota Watampone sebesar 0,01 persen.

Pada bulan Desember 2019 Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,38 persen dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 0,21 persen. Laju inflasi tahun kalender Desember 2019 Kota Jambi yaitu sebesar 1,27 persen dan Kota Muara Bungo sebesar 2,61 persen. Inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,13 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,28 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58 persen.

Inflasi di Kota Muara Bungo terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 3 (tiga) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,73 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,53 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,55 persen. Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 0,38 persen, andil terbesar adalah dari kelompok bahan makanan sebesar 0,2564 persen; kemudian dari kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,1039 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,0494 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,0047 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,0012 persen.

Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi Bulan Desember 2019 antara lain adalah bawang merah, angkutan udara, telur ayam ras, nila, gabus, udang basah, tomat buah, tekwan/model, tomat sayur, dan kerang. Sementara itu komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Muara Bungo adalah angkutan udara, bawang merah, telur ayam ras, kue kering berminyak, rokok kretek filter, daging ayam ras, nasi dengan lauk, minyak goreng, jeruk, dan sawi hijau.

F. Neraca Perdagangan.

1. Ekspor Provinsi Jambi

Nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Desember 2019 turun 10,46 persen dibanding bulan November 2019, yaitu dari US\$236,83 juta menjadi US\$212,06 juta. Penyebab utama turunnya nilai ekspor Provinsi Jambi bulan



Desember 2019 adalah turunnya ekspor pada komoditi karet dan olahannya, komoditi pulp dan kertas serta komoditi gas. Sedangkan pada bulan Desember ini tidak ada ekspor komoditi ikan dan udang.

Nilai ekspor sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu sebesar US\$2.841,24 juta, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, yaitu turun sebesar 7,26 persen. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok Pertambangan yaitu sebesar 59,31 persen, diikuti Kelompok Industri sebesar 34,41 persen, dan Kelompok Pertanian sebesar 6,28 persen.

Bila dirinci menurut komoditi, Kelompok Industri didominasi oleh karet dan olahannya yang memberikan kontribusi mencapai 15,87 persen. Penyumbang kontribusi terbesar dari Kelompok Pertambangan yaitu minyak dan gas yang mencapai 56,53 persen. Sedangkan dari Kelompok Pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangan 5,11 persen.

Gambar 2.10
Struktur Nilai Ekspor menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi,
Januari-Desember 2018 dan Januari-Desember 2019
(data BPS)



2. Impor Provinsi Jambi

Impor Provinsi Jambi melalui tiga pelabuhan laut utama di Jambi yaitu : Pelabuhan Talang Duku Jambi, Muara Sabak dan Kuala Tungkal serta pelabuhan udara Bandara Sultan Thaha. Nilai impor bulan Desember 2019 sebesar US\$4,76 juta, turun sebesar 1,61 persen dibanding bulan sebelumnya. Penurunan impor ini dipicu oleh turunnya nilai impor pada



kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya serta kelompok komoditi hasil industri dan lainnya.

Bila dilihat perannya sampai dengan Bulan Desember 2019, impor Kelompok Hasil industri dan lainnya memberikan kontribusinya 47,11 persen dari total impor, diikuti peran Kelompok Mesin dan alat angkutan yaitu sebesar 24,74 persen dan Impor Kelompok Bahan kimia dan sejenisnya yang memberi kontribusi sebesar 19,20 persen. Untuk kelompok komoditi Makanan dan sejenisnya berperan sebesar 8,66 persen dan kelompok komoditi Karet dan sejenisnya hanya berperan 0,30 persen.

Tabel 2.9
Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi, Desember 2019
(data BPS)

Kelompok Komoditi	Nilai CIF(US\$)						
	November 2019	Desember 2019	% Perubahan Des'19 thd Nov'19	Januari – Desember			% Peran 2019
				2018	2019	% Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Makanan dan sejenisnya	449 893	951 503	111,50	3 227 089	6 512 839	101,82	8,66
2. Bahan kimia dan sejenisnya	1 606 305	1 059 211	(34,06)	19 255 002	14 436 742	(25,02)	19,20
3. Karet dan sejenisnya	0	2 912	~	181 406	222 093	22,43	0,30
4. Mesin dan alat angkutan	335 202	2 198 653	>500	31 020 370	18 602 806	(40,03)	24,74
5. Hasil industri dan Lainnya	2 452 197	553 222	(77,44)	32 283 018	35 430 855	9,75	47,11
TOTAL	4 843 597	4 765 501	(1,61)	85 966 885	75 205 335	(12,52)	100,00

G. Lingkungan Eksternal dan Internal.

Gambaran ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2019 akan dipengaruhi lingkungan eksternal sebagai akibat semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Jambi berasal dari perekonomian regional dan nasional serta negara tetangga yang diperkirakan masih menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian negara-negara industri di Asia lainnya.



Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
2. Pemerintahan yang kuat dan didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi;
3. Sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, juga meningkat;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

H. Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2019, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi.

Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun, kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi dan rendahnya kemampuan daya beli harus terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi daerah;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; ditandai dengan masih awalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di daerah yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan;



3. Menjaga Stabilitas Ekonomi.

Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, yang mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi dari tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

2.1.2 Arah kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2019

Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2019, meliputi :

1. Percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek melalui:
 - a) Mendorong perbaikan kinerja sektor perkebunan melalui penciptaan pasar domestik dan melakukan inisiatif penjajakan perluasan pasar ekspor. Pengembangan pasar domestik sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengembangkan pemanfaatan karet alam dalam pembangunan infrastruktur.
 - b) Mendorong investasi dan penciptaan sumber pertumbuhan baru non SDA melalui :
 - Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif
 - Meminimalisir hambatan investasi (peraturan/perizinan, pajak/retribusi, infrastruktur)
 - Insentif bagi investor dan pelaku usaha/wirausaha baru seperti relaksasi pajak/retribusi, penyediaan tata ruang, bantuan permodalan, bantuan promosi, penyediaan SDM yang unggul melalui kerjasama dengan SMK dan Perguruan Tinggi
 - Insentif khusus bagi calon investor yang membangun industri hilir penunjang komoditas unggulan Jambi
 - c) Mendorong percepatan realisasi anggaran APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama anggaran belanja modal pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur strategis (jalan, jembatan, saluran irigasi dan pelabuhan) dalam rangka peningkatan konektivitas dan perdagangan antar daerah.



- d) Mengantisipasi perlambatan konsumsi rumah tangga dengan memastikan bahwa realisasi program bantuan sosial dan/atau subsidi terkait penanggulangan kemiskinan seperti penyaluran Program Keluarga Harapan, program bantuan pangan dan Rastra, serta program jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat *bottom of the pyramid* dapat berjalan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
 - e) Mengoptimalkan program *cash for work* dana desa untuk pengembangan kawasan perdesaan dalam rangka perbaikan kinerja sektor pertanian yang menjadi penopang utama pertumbuhan daerah sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan petani, terutama melalui penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan, melalui :
- a) Pelaksanaan program peremajaan tanaman (*replanting*) tanaman kelapa sawit dan karet berbasis perkebunan rakyat
 - b) Mendorong pengembangan hilirisasi industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang, dan industri terkait lainnya dengan memberikan kemudahan izin, pembiayaan dan pengembangan serta didukung dengan :
 - Pengembangan Balai Riset dan Standarisasi untuk mendorong penerapan teknologi tepat guna melalui penguatan laboratorium uji SNI dan sertifikasi produk
 - Membangun pendidikan vokasi yang menunjang kebutuhan pengembangan industri karet melalui kerjasama dengan institusi pendidikan di daerah.
 - c) Perbaikan tata niaga dan distribusi pasca produksi yang diimplementasikan dengan :
 - Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai perdagangan yang terlalu panjang serta mendorong terciptanya *corporate farming*.



- Sosialisasi dan penguatan kelembagaan pasar komoditas (pasar lelang *spot* dan *forward* untuk tanaman perkebunan dan pasar agribisnis untuk tanaman hortikultura)
 - Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani
3. Untuk menyikapi pengendalian inflasi, pemerintah daerah perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi mendatang serta potensi resiko yang perlu diwaspadai dengan :
- Melakukan pemantauan terhadap penerapan harga acuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan penjualan di Konsumen, termasuk menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
 - Pengawasan terhadap ketersediaan cadangan bahan pokok melalui pemantauan rutin serta mendorong kerjasama dengan daerah sentra penghasil
 - Pengembangan *database* TPID mencakup kondisi surplus defisit komoditas pangan daerah, pengawasan arus keluar masuk barang, perkembangan stok dan pemantauan harga
 - Mendorong pengembangan sentra produksi lokal untuk komoditas bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Jambi
 - Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program kerja TPID dan himbauan-himbauan menyangkut pengendalian inflasi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi yaitu “Jambi Tuntas 2021”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun



2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2019 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat, disamping akan melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain; peninjauan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan melalui Propem Perda Tahun 2019, peninjauan tarif, pemutahiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas kerjasama pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak ketiga maupun penggalan sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.2.1. Keuangan Daerah.

2.2.1.1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi; Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Total Realisasi Pendapatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 100,19% atau Rp4,575 triliun dari target yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan tahun 2019 sebesar Rp4,566 triliun atau terdapat kenaikan sebesar 3,69% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp4,412 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengoptimalkan sumber



pendapatan melalui intensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah, diantaranya dengan melakukan pemutihan PKB dan BBNKB serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Realisasi Pendapatan sebagaimana penjelasan diatas, masing masing bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,651 triliun atau memiliki kontribusi sebesar 36,09% terhadap total realisasi pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2,922 triliun atau memiliki kontribusi sebesar 63,88% terhadap total pendapatan serta dari realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1,608 milyar atau memiliki kontribusi sebesar 0,04% dari total Pendapatan.

Berdasarkan Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp1,651 triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,657 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp6 milyar atau 0,36%, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 sebesar Rp2,922 triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp2,754 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp168 milyar atau 6,10%, demikian juga realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2019 sebesar Rp1,608 milyar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,548 milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp60 juta atau 6,91%.

Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp1,651 triliun, masing-masing bersumber dari; pajak daerah sebesar Rp1,345 triliun, retribusi daerah sebesar Rp19,110 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp31,065 milyar serta dari Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp255,809 milyar.

Realisasi pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp1,345 triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,374 triliun mengalami penurunan sebesar Rp29 milyar atau 2,11%, sedangkan realisasi retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp19,110 Milyar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp20,208 milyar mengalami penurunan sebesar Rp1,098 milyar atau 5,39%, demikian juga realisasi hasil pengelolaan kekayaan



daerah yang dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp31,065 milyar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp30,511 milyar mengalami peningkatan sebesar Rp554 milyar atau 1,81%, sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2019 sebesar Rp255,809 milyar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp231,561 milyar berarti mengalami kenaikan sebesar Rp24,799 milyar atau 10,47%.

Realisasi Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp1,345 triliun, masing-masing bersumber dari; realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp457,833 milyar, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp374,030 milyar, realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp315,579 milyar, realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1,503 milyar dan realisasi Pajak Rokok sebesar Rp196,161 milyar.

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2019 sebesar Rp19,109 milyar, yang bersumber dari; realisasi retribusi jasa umum sebesar Rp1,196 milyar, realisasi retribusi jasa usaha sebesar Rp17,902 milyar dan dari realisasi retribusi perizinan tertentu sebesar Rp12 juta.

Sedangkan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp31,064 milyar, yang bersumber dari; realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (PT. Bank Jambi) sebesar Rp28.764 milyar, realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN (PT. Asuransi Bangun Askrida) sebesar Rp448,486 juta serta kontribusi dari realisasi bagian laba perusahaan swasta sebesar Rp1,306 milyar.

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2019 sebesar Rp255,809 milyar yang bersumber dari; realisasi Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (pelepasan hak atas tanah) sebesar Rp5 juta, realisasi penerimaan jasa giro sebesar Rp5,505 milyar, realisasi penerimaan Bunga deposito sebesar Rp65,981 milyar, realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) sebesar Rp5,100 juta,



realisasi pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp2,653 milyar, realisasi pendapatan denda pajak sebesar Rp6,620 milyar, realisasi pendapatan denda retribusi sebesar Rp16,766 juta, realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp146,650 milyar, realisasi Lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp564,283 juta dan dari realisasi Penerimaan lain-lain sebesar Rp28,359 milyar.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 terdiri dari; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan total penerimaan sebesar Rp2,922 trilyun dengan rincian; Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2,897 trilyun, masing-masing yang bersumber dari; Bagi Hasil Pajak sebesar Rp144,622 milyar, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar Rp251,920 milyar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,433 trilyun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,067 trilyun, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp25,741 milyar yang bersumber dari Dana Penyesuaian.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 sebesar Rp2,922 trilyun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp2,754 trilyun mengalami peningkatan sebesar Rp168 milyar atau 6,10%.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2019 sebesar Rp1,652 milyar, bersumber dari realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp1,608 milyar dan realisasi Pendapatan lainnya sebesar Rp43,880 juta. Jika realisasi lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2019 tersebut sebesar Rp1,652 milyar dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,548 Milyar terdapat kenaikan sebesar Rp104 juta atau 6,72%.

2.2.1.2. Belanja Daerah.

Belanja Daerah meliputi; Belanja operasional, Belanja modal dan Belanja tak terduga.



Total realisasi Belanja Daerah yang dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 90,96% atau Rp3,946 triliun dari anggaran setelah perubahan 2019 sebesar Rp4,339 triliun. Realisasi tersebut secara nominal lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp3,524 triliun.

Realisasi Belanja tahun 2019 sebesar Rp3,946 triliun, masing-masing merupakan realisasi dari; Belanja operasi sebesar Rp3,080 triliun atau memiliki proporsi sebesar 78,05%, Belanja modal sebesar Rp866,501 milyar atau memiliki proporsi sebesar 21,96%, Belanja tidak terduga sebesar Rp91,193 juta atau memiliki proporsi sebesar 0,002%.

2.2.1.3. Transfer ke Daerah.

Transfer ke Daerah meliputi; Transfer bagi hasil pendapatan (transfer Bagi Hasil Pajak Daerah) dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya).

Total realisasi Transfer ke Daerah yang dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 99,31% atau Rp878,074 milyar dari anggaran setelah perubahan 2019 sebesar Rp884,169 milyar. Realisasi tersebut secara nominal lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp673,475 milyar.

Realisasi Transfer ke Daerah tahun 2019 sebesar Rp878,074 milyar, masing-masing merupakan realisasi dari; Transfer Bagi Hasil Pendapatan (Bagi Hasil Pajak Daerah) sebesar Rp710,642 milyar atau memiliki proporsi sebesar 80,93% dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa serta Transfer Bantuan Keuangan Lainnya) sebesar Rp167,432 milyar atau memiliki proporsi sebesar 19,07%.



2.3. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif
- 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
- 4) Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Jambi
- 5) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian pembangunan



- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah (pangan, lingkungan, investasi, HAM)
- 8) Memperpendek birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan IT
- 9) *QuickResponse*
- 10) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, sarana, prasarana dan alat kesehatan, obat-obatan secara merata
- 11) Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JKN dan Jamkesda
- 12) Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga yang bersumber daya masyarakat
- 13) Peningkatan koordinasi upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- 14) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- 15) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah
- 16) Meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat
- 17) Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 18) Peningkatan pelestarian budaya lokal
- 19) Peningkatan apresiasi dan penggiat seni budaya dalam menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah
- 20) Meningkatkan tanggung rasa masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan
- 21) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
- 22) Penurunan potensi konflik melalui pencegahan dini dan pengendalian konflik masyarakat
- 23) Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 24) Pemberian layanan hukum pemerintah daerah dan masyarakat
- 25) Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
- 26) Mengembangkan SDM berkemampuan IPTEKIN dan *entrepreneur*



- 27) Pengembangan fasilitas pelatihan yang mendukung IPTEKIN dan *entrepreneur*
- 28) Penguatan budaya IPTEKIN dan *entrepreneur* melalui proses pendidikan dan kebudayaan
- 29) Mendorong usaha-usaha bisnis baru berbasis IPTEKIN dan *entrepreneurship*
- 30) Meningkatkan iklim yang mampu mendorong berkembangnya bisnis berbasis IPTEKIN dan *entrepreneurship*
- 31) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 32) Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu mengubah struktur ekonomi primer ke sekunder dan tersier
- 33) Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan
- 34) Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi
- 35) Menyiapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investasi agribisnis dan agroindustri
- 36) Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD
- 37) Meningkatkan pengembangan usaha yang produktif dan menguntungkan BUMD
- 38) Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif padat karya
- 39) Mengembangkan komoditas unggulan agribisnis berbasis teknologi dan inovasi
- 40) Meningkatkan UMKM binaan
- 41) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 42) Meningkatkan akses terhadap bahan pangan
- 43) Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal
- 44) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal sayur dan buah
- 45) Meningkatkan produksi dan produktivitas, produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN
- 46) Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana teknologi



- 47) Meningkatkan penyediaan sarana produksi dan bibit unggul pertanian di pedesaan
- 48) Percepatan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat
- 49) Perwujudan simpul-simpul maritim Provinsi Jambi
- 50) Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi
- 51) Peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik
- 52) Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak
- 53) Pembangunan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan OP irigasi dan rawa
- 54) Pengendalian daya rusak air
- 55) Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah
- 56) Menerapkan *goodminingpractice*
- 57) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- 58) Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan
- 59) Meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik di bidang industri
- 60) Meningkatkan peran pariwisata dalam pengelolaan SDA
- 61) Pemisahan peran administrator dengan pengelola kawasan hutan melalui pembentukan KPH dan cabang dinas serta operasionalnya
- 62) Memfasilitasi masyarakat dalam mengakses kawasan hutan dengan program perhutanan berbasis masyarakat
- 63) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- 64) Mengoptimalkan patroli, operasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan
- 65) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan tertib peredaran hasil hutan kayu dan non kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan
- 66) Menginventarisasi status dan fungsi kawasan hutan serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan pola ruang
- 67) Melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
- 68) Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan
- 69) Memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan



- 70) Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat terpencil (KAT)
- 71) Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penyaluran tenaga kerja
- 72) Memperluas akses lapangan pekerjaan dan akses permodalan
- 73) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
10. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya



6. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum
9. Meningkatnya *Total Factor Productivity* (TFP)
10. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
12. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
15. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
16. Meningkatnya tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Provinsi Jambi TA 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, maka anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp4.566.472.026.795, anggaran belanja sebesar Rp 4.338.583.747.877,07, Transfer Rp884.169.096.806,25, penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp671.280.817.888,32 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15.000.000.000. Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2019**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	4.566.472.026.795,00	4.575.192.849.736,33	100,19
2	Belanja	4.338.583.747.877,07	3.946.292.724.212,02	90,96
3	Transfer	884.169.096.806,25	878.073.627.200,72	99,31
	Surplus (Defisit)	(656.280.817.888,32)	(249.173.501.676,41)	(37,97)
4	Pembiayaan			
	- Penerimaan	671.280.817.888,32	669.496.931.346,86	100,00
	- Pengeluaran	15.000.000.000,00	0,00	0
	Pembiayaan	656.280.817.888,32	669.496.931.346,86	102,01

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp4.566.472.026.795,00 dapat direalisasikan sebesar Rp4.575.192.849.736,33 atau 100,19% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp4.338.583.747.877,07 direalisasikan sebesar Rp3.946.292.724.212,02 atau 90,96% dari anggaran sedangkan transfer yang dianggarkan sebesar



Rp884.169.096.806,25 direalisasikan sebesar Rp878.073.627.200,72 Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar Rp656.280.817.888,32 direalisasikan defisit sebesar Rp249.168.501.676,41.

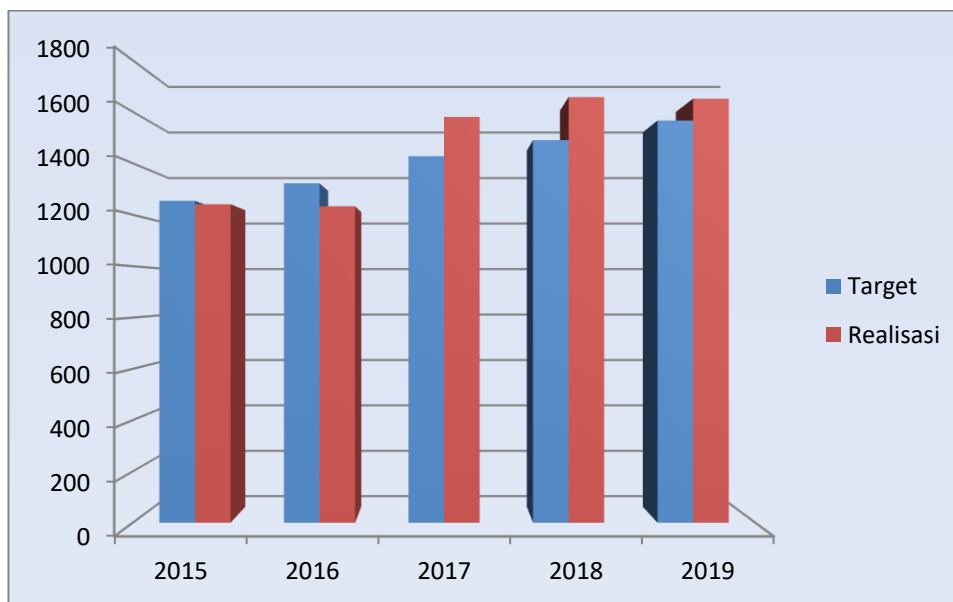
2. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2015 sampai dengan 2019 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan grafik 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2015 s.d. 2019

(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Perkembangan %	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	4	5	6
1.	2015	1.253.624.335.381,67	3,70	1.241.223.028.011,76	(5,86)
2.	2016	1.321.867.908.750,82	5,44	1.233.514.664.109,54	(0,62)
3.	2017	1.426.696.725.798,00	7,35	1.580.304.867.342,36	21,94
4.	2018	1.490.504.569.321,44	4,48	1.656.569.597.282,27	4,85
5.	2019	1.566.447.128.511,00	5,09	1.651.089.944.335,33	(0,33)

Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD TA 2015s.d. 2019



Secara keseluruhan dari TA 2015 sampai dengan TA 2019 target PAD Provinsi Jambi terus menerus mengalami kenaikan, namun walaupun target mengalami kenaikan akan tetapi realisasinya mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan.



Dilihat dari sisi target anggaran, dari TA 2015 sampai dengan TA 2016 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp68.243.573.369,15 atau sebesar 5,44%, TA 2016 sampai TA 2017 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp104.828.817.047,18 atau 7,35%, TA 2017 sampai TA 2018 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp63.807.843.523,44 atau 4,48%, TA 2018 sampai TA 2019 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp75.942.559.189,56 atau 5,09%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, TA 2015 sampai dengan TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp7.708.363.902,22 atau 0,62%, TA 2016 sampai dengan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp346.790.203.232,82 atau 21,94%, TA 2017 sampai dengan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp76.264.729.939,91 atau 4,85%, dan TA 2018 sampai dengan TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.479.652.946,94 atau 0,33%.

Untuk Dana Perimbangan realisasi penerimaan sebesar Rp2.896.753.806.401,00 atau 97,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.972.795.799.284,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan grafik 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.3 Perkembangan Dana Perimbangan
TA 2015 – 2019**

(dalam rupiah)

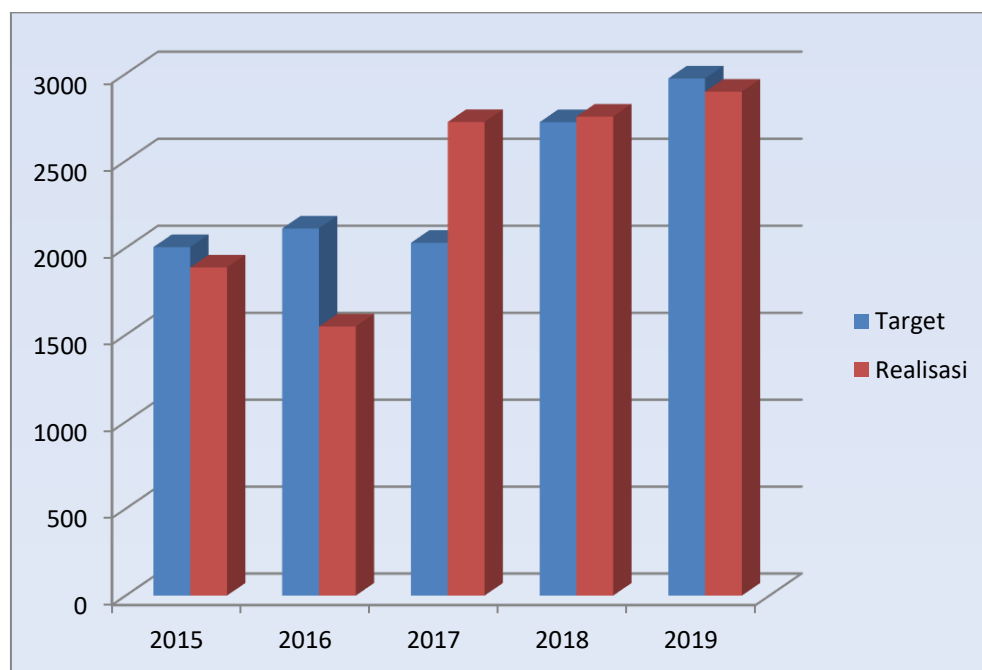
No .	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Perkembangan %	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	4	5	6
1.	2015	2.004.453.463.653,32	28,81	1.887.051.548.864,00	24,60
2.	2016	2.110.651.958.000,00	5,29	1.547.888.628.454,00	14,44
3.	2017	2.028.612.287.504,00	-4,04	2.723.260.588.950,00	43,16
4.	2018	2.721.885.858.300,00	34,17	2.754.346.967.999,00	1,15
5.	2019	2.972.795.799.284,00	9,22	2.896.753.806.401,00	5,17

Dilihat dari sisi target anggaran perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan target dimana pada TA 2015 ke TA 2016 naik sebesar 5,29%, TA 2016 ke TA 2017 turun sebesar - 4,04%, TA 2017 ke TA 2018 naik sebesar 34,17% dan TA 2018 ke TA 2019 naik sebesar 9,22.



Kemudian dari sisi Realisasi Perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer mengalami peningkatan pada TA 2015 ke TA2016 mengalami penurunan sebesar 14,44% dan TA 2016 ke TA 2017 naik sebesar 43.16%, TA 2017 ke TA 2018 naik sebesar 1.15%, dan TA 2018 ke TA 2019 naik sebesar 5,17%.

**Grafik 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2015 s.d. 2019**



Penerimaan yang ada pada Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Penyesuaian dan Pendapatan Hibah. Bila dilihat dari *trend* penerimaan, bahwa Dana Perimbangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi pendapatan.

3. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA2019 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp4.338.583.747.877,07 dan direalisasikan sebesar Rp3.946.292.724.212,02 atau 90,96% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp392.291.023.665,05 Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Operasi TA 2019 dengan target sebesar Rp3.366.389.033.028,05 terealisasi sebesar Rp3.079.700.724.870,80 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja



Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi

Belanja Operasi TA 2019

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	1.513.618.955.041,08	1.382.612.319.837,00	91,35
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.272.602.867.486,97	1.024.032.706.551,84	80,47
3.	Belanja Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
4.	Belanja Hibah	579.104.010.000,00	672.272.497.981,96	116,09
5.	Belanja Bantuan Sosial	563.200.500,00	283.200.500,00	50,28
J u m l a h		Rp3.366.389.033.028,05	Rp3.079.700.724.870,80	91,48

Pada TA 2019, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp962.586.634.494,02 dan terealisasi sebesar Rp866.500.805.931,25 atau 90,02% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Modal Tanah	32.092.937.250,00	4.983.673.286,00	15,53
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.484.018.958,00	138.708.396.761,46	93,42
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.539.410.354,02	179.896.478.251,44	91,07
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	567.719.181.374,00	496.203.734.974,48	87,40
5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	16.223.313.358,00	46.273.722.657,87	285,23
6.	Belanja Aset Lainnya	527.773.200,00	434.800.000,00	82,38
J u m l a h		962.586.634.494,02	866.500.805.931,25	90,02

Untuk belanja tidak terduga tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp9.608.080.355 dan terealisasi sebesar Rp91.193.409,97 atau 0,95%.



Terakhir adalah belanja transfer pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp884.169.096.806,25 terealisasi sebesar Rp878.073.627.200,72 atau 99,31% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2019

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	710.641.702.406,25	710.641.702.400,72	100,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	173.527.394.400,00	167.431.924.800,00	96,49
J u m l a h		884.169.096.806,25	878.073.627.200,72	99,31

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp671.280.817.888,32 dapat direalisasikan sebesar 100%, realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Defisit anggaran yang dianggarkan sebesar (Rp656.280.817.888,32) direalisasikan defisit sebesar (Rp249.173.501.676,41) yang berasal dari efisiensi belanja sebesar Rp407.107.316.211,91 dan menghasilkan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp420.323.429.670,45.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*,

yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

3) **Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4) **Surplus/Defisit-LRA**

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) **Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

6) **Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)**

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7) **Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8) Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

11) Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:



1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRAdiukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

(1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.



(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

(1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

(2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.



5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

7. Akuntansi Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

8. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;



- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Balai Laboratorium Kesehatan, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

9. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);



- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - (1) Kualitas piutang lancar
 - (2) Kualitas piutang kurang lancar
 - (3) Kualitas piutang diragukan
 - (4) Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk



persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);

- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara *First In First Out* (FIFO).

11. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kasdi kas daerah di kredit(jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;



- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi Non Permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.



Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

- a) Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
- c) Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- d) Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Dana Bergulir:



- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal



bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;

- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, untuk masa manfaat aset sebagaimana dimaksud pada kebijakan akuntansi dapat dilihat pada **Lampiran 1**;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

13. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;



- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

14. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud (Kewengan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2019 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

15. Akuntansi KewajibanJangka Pendek

- 1) KewajibanJangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) KewajibanJangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan



- (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
- (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

17. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Di samping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2019.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan (PSAP 12 paragraf 8).

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2019, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp4.575.192.849.736,33	Rp4.412.464.565.281,27

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2019 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.566.472.026.795,00 dan terealisasi sebesar Rp4.575.192.849.736,33 atau sebesar 100,19% dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2018 naik sebesar Rp162.728.284.455,06 atau sebesar 3,69%.

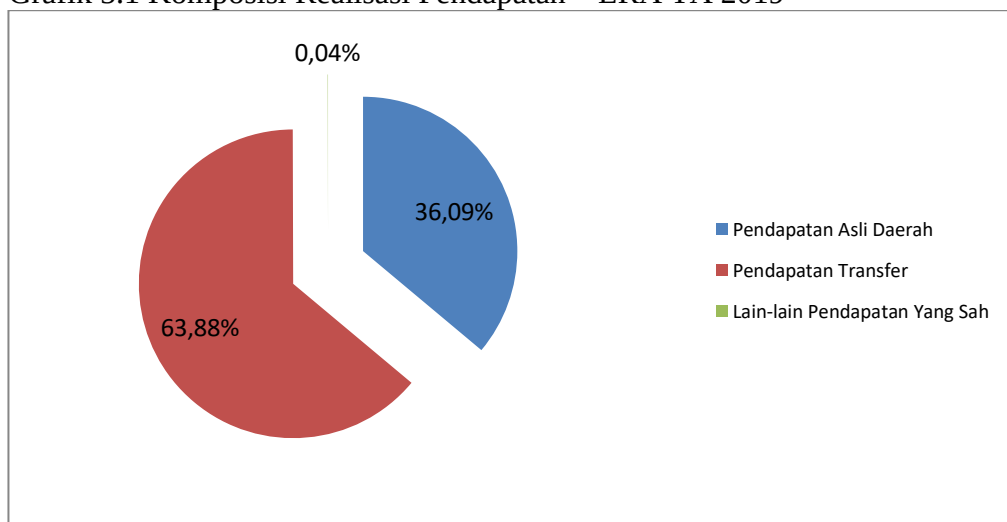
Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima di Kas Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2019 dan 2018 (dalam rupiah)



No .	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.566.447.128.511,00	1.651.089.944.335,33	105,40	1.656.569.597.282,27
2.	Pendapatan Transfer	2.998.536.898.284,00	2.922.494.905.401,00	97,46	2.754.346.967.999,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.488.000.000,00	1.608.000.000,00	108,06	1.548.000.000,00
Jumlah		4.566.472.026.795,00	4.575.192.849.736,33	100,19	4.412.464.565.281,27

Berdasarkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 di atas terlihat bahwa secara keseluruhan pendapatan mencapai target, namun dilihat dari rincian terdapat pendapatan transfer yang tidak mencapai realisasi di atas 100%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 36,09% dan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah sebesar 63,88% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 0,04% seperti terlihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan – LRA TA 2019



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 63,88% dari keseluruhan pendapatan daerah.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp1.651.089.944.335,33	Rp1.656.569.597.282,27

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp1.566.447.128.511,00 dengan realisasi sebesar Rp1.651.089.944.335,33 atau sebesar 105,40% atau turun sebesar Rp5.479.652.946,94 atau sebesar 0,33% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018 sebesar Rp1.656.569.597.282,27. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2019 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2019 dan 2018 (dalam rupiah)

N o.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	% thd PAD	Realisasi 2018
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.341.066.511.897,00	1.345.106.684.308,21	100,30	81,47	1.374.289.409.975,47
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	23.818.190.000,00	19.109.708.620,00	80,23	1,16	20.208.219.913,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.212.590.404,00	31.064.882.846,62	106,34	1,88	30.511.006.521,83
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172.349.836.210,00	255.808.668.560,50	148,42	15,49	231.560.960.871,97
Jumlah		1.566.447.128.511,00	1.651.089.944.335,33	105,40	100,00	1.656.569.597.282,27

5.1.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp1.345.106.684.308,21 Rp1.374.289.409.975,47

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan Pajak Daerah diatur berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jambi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada TA 2019 yang menetapkan seluruh pendapatan pajak daerah merupakan pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2019, kecuali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Berdasarkan ketetapan tersebut, Badan Keuangan Daerah berwenang menganggarkan dan merealisasikan seluruh pendapatan pajak daerah. Dalam pelaksanaannya, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi membawahi 10 UPTB khusus untuk menangani Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.341.066.511.897,00 dengan realisasi sebesar Rp1.345.106.684.308,21 atau sebesar 100,30%, turun sebesar Rp29.182.725.667,26 atau sebesar 2,12% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp1.374.289.409.975,47. Rincian anggaran dan jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Periode 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

N o.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	439.753.923.505,00	457.833.100.330,00	104,11	444.056.622.162,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	373.159.789.745,00	374.030.159.175,00	100,23	406.098.313.000,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	325.152.314.200,00	315.579.366.913,21	97,06	332.619.004.479,47
4.	Pajak Air Permukaan	1.498.224.000,00	1.503.017.937,00	100,32	1.401.946.005,00
5.	Pajak Rokok	201.502.260.447,00	196.161.039.953,00	97,35	190.113.524.329,00
Jumlah		1.341.066.511.897,00	1.345.106.684.308,21	100,30	1.374.289.409.975,47

5.1.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp19.109.708.620,00 Rp20.208.219.913,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp23.818.190.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.109.708.620,00 atau sebesar 80,23%, turun sebesar Rp1.098.511.293,00 atau sebesar 5,44% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp20.208.219.913,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Periode 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No .	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Retribusi Jasa Umum	2.380.990.000,00	1.196.035.000,00	50,23	1.243.455.000,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	20.947.200.000,00	17.901.673.620,00	85,46	18.537.632.113,00

3.	Retribusi Perizinan Tertentu	490.000.000,00	12.000.000,00	2,45	427.132.800,00
Jumlah		23.818.190.000,00	19.109.708.620,00	80,23	20.208.219.913,00

Retribusi Jasa Umum 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp1.196.035.000,00 Rp1.243.455.000,00

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Umum diatur berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Jasa Umum TA 2019 dianggarkan sebesar Rp2.380.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.196.035.000,00 atau sebesar 50,23%, turun sebesar Rp47.420.000,00 atau sebesar 3,81% dari realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2018 sebesar Rp1.243.455.000,00.

Seluruh realisasi Retribusi Jasa Umum dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang merupakan pelunasan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan Tahun 2019. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Periode 2019 dan 2018 (dalam rupiah)

N o.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	2.380.990.000,00	1.196.035.000,00	50,23	1.243.455.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.380.990.000,00	1.196.035.000,00	50,23	1.243.455.000,00

2. Retribusi Jasa Usaha 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp17.901.673.620,00 Rp18.537.632.113,00

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 1 September 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp20.947.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.901.673.620,00 atau sebesar 85,46% dan turun sebesar Rp635.958.493,00 atau sebesar 3,43% dari realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2018 sebesar Rp18.537.632.113,00.



Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Periode 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No .	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.992.500.000,00	2.963.546.000,00	99,03	2.950.324.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	2.992.500.000,00	2.963.546.000,00		2.950.324.000,00
2.	Dinas Perkebunan	1.639.000.000,00	1.731.496.750,00	105,64	1.662.113.800,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (dinas perkebunan)	1.639.000.000,00	1.731.496.750,00		1.662.113.800,00
3	Dinas kelautan dan Perikanan	403.000.000,00	403.810.500,00	100,20	370.247.500,00
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	403.000.000,00	403.810.500,00		322.647.500,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	-		47.600.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum	944.500.000,00	963.611.124,00	102,02	771.532.301,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Laboratorium (DINAS PU)	415.000.000,00	432.607.728,00		347.727.487,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Kendaraan Bermotor (DINAS PU)	529.500.000,00	531.003.396,00		423.804.814,00
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72	245.817.000,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah	510.150.000,00	202.641.000,00		245.817.000,00



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	dan bangunan (dinas pariwisata)				
6.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	4.300.728.000,00	3.367.883.000,00	78,31	3.803.500.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	40.000.000,00	53.873.000,00		35.553.000,00
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	8.500.000,00	8.505.000,00		7.500.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	17.000.000,00	14.500.000,00		13.350.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi	3.687.269.200,00	2.892.136.000,00		3.197.863.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	547.958.800,00	398.869.000,00		549.234.000,00
7.	Dinas Koperasi dan UMKM	-	-	-	4.200.000,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah Ruangan	-	-		4.200.000,00
8.	Badan Penghubung Provinsi Jambi	3.055.580.000,00	1.471.450.000,00	48,16	1.409.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	55.000.000,00	49.700.000,00		39.100.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	3.000.580.000,00	1.421.750.000,00		1.369.900.000,00
9.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.521.242.000,00	1.352.687.300,00	88,92	1.350.799.500,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan	1.521.242.000,00	1.352.687.300,00		1.350.799.500,00



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
10.	Dinas Kehutanan	120.000.000,00	100.287.000,00	83,57	110.200.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi	120.000.000,00	100.287.000,00		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	110.200.000,00
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	490.000.000,00	843.330.000,00	172,11	964.050.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Ruang	490.000.000,00	843.330.000,00		964.050.000,00
12.	Dinas Kesehatan	577.500.000,00	468.270.000,00	81,09	487.620.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang	577.500.000,00	468.270.000,00		487.620.000,00
13.	Dinas Pendidikan	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00	15.400.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	13.000.000,00	12.350.000,00		15.400.000,00
14.	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.000.000,00	18.490.000,00	56,03	27.500.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang	17.000.000,00	8.250.000,00		18.700.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	16.000.000,00	10.240.000,00		8.800.000,00
15.	Dinas Lingkungan Hidup	4.027.000,00	3.737.334,16	92,81	4.141.975,02
	Retribusi Pemakaian	4.027.000,00	3.737.334,16		4.141.975,02

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	kekayaan daerah Laboratorium				
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000,00	264.486.500,00	82,65	223.353.000,00
	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah Laboratorium	320.000.000,00	264.486.500,00		223.353.000,00
	JUMLAH	20.947.200.000,00	17.901.673.620,00	85,46	18.537.632.113,00

3. Retribusi Perizinan Tertentu

31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp12.000.000,00 Rp427.132.800,00

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi pemberian izin trayek dari Dinas Perhubungan dan retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi tenaga kerja asing dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta merupakan pelunasan atas SKRD Tahun 2018. Retribusi Perizinan Tertentu diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012. Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp490.000.000,00 terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 atau sebesar 2,45%, turun sebesar Rp415.132.800,00 atau 97,19% dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2018 sebesar Rp427.132.800,00.

5.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp31.064.882.846,62 Rp30.511.006.521,83

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp29.212.590.404,00 dengan realisasi sebesar Rp31.064.882.846,62 atau sebesar 106,34%, naik sebesar Rp553.876.324,79 atau sebesar 1,82% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 sebesar Rp30.511.006.521,83.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD. Pada Tahun 2019 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari :

Bagian Laba Penyertaan pada:
PT. Bank Jambi

Bagian Laba Penyertaan pada PT. Bank Jambi berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 Tahun 19 April 2016 tentang Pemberian Deviden Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 menjadi sebesar Rp28.764.104.049,99;

PT. Bangun Aksrida

Bagian Laba Penyertaan pada PT. Bangun Aksrida berdasarkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham melalui surat nomor: 265/IV/2016 tanggal 27 April 2019 dengan deviden yang diperoleh tahun 2019 sebesar Rp448.486.355,00. Kontribusi atas Built over Transfer (BOT) yang berasal dari PT. Simotha Putra Parayuda berupa Surat perjanjian Nomor: 1A/KB/CHK/II/2004 dan Nomor: 08/SPP-KB/OHK/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi. Pendapatan BOT PT. Simotha Putra Parayudha tahun 2019 sebesar Rp1.852.292.441,63.

Sedangkan komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 yang tidak terealisasi berupa Kontribusi atas BOT yang berasal dari :

PT. Jambi Sapta Manunggal Pratama

Surat perjanjian tanggal 27 Juni 1995 Jatuh tempo kontribusi tanggal 21 Januari 1995;

Adendum I Perjanjian Kerjasama Kontrak Produksi antara Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dengan PT. Jambi Sapta Manunggal Pratama Nomor 14 Tanggal 17 September 2018 dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort di Jalan Slamet Riyadi Jambi.

PT. Simotha Putra Parayuda

Surat perjanjian Nomor: 1A/KB/CHK/II/2004 dan Nomor: 08/SPP-KB/OHK/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi.

Pendapatan BOT PT. Simotha Putra Parayudha tahun 2019 sebesar Rp1.852.292.441,63;

Adendum Surat Perjanjian Nomor: 1/KB/OHK/II/2006 dan Nomor: 028/SPP-KB/II/06 Tanggal 08 Februari 2006 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Simotha Putra Parayudha Nomor: 1A/KB/CHK/II/2004 dan Nomor: 08/SPP-KB/OHK/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi;

Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Simotha Putra Parayudha tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Jambi Nomor:

24.C/LHP/XVIII.JMB/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 terhadap kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi mengganti biaya pembangunan gedung Bea dan Cukai dan pembayaran kekurangan kontribusi PT. Simotha Putra Parayudha kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

PT Kurnia Properti

Surat perjanjian Nomor: 07/PK.GUB/PU/2014 tentang Pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center dengan pola bangunan serah. Pada tahun 2019 belum memberikan kontribusi karena masih dalam proses pengajuan Hak pengelolaan lahan (HPL) ke Badan Pertanahan Nasional.

PT. Eraguna Bumi Nusa

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 06/PK.GUB/PU/2014 dan Nomor: 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru dengan Pola Bangun Guna Serah.



Adendum Pertama Surat Perjanjian Nomor: 644/09/Setda.PKS/X /2018 dan Nomor: 09/X/EBN/PKS/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru dengan Pola Bangun Guna Serah.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Periode 2019 dan 2018 (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Bank Jambi	28.764.104.049,00	28.764.104.049,99	100,00	28.763.796.289,83.
2.	PT JSMP	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00.
3.	PT Simota Putra Parayuda	0,00	1.852.292.441,63		425.495.741,00.
4.	PT Bangun Askrida	448.486.355,00	448.486.355,00	100,00	571.714.491,00.
5.	Angso Duo	0,00	0,00	0,00	,00
6.	Jambi Bisnis Centre	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		29.212.590.404,00	31.064.882.846,62	106,34	30.511.006.521,83

5.1.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp255.808.668.560,50 Rp231.560.960.871,97

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp172.349.836.210,00 dengan realisasi sebesar Rp255.808.668.560,50 atau sebesar 148,42%, naik sebesar Rp24.247.707.688,53 atau sebesar 10,47% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2018 sebesar Rp231.560.960.871,97.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp255.808.668.560,50 termasuk di dalamnya :

Pendapatan BLUD (RSUD, RSJ, LABKES) dengan realisasi sebesar Rp146.649.961.355,51;

Lain-lain Pendapatan yang sah pada SKPKD sebesar Rp109.158.707.204,99.

Rincian data dapat dilihat pada Lampiran 2a.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp2.922.494.905.401,00 Rp2.754.346.967.999,00



Pendapatan Transfer ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Perubahan). Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.998.536.898.284,00 dengan realisasi sebesar Rp2.922.494.905.401,00 atau sebesar 97,46%. Pendapatan Transfer TA 2019 naik sebesar Rp168.147.937.402,00 atau sebesar 6,10% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 sebesar Rp2.754.346.967.999,00. Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA.2019 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Jambi Periode 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.972.795.799.284,00	2.896.753.806.401,00	97,44	2.745.221.967.999,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	25.741.099.000,00	25.741.099.000,00	100,00	9.125.000.000,00
Jumlah		2.998.536.898.284,00	2.922.494.905.401,00	97,46	2.754.346.967.999,00

5.1.1.2.a Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp2.896.753.806.401,00 Rp2.745.221.967.999,00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp2.972.795.799.284,00 dan terealisasi sebesar Rp2.896.753.806.401,00 atau sebesar 97,44%, naik sebesar Rp151.531.838.402,00 atau sebesar 5,52% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2018 sebesar Rp2.745.221.967.999,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Transfer Khusus, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jambi Periode 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	(%)	Realisasi TA 2018
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	171.834.096.734,00	144.621.955.642,00	84,16	168.557.795.000,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	275.282.664.550,00	251.920.066.705,00	91,51	238.247.178.000,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.433.203.410.000,00	1.433.203.410.000,00	100,00	1.399.367.130.000,00

4.	Dana Alokasi Khusus	1.092.475.628.000,00	1.067.008.374.054,00	97,67	939.049.860
	JUMLAH	2.972.795.799.284,00	2.896.753.806.401,00	97,44	2.745.221.96

Berdasarkan tabel di atas diketahui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Provinsi Jambi dengan pencapaian tertinggi pada Dana Alokasi Umum sebesar 100,00%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dapat dilihat pada Lampiran 2b.

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp144.621.955.642,00 Rp168.557.795.503,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp171.834.096.734,00 dan realisasi sebesar Rp144.621.955.642,00 atau sebesar 84,16%, turun sebesar Rp23.935.839.861,00 atau sebesar 14,20% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 sebesar Rp168.557.795.503,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9.1. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi
Periode 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	(%)	Realisasi 2018
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	113.853.774.000,00	107.931.574.642,00	94,80	107.971.063.085,00
2	Bagi Hasil PPH Pasal 21 dan 25/29	57.980.322.734,00	36.690.381.000,00	63,28	60.586.732.418,00
	JUMLAH	171.834.096.734,00	144.621.955.642,00	84,16	168.557.795.503,00

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp251.920.066.705,00 Rp238.247.178.484,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp275.282.664.550,00 dan realisasi sebesar Rp251.920.066.705,00 atau sebesar 91,51%, naik sebesar Rp13.672.888.221,00 atau sebesar 5,74% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2018 sebesar Rp238.247.178.484,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9.2. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Jambi
Periode 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
-----	--------	---------------	----------------	---	----------------

1	Provisi Sumber Daya Hutan	4.875.947.000,00	5.455.902.058,00	111,89	6.861.202.535,00
2	Iuran Tetap (Land Rent)	1.681.219.000,00	1.258.492.802,00	74,86	1.766.566.260,00
3	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	40.389.037.000,00	39.937.500.651,00	98,88	29.265.588.404,00
4	Pertambangan Minyak Bumi	87.961.188.000,00	66.655.326.684,00	75,78	-
5	Pertambangan Gas Bumi	125.795.100.000,00	124.788.424.363,00	99,20	194.353.006.825,00
6	Bagi Hasil Cukai Tembakau	2.624.902.800,00	2.627.333.491,00	100,09	1.885.236.750,00
7	Dana Reboisasi	6.052.253.750,00	5.591.247.501,00	92,38	4.115.577.710,00
8	BP-PBB	5.903.017.000,00	5.605.839.155,00	94,97	-
	JUMLAH	275.282.664.550,00	251.920.066.705,00	91,51	238.247.178.484,00

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp1.433.203.410.000,00 Rp1.399.367.134.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.433.203.410.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.433.203.410.000,00 atau sebesar 100,00%, naik sebesar Rp33.836.276.000,00 atau sebesar 2,42% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum TA 2018 sebesar Rp1.399.367.134.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.9.3. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi Periode 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Dana Alokasi Umum	1.433.203.410.000,00	1.433.203.410.000,00	100,00%	1.399.367.134.000,00
	SUB JUMLAH	1.433.203.410.000,00	1.433.203.410.000,00	100,00%	1.399.367.134.000,00

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp1.067.008.374.054,00 Rp939.049.860.012,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp1.092.475.628.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.067.008.374.054,00 atau sebesar 97,67%. Realisasi tahun 2019 tersebut naik sebesar Rp127.958.514.042,00 atau sebesar 13,63% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus TA 2018 sebesar Rp939.049.860.012,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9.4. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Jambi Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
1.	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	74.279.430.000,00	95.130.226.413,00	128,07
	DAK Bidang Pendidikan	32.573.314.000,00	32.384.555.270,00	99,42
	DAK Bidang Kesehatan	23.107.645.000,00	21.114.307.685,00	91,37
	DAK Bidang Pertanian	14.250.000.000,00	13.678.087.838,00	95,99
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.371.014.000,00	1.803.280.455,00	76,06
	DAK Bidang Pariwisata	1.977.457.000,00	1.428.441.165,00	72,24
	DAK Bidang Jalan	0,00	24.721.554.000,00	
2.	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	107.139.454.000,00	78.588.058.796,00	73,35
	DAK Bidang Pendidikan SMK	61.510.651.000,00	61.005.147.232,00	99,18
	DAK Bidang Kesehatan-RS Rujukan	7.763.844.000,00	7.452.630.086,00	95,99
	DAK Bidang Jalan-Pendukung Konektivitas	26.142.638.000,00	00	00
	DAK Bidang Irigasi-Pendukung Kedaulatan Pangan	2.769.749.000,00	2.548.988.000,00	92,03
	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.906.407.000,00	4.729.497.728,00	80,07
	DAK Bidang Pasar	3.046.165.000,00	2.851.795.750,00	93,62
3.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	911.056.744.000,00	893.290.088.845,00	98,05
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	736.167.948.000,00	718.627.288.000,00	97,62
	Tunjangan Profesi Guru	158.666.505.000,00	158.666.505.000,00	100,00
	Tunjangan Penghasilan Guru	3.852.000.000,00	3.852.000.000,00	100,00
	Bantuan Operasional Kesehatan	2.929.500.000,00	3.071.542.949,00	104,85
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	1.927.390.000,00	1.924.159.722,00	99,83
	Dana Pelayanan Adm.Kependudukan	1.586.401.000,00	1.521.593.174,00	95,91
	Akreditasi Labkesda	300.000.000,00	00	00

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	5.627.000.000,00	5.627.000.000,00	100,00
	JUMLAH TOTAL	1.092.475.628.000,00	1.067.008.374.054,00	97,67

5.1.1.2.b Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp25.741.099.000,00 Rp9.125.000.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dianggarkan sebesar Rp25.741.099.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.741.099.000,00 atau sebesar 100,00% naik sebesar Rp16.616.099.000,00 atau sebesar 182,09% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2018 sebesar Rp9.125.000.000,00, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pusat Lainnya Provinsi Jambi Periode 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Dana Insentif Daerah	25.741.099.000,00	25.741.099.000,00	100,00	9.125.000.000,00
2.	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	-	-		-
	Jumlah	25.741.099.000,00	25.741.099.000,00	100,00	9.125.000.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp1.608.000.000,00 Rp1.548.000.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.488.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.608.000.000,00 atau sebesar 108,06%, naik sebesar Rp60.000.000,00 atau sebesar 3,88% dari realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah TA 2018 sebesar Rp1.548.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Jambi Periode 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
-----	--------	---------------	----------------	---	----------------



1.	Pendapatan Hibah/ Sumbangan Jasa Raharja	1.488.000.000,00	1.608.000.000,00	108,06	1.548.000.000,00
2.	Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana TA 2016	-	-	-	-
3.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	-	-	-
4.	Pendapatan Luar Biasa (saldo dana BOS TA 2016)	0	0,00	-	-
	Jumlah	1.488.000.000,00	1.608.000.000,00	108,06	1.548.000.000,00

5.1.2. Belanja 31 Desember 2019 31 Desember 2018
 Rp3.946.292.724.212,02 Rp3.518.360.175.187,41

Secara garis besar, Belanja terdiri dari tiga bagian yakni Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tak terduga.

Belanja Daerah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp4.338.583.747.877,07 dengan realisasi sebesar Rp3.946.292.724.212,02 atau sebesar 90,96%, naik sebesar Rp427.932.549.024,61 atau sebesar 12,17% dari realisasi Belanja TA 2018 sebesar Rp3.518.360.175.187,41. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Jambi
 TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Operasi	3.366.389.03 3.028,05	3.079.700.72 4.870,80	91,4 8	2.733.539.58 5.386,48
2.	Belanja Modal	962.586.634. 494,02	866.500.805. 931,25	90,0 2	784.723.907. 609,16
3.	Belanja Tak Terduga	9.608.080.35 5,00	91.193.409,9 7	0,95	96.682.191,7 7
	Jumlah	4.388.583.74 7.877,07	3.946.292.72 4.212,02	90,9 6	3.518.360.17 5.187,41

5.1.2.1 Belanja Operasi 31 Desember 2019 31 Desember 2018
 Rp3.079.700.724.870,80 Rp2.733.539.585.386,48

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.366.389.033.028,05 dengan realisasi sebesar Rp3.079.700.724.870,80 atau sebesar 91,48%, naik sebesar Rp346.161.139.484,32 atau sebesar 12,66% dari realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp2.733.539.585.386,48. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Jambi
TA 2019 dan TA 2018
(dalam rupiah)

No .	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Pegawai	1.513.618.955.041,08	1.382.612.319.837,00	91,34	1.303.794.986.013,66
2.	Belanja Barang	1.272.602.867.486,97	1.024.032.706.511,84	80,47	941.766.705.944,82
3.	Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
4.	Hibah	579.104.010.000,00	672.272.497.981,96	116,09	487.359.693.428,00
5.	Bantuan Sosial	563.200.500,00	283.200.500,00	50,28	118.200.000,00
	Jumlah	3.366.389.033.028,05	3.079.700.724.870,80	91,48	2.733.539.585.386,48

5.1.2.1.a Belanja Pegawai 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp1.382.612.319.837,00 Rp1.303.794.986.013,66

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.513.618.955.041,08 dengan realisasi sebesar Rp1.382.612.319.837,00 atau sebesar 91,34% dari anggarannya, naik sebesar Rp78.817.333.823,34 atau sebesar 6,05% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp1.303.794.986.013,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Objek
Provinsi Jambi Periode 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No .	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	849.563.510.001,07	771.834.512.284,00	90,85	749.463.291.414,14
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	448.516.818.891,48	406.463.950.853,00	90,62	298.718.646.677,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota	12.496.439.792,53	11.915.350.000,00	95,35	10.670.010.641,00

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	DPRD,KDH/ WKDH				
4.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.231.995.356,00	29.963.696.063,00	74,48	34.061.640.708,00
5.	Belanja Pegawai BLUD	-	-	0	65.763.849.573,52
6.	Belanja Honorarium Operator LPPK dan TEPRA	-	-	0	6.000.000,00
7	Tunjangan Profesi Guru	158.666.505.000,00	158.582.362.637,00	99,95	145.073.559.800,00
7.	Tunjangan Penghasilan i Guru	3.852.000.000,00	3.610.000.000,00	93,72	-
8.	Tunjangan Khusus Guru	291.686.000,00	242.448.000,00	83,12	37.987.200,00
	Jumlah	1.513.618.955.041,08	1.382.612.319.837,00	91,35	1.303.794.986.013,66

Atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.382.612.319.837,00 dianggarkan dan direalisasikan oleh 37 SKPD.

Rincian belanja pegawai per OPD dapat dilihat pada Lampiran 3.

5.1.2.1.b Belanja Barang 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp1.024.032.706.551,84 Rp941.766.705.944,82

Belanja Barang TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.272.602.867.486,97 dengan realisasi sebesar Rp1.024.032.706.551,84 atau sebesar 80,47% dari anggarannya, naik sebesar Rp82.266.000.607,02 atau sebesar 8,74% dari realisasi Belanja Barang TA 2018 sebesar Rp941.766.705.944,82 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam

rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja bahan pakai habis	44.653.439.836,00	42.533.602.569,00	95,25	41.411.038.842,00
2.	Belanja bahan/material	49.675.097.086,00	47.210.580.336,00	95,04	50.710.827.387,81

N o	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
3.	Belanja jasa kantor	156.435.245.163,17	131.644.895.441,35	84,65	137.727.057.442,00
4.	Belanja premi asuransi	23.575.445.800,00	19.738.423.157,60	83,72	5.832.328.176,39
6.	Belanja perawatan kendaraan bermotor	22.207.046.817,98	19.865.974.987,00	89,46	18.220.233.629,00
7.	Belanja cetak dan penggandaan	18.955.781.377,00	17.519.979.580,00	92,43	16.794.447.850,00
8.	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	4.688.015.000,00	4.078.566.014,00	87,00	3.605.605.198,00
9.	Belanja sewa alat berat	680.000.000	649.000.000,00	95,44	-
10.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	7.100.257.500,00	6.892.873.000,00	97,08	6.464.051.850,00
11.	Belanja makanan dan minuman	70.534.241.349,00	60.630.914.709,00	85,96	59.755.085.314,00
12.	Belanja Sarana Mobilitas Darat	17.632.939.480,00	17.378.533.700,00	98,56	12.904.930.000,00
13.	Belanja pakaian dinas dan atributnya	7.102.517.433,00	6.497.398.470,00	91,48	5.432.889.200,00
14.	Belanja pakaian kerja	1.241.146.000,00	1.222.841.560,00	98,60	1.145.248.820,00
15.	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.922.503.140,00	3.807.554.822,00	97,07	3.127.658.100,00
16.	Belanja perjalanan dinas	206.839.005.667,47	196.927.267.808,00	95,21	165.621.246.557,00
17.	Belanja pemeliharaan	22.809.062.804,00	22.096.069.459,00	96,87	22.383.936.218,30
18.	Belanja jasa konsultasi	17.067.725.250,00	14.692.269.683,00	86,08	6.569.614.908,00
19.	Belanja beasiswa pendidikan PNS	967.750.000,00	877.750.000,00	90,70	1.426.547.500,00
20.	Belanja kursus, pelatihan,	5.357.969.105,00	4.375.838.899,00	81,67	4.074.579.050,00

N o	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				
2 1.	Belanja honorarium PNS	22.378.571.260,00	18.363.122.881,00	82,06	18.969.571.070,00
2 2.	Belanja honorarium non PNS	118.664.546.679,00	111.800.116.315,00	94,22	90.587.971.762,00
2 3.	Belanja barang dana Jasa Bos	226.729.828.000,00	113.702.045.089,00	50,15	150.460.067.792,00
2 4.	Belanja honorarium operator LPPK dan TEPPRA	-	-	00,00	554.000.000,00
2 5.	Belanja Beasiswa Pendidikan	14.667.500.000,00	14.192.500.000,00	96,76	14.697.240.000,00
2 6.	Belanja perlengkapan/ peralatan kantor	1.336.239.000,00	1.245.612.664,00	93,22	691,461.900,00
2 7.	Belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimtek	1.540.000.000,00	921.430.000,00	93,22	850.350.000,00
2 8.	Belanja jasa iuran	650.400.000,00	634.560.000,00	97,56	96.400.000,00
2 9.	Belanja barang dan jasa BLUD	71.415.537.680,47	82.874.769.501,05	116,05	70.656.254.640,32
3 0.	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	76.833.723.492,88	61.609.735.906,84	92,25	3.503.850.000,00
3 1.	Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	56.892.832.566,00	-	00,00	27.492.212.738,00
3 2.	Belanja Perlengkapan/ peralatan Olahraga	48.500.000,00	48.480.000,00	100,00	-
	Jumlah	1.272.602.867.486,97	1.024.032.706.551,84	79,78	941.766.705.944,82



Belanja Barang sebesar Rp1.024.032.706.551,84 termasuk di dalamnya Belanja Barang BLUD (RSUD, RSJ, LABKES) dengan realisasi sebesar Rp82.874.769.501,05. Rincian belanja barang per OPD dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.1.2.1.c Belanja Subsidi 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp500.000.000,00 Rp500.000.000,00

Belanja Subsidi TA 2019 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Subsidi Tahun ini sama dengan realisasi tahun 2018. Belanja Subsidi tersebut digunakan untuk subsidi bahan pokok sebagai antisipasi pelonjakan harga sembako pada hari lebaran.

5.1.2.1.d Belanja Hibah 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp672.272.497.981,96 Rp487.359.693.428,00

Belanja Hibah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp579.104.010.000,00 dengan realisasi sebesar Rp672.272.497.981,96 atau sebesar 116,00% naik sebesar Rp184.912.804.553,96 atau sebesar 37,94% dari realisasi Belanja Hibah TA 2018 sebesar Rp487.359.693.428,00. Anggaran, realisasi, dan penerima hibah TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Jambi TA 2019
(dalam rupiah)

No.	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi				
1	Belanja Hibah kepada KONI	10.000.000.000,00	9.083.436.700,00	90,83	9.545.55
2	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.
3	Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah	4.530.000.000,00	4.300.200.000,00	94,93	1.060.00
4	Belanja Hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan	3.193.244.500,00	2.313.244.500,00	72,44	560.000.
5	Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka	850.000.000,00	830.899.838,00	97,75	1.754.72
6	Belanja Hibah Kepada Lembaga Adat Melayu Jambi	0,00	0,00		374.888.
7	Belanja Hibah Kepada BAZARNAS	0,00	0,00		300.000.
8	Belanja Hibah Kepada Ika Unja	0,00	0,00		200.000.

No.	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
9	Belanja Hibah kepada POLDA Jambi	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Hibah kepada NPC	1.348.210.000,00	1.348.210.000,00	100,00	0,00
11	Belanja hibah kepada KPU Provinsi Jambi	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Hibah kepada komisi penyiari indonesia daerah (KPID) Provinsi Jambi	926.755.500,00	904.810.387,00	97,63	919.750.
13	Belanja Hibah kepada BAWASLU Provinsi Jambi	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Hibah Kepada Gereja Katolik Paroki Santa Teresia	0,00	0,00	0,00	297.500.
15	Belanja Hibah Kepada Pimpinana Wilayah Dewan Mesjid	0,00	0,00	0,00	150.000.
16	Belanja Hibah yg berasal dari belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ke tiga	0,00	30.463.904.200,00	0,00	0,00
17	Belanja Hibah yg berasal dari belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	14.339.312.356,96	0,00	0,00
	Belanja Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan dasar Kab/Kota				
18	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Batanghari	36.971.000.000,00	43.505.400.000	117,67	36.579.2
19	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Bungo	44.864.000.000,00	49.977.720.000,00	111,40	44.723.7
20	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Kerinci	27.462.400.000,00	34.447.160.000,00	125,43	27.202.3
21	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Merangin	49.654.800.000,00	56.554.640.000,00	113,90	49.212.6
22	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Muaro Jambi	48.123.400.000,00	53.894.080.000,00	111,99	47.663.6
23	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Sarolangun	38.601.400.000,00	43.418.560.000,00	112,48	38.183.1
24	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur	28.278.600.000,00	32.128.360.000,00	113,61	27.942.4
25	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tebo	43.080.600.000,00	49.377.920.000,00	114,62	42.739.8
26	Satuan Pendidikan Dasar Kota Jambi	78.151.400.000,00	78.576.000.000,00	100,54	76.751.4

No.	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
27	Satuan Pendidikan Dasar Kota Sungai Penuh	11.833.400.000,00	13.115.960.000,00	110,84	11.861.4
28	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Barat	40.561.400.000,00	44.080.800.000,00	109,00	40.052.2
	Belanja Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan dasar Kab/Kota				
30	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Batanghari	1.024.000.000,00	1.036.200.000,00	101,19	923.720.
31	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Bungo	1.292.600.000,00	1.388.320.000,00	107,41	1.089.20
32	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Kerinci	256.400.000,00	301.120.000,00	117,44	240.320.
33	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Merangin	683.000.000,00	762.280.000,00	111,61	478.800.
34	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Ma. Jambi	2.593.200.000	2.708.480.000,00	104,45	2.219.00
35	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Sarolangun	2.729.800.000,00	2.821.080.000,00	103,34	2.334.36
36	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1.104.000.000,00	1.161.720.000,00	105,23	968.800.
37	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	511.200.000,00	521.520.000,00	102,02	466.200.
38	Satuan Pendidikan Menengah Kota Jambi	19.402.000.000,00	18.434.600.000,00	95,01	18.279.5
39	Satuan Pendidikan Menengah Sungai Penuh	89.600.000,00	72.800.000,00	81,25	151.480.
40	Satuan Pendidikan Menengah kabupaten Tebo	2.937.600.000,00	2.953.760.000,00	100,55	1.533.76
JUMLAH		579.104.010.000,00	672.272.497.981,96	116,09	487.359.

Pelampauan Anggaran atas Belanja Hibah BOS karena adanya pergeseran setelah Perubahan APBD sementara pada Simda tidak mengakomodir Pergeseran setelah Perubahan APBD, namun demikian Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor: 903/1043/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, SE tersebut mengamanatkan dapat melakukan Pergeseran Perubahan APBD dan dilaporkan di LRA.

Pengembalian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dari beberapa penerima sebesar Rp957.608.575,00 sebagai berikut.
Pengembalian Belanja Hibah Pramuka sebesar Rp19.100.162,00



Pengembalian Belanja Hibah KPID sebesar Rp21.945.113,00
Pengembalian Belanja Hibah KONI sebesar Rp916.563.300,00.

Terkait dengan Penolakan Penerimaan Dana BOS ada satu sekolah Dasar swasta yang menolak untuk menerima bantuan Dana BOS sebesar Rp9.000.000,00 yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Nomor: 421/308/LP.SHSJBI/X/2019 tentang Penolakan Dana BOS, dengan asumsi Sekolah Dasar tersebut mampu membiayai operasional sekolahnya.

5.1.2.1.e Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp283.200.500,00	Rp118.200.000,00	

Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dianggarkan sebesar Rp563.200.500,00 dengan realisasi sebesar Rp283.200.500,00 atau 50,28%. Belanja Bantuan Sosial tersebut naik sebesar Rp165.000.500,00 atau 139,59% dibanding TA 2018 sebesar Rp118.200.000,00. Belanja Bantuan Sosial ini diberikan kepada Anggota Masyarakat yang kurang mampu atas nama M. Galaxi Ar Shaka Ransi, penderita Rubella Konginental untuk pengobatan tuli berat 110 DB melalui implan koklea.

5.1.2.2 Belanja Modal	31 Desember 2019	31 Desember
2018		
Rp866.500.805.931,25	Rp784.723.907.609,16	

Belanja Modal TA 2019 dianggarkan sebesar Rp962.586.634.494,02 dengan realisasi sebesar Rp866.500.805.931,25 atau sebesar 90,02%, naik sebesar Rp81.776.898.322,09, atau sebesar 10,42% dari realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp784.723.907.609,16.

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Output atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset tetap serta ekuitas yang tercatat dalam Neraca.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi
TA 2019 dan TA 2018
(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Tanah	32.092.937.250,00	4.983.673.286,00	15,53	1.477.206.406,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	148.484.018.958,00	138.708.396.761,46	93,42	120.900.807.250,20
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	197.539.410.354,02	179.896.478.251,44	91,07	136.265.370.912,44

No	Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	567.719.181.374,00	496.203.734.974,48	87,40	505.320.632.964,52
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.223.313.358,00	46.273.722.657,87	285,23	20.759.890.076,00
6.	Belanja Aset Lainnya	527.773.200,00	434.800.000,00	82,38	0,00
Jumlah		962.586.634.494,02	866.500.805.931,25	90,02	784.723.907.609,16

Belanja Modal sebesar Rp866.500.805.931,25 termasuk di dalamnya Belanja Modal BLUD (RSUD, RSJ, LABKES) dengan realisasi sebesar Rp13.205.797.380,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya melebihi anggaran karena belanja modal BOS. Rincian belanja modal per OPD dapat dilihat pada Lampiran 5a dan 5b.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp91.193.409,97 Rp96.682.191,77

Belanja Tak Terduga TA 2019 dianggarkan sebesar Rp9.608.080.355,00 dengan realisasi sebesar Rp91.193.409,97 atau sebesar 0,95% turun sebesar Rp5.488.781,80 atau 5,68% dari realisasi Belanja Tak Terduga TA 2018 sebesar Rp96.682.191,77. Belanja tak terduga tersebut digunakan untuk pengembalian Uang akibat salah setor dari CV. Mitra Sejati Gemilang dari Kasda sebesar Rp7.187.409,97 dan Pembayaran Pengembalian Dana Retribusi DPKK Akibat kesalahan setor kepada PT. Daqing Jaya Petroleum Engineering sebesar Rp84.006.000,00.

5.1.3 Transfer 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp878.073.627.200,72 Rp679.895.543.087,90

Transfer TA 2019 dianggarkan sebesar Rp884.169.096.806,25 dengan realisasi sebesar Rp878.073.627.200,72 atau sebesar 99,31% naik sebesar Rp198.178.084.112,82 atau sebesar 29,15% dari realisasi Transfer TA 2018 sebesar Rp679.895.543.087,90.

Transfer dianggarkan untuk membiayai pengeluaran sebagai wujud pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan kepentingan Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
TA 2019 dan TA 2018
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
----	--------	---------------	----------------	---	----------------

1.	Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan	710.641.702.406,25	710.641.702.400,72	100,00	579.768.148.687,90
2.	Transfer Bantuan Keuangan	173.527.394.400,00	167.431.924.800,00	96,49	100.127.394.400,00
Jumlah		884.169.096.806,25	878.073.627.200,72	99,31	679.895.543.087,90

5.1.3.a Bagi Hasil Pajak 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp710.641.702.400,72 Rp579.768.148.687,90

Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi dialokasikan ke Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp710.641.702.406,25 dengan realisasi sebesar Rp710.641.702.400,72 atau 100,00%, naik sebesar Rp130.873.553.712,82 atau sebesar 22,57% dari Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota TA 2018 sebesar Rp579.768.148.687,90. Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa adalah sebagai berikut.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi TA 2019 dan 2018
(dalam rupiah)



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Kota Jambi	114.911.044. 081,60	114.911.044. .081,07	100, 00	92.499.055. 800,83
2.	Kabupaten Batang Hari	61.073.729.6 57,79	61.073.729. 657,79	100, 00	49.750.801. 465,15
3.	Kabupaten Muaro Jambi	63.839.805.8 97,07	63.839.805. 896,26	100, 00	52.192.732. 708,63
4.	Kabupaten Bungo	69.449.800.8 10,43	69.449.800. 809,47	100, 00	56.800.763. 747,19
5.	Kabupaten Tebo	60.297.111.3 11,32	60.297.111. 310,72	100, 00	48.970.207. 541,86
6.	Kabupaten Kerinci	52.374.712.3 69,57	52.374.712. 369,57	100, 00	42.963.851. 505,93
7.	Kabupaten Merangin	63.373.569.7 83,60	63.373.569. 782,75	100, 00	52.220.951. 025,90
8.	Kabupaten Sarolangun	61.043.382.2 68,34	61.043.382. 267,15	100, 00	49.911.154. 169,64
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	60.872.130.5 04,56	60.872.130. 503,97	100, 00	49.911.489. 707,53
10.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	53.524.507.2 86,90	53.524.507. 286,90	100, 00	43.732.150. 448,41
11.	Kota Sungai Penuh	49.881.908.4 35,07	49.881.908. 435,07	100, 00	40.814.990. 566,83
Jumlah		710.641.702. 406,25	710.641.702. .400,72	100, 00	579.768.148. 687,90

Belanja tersebut merupakan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi.

5.1.3.b Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp165.466.500.000,00 Rp98.066.500.000,00

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ke Kabupaten/Kota TA 2019 dianggarkan sebesar Rp171.466.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp165.466.500.000,00 atau sebesar 96,50% naik sebesar Rp67.400.000.000,00 dan atau 68,73% dibanding Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota TA 2018 sebesar Rp98.066.500.000,00.

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ke Kabupaten/Kota terdiri dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang dijelaskan sebagai berikut.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp87.526.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp81.526.500.000,00 atau sebesar 93,14%. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan



berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1311/KEP.GUB/BAKEUDA-5.2/2019 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 5.20 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Kota Kota Jambi	9.720.000.000,00	9.720.000.000,00	100	3.720.000.000,00
2	Kabupaten Muaro Jambi	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100	300.000.000,00
3	Kabupaten Batang Hari	6.840.000.000,00	6.840.000.000,00	100	840.000.000,00
4	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	11.546.500.000,00	11.546.500.000,00	100	1.200.000.000,00
5	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	7.200.000.000,00	1.200.000.000,00	16,67	1.200.000.000,00
6	Kabupaten Sarolangun	6.540.000.000,00	6.540.000.000,00	100	540.000.000,00
7	Kabupaten Merangin	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	100	4.946.500.000,00
8	Kabupaten Bungo	6.720.000.000,00	6.720.000.000,00	100	720.000.000,00
9	Kabupaten Tebo	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100	300.000.000,00
10	Kabupaten Kerinci	13.520.000.000,00	13.520.000.000,00	100	120.000.000,00
11	Kabupaten Sungai Penuh	6.240.000.000,00	6.240.000.000,00	100	240.000.000,00
	Jumlah	87.526.500.000,00	81.526.500.000,00	93,14	14.126.500.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Khusus tersebut disalurkan untuk Bantuan Keuangan Kelurahan sebesar Rp9.780.000.000,00 dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berupa Alat Berat sebesar Rp71.746.500.000,00. Realisasi di bawah nilai Anggaran Pemkab Tanjung Jabung Barat pada Bantuan Keuangan

Kabupaten/Kota khususnya bahan Alat Berat dikarenakan Pemda Tanjung Jabung Barat terlambat melengkapi persyaratan yang ditetapkan Pemda Provinsi Jambi.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp83.940.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp83.940.000.000,00 atau sebesar 100%. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 968/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2019 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Penerima Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 5.21 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Kabupaten Muaro Jambi	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100	9.000.000.000,00
2	Kabupaten Batanghari	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	100	6.600.000.000,00
3	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	100	4.380.000.000,00
4	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	6.840.000.000,00	6.840.000.000,00	100	6.840.000.000,00
5	Kabupaten Tebo	6.420.000.000,00	6.420.000.000,00	100	6.420.000.000,00
6	Kabupaten Bungo	8.460.000.000,00	8.460.000.000,00	100	8.460.000.000,00
7	Kabupaten Merangin	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	100	12.300.000.000,00
8	Kabupaten sarolangun	8.940.000.000,00	8.940.000.000,00	100	8.940.000.000,00
9	Kabupaten Kerinci	17.100.000.000,00	17.100.000.000,00	100	17.100.000.000,00
10	Kota Sungai Penuh	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	100	3.900.000.000,00
	Jumlah	83.940.000.000,00	83.940.000.000,00	100	83.940.000.000,00

5.1.3.c Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp1.965.424.800,00 Rp2.060.894.400,00



Belanja Bantuan Kepada Partai Politik merupakan konversi Bantuan Keuangan Partai Politik yang dianggarkan sebesar Rp2.060.894.400,00 dengan realisasi sebesar Rp1.965.424.800,00 atau sebesar 95,37%, turun sebesar Rp95.469.600,00 atau sebesar 4,63% dari realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik TA 2018 sebesar Rp2.060.894.400,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan kepada Partai Politik TA 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik TA 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja Bantuan kepada Partai Politik	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2019
1	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	120.884.400,00	120.884.400,00	100	120.884.400,00
2	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	151.327.200,00	151.327.200,00	100	151.327.200,00
3	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	99.178.800,00	99.178.800,00	100	99.178.800,00
4	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	295.335.600,00	295.335.600,00	100	295.335.600,00
5	Belanja Bantuan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	239.931.600,00	239.931.600,00	100	239.931.600,00
6	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	345.716.400,00	306.729.200,00	88,72	345.716.400,00
7	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	204.775.200,00	204.775.200,00	100	204.775.200,00
8	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	110.637.600,00	110.637.600,00	100	110.637.600,00
9	Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	147.234.000,00	120.362.800,00	81,75	147.234.000,00



10	Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)	72.675.600,00	48.450.400,00	66,67	72.675.600,00
11	Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	273.198.000,00	267.812.000,00	98,03	273.198.000,00
JUMLAH		2.060.894.400,00	1.965.424.800,00	95,37	2.060.894.400,00

5.1.4 Pembiayaan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp669.496.931.346,86 Rp457.071.970.882,36

Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp656.280.817.888,32 dengan realisasi sebesar Rp669.496.931.346,86 atau sebesar 102,01% dan naik sebesar Rp212.424.960.464,50 atau sebesar 46,48% dari realisasi Pembiayaan TA 2018 sebesar Rp457.071.970.882,36.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Jambi terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jambi TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Penerimaan Pembiayaan	671.280.817.888,32	669.496.931.346,86	99,73	457.071.970.882,36
2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		656.280.817.888,32	669.496.931.346,86	102,01	457.071.970.882,36

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
RP669.496.931.346,86 Rp457.071.970.882,36

Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp671.280.817.888,32 dengan realisasi sebesar Rp669.496.931.346,86 atau sebesar 99,73%, naik sebesar Rp214.424.960.464,50 atau sebesar 46,48% dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2018 sebesar Rp457.071.970.882,36.

Penerimaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, apabila anggaran Pendapatan lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran Belanja dan/atau memanfaatkan surplus realisasi APBD tahun sebelumnya guna membiayai Pengeluaran Pembiayaan. Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Jambi TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

N o	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	166.065.027 .960,83	166.065.027 .960,83	100, 00	20.397.348. 923,79
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	32.461.109. 699,00	32.461.109. 699,00	100, 00	0,00
3.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(58.412.000 ,00)	(58.412.000 ,00)	100, 00	57.597.773. 886,57
4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	426.277.222 .996,39	426.277.222 .996,39	100, 00	379.076.848 .072,00
5.	Sisa belanja Dana Transfer	46.535.869. 232,10	46.535.869. 232,10	100, 00	0
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	0	(1.783.886. 541,46)		0
Jumlah		671.280.817 .888,32	669.496.931 .346,86	99,7 3	457.071.970 .882,36

Koreksi Kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya merupakan koreksi Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Akademi Analis Kesehatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp436.504.369,30 yang disimpan pada Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 2801200149 atas nama BLUD Akademi Analis Kesehatan, dan Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Akademi Farmasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.391.062.411,00 yang disimpan pada Bank Jambi dengan Nomor Rekening 0101046273 atas nama BLUD Akademi Farmasi.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Rp0,00Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Pengeluaran Pembiayaan tersebut pada TA 2018 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.



5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp420.323.429.670,45	Rp671.280.817.888,32

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2019 adalah sebesar Rp420.323.429.670,45 yang turun sebesar Rp250.957.388.217,87 atau 37,38% dibandingkan dengan SILPA TA 2018 sebesar Rp671.280.817.888,32.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp420.323.429.670,45	Rp671.280.817.888,32

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Provinsi Jambi TA 2019 adalah sebesar Rp420.323.429.670,45 yang turun sebesar Rp250.957.388.218,87 atau sebesar 37,38% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2018 sebesar Rp671.280.817.888,32. Laporan Perubahan SAL tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, nilai per 1 Januari 2019 sebesar Rp671.280.817.888,32 naik sebesar Rp214.208.847.005,96 atau 46,87% dibanding tahun 2018 sebesar Rp457.071.970.882,36.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2018 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp669.496.931.346,86 naik sebesar Rp212.424.960.464,00 atau 46,48% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp457.071.970.882,36.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA/SIKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2019 sebesar Rp420.323.429.670,45 turun sebesar Rp250.957.388.217,87 atau 37,38% dibanding Tahun 2018 sebesar Rp671.280.817.888,32.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebesar (Rp1.783.886.541,46) turun sebesar (Rp1.783.886.541,46) dibanding Tahun 2018 sebesar Rp0,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir



Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp420.323.429.670,45 turun sebesar Rp250.957.388.217,87 atau 37,38% dibanding Tahun 2018 sebesar Rp671.280.817.888,32.

NERACA

5.3.1. Aset 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp8.941.719.097.774,87 Rp8.495.832.583.828,62

Nilai Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.941.719.097.774,87 naik sebesar Rp445.886.513.946,25 atau 5,25% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.495.832.583.828,62. Aset sebesar Rp8.941.719.097.774,87 ini sudah termasuk Aset yang diperoleh dari Realisasi Belanja Modal BOS Tahun 2019 serta ada penambahan/penyesuaian saldo awal kas BOS 2019 sesuai hasil rekonsiliasi Dinas Pendidikan dengan Satdikmen dan Satdiksus yang dituangkan dalam Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS. Aset perolehan dari belanja Dana BOS yang penganggarannya berada pada Rekening Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Renovasi tersebut telah dapat diklasifikasikan dan direklasifikasikan ke posisi aset yang seharusnya, serta sudah dapat dilakukan perhitungan Beban penyusutan. Aset sebesar Rp8.941.719.097.774,87 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp992.014.627.206,03 Rp995.246.618.335,62

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp992.014.627.206,03 turun sebesar Rp3.231.991.129,59 atau 0,32% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp995.246.618.335,62. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.25 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Kas di Kas Daerah	378.194.499.478,77	634.661.025.171,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.138.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	400.000,00	353.036.515,00
4.	Kas di Bendahara BLUD	23.560.071.446,84	31.793.654.294,32
5.	Kas di Bendahara BOS	18.568.458.744,84	4.468.963.908,00
6.	Kas Lainnya	47.903.981.383,46	45.899.624.074,46
7.	Investasi jangka Pendek	0,00	0,00
8.	Piutang Pajak	53.447.985.462,00	51.991.300,00

9.	Piutang Retribusi	1.327.041.000,00	967.656.500,00
10.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	8.312.047.082,52	2.197.811.204,00
11.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	25.785.183.349,45	38.518.912.463,25
13.	Piutang Lainnya	0,00	7.465.388.000,00
14.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Bagi Hasil Pajak	43.748.924.706,00	
15.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	126.487.625.740,00	
16.	Penyisihan Piutang	(7.248.862.617,34)	(8.500.078.414,81)
17.	Belanja Dibayar di Muka	845.725.257,05	843.812.812,51
18.	Persediaan	271.081.546.172,44	236.520.682.507,89
Jumlah		992.014.627.206,03	995.246.618.335,62

5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp378.194.499.478,77 Rp634.661.025.171,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp378.194.499.478,77 turun sebesar Rp256.466.525.692,23 atau 40,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp634.661.025.171,00. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.26 Rincian Kas di Kas Daerah
(dalam rupiah)

No .	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Kas di Bank Jambi (Giro)	378.194.499.478,77	134.661.025.171,00
2.	Deposito (1 bulan)	0,00	500.000.000.000,00
Jumlah		378.194.499.478,77	634.661.025.171,00

Kas di Bank Jambi (Giro) sebesar Rp378.194.499.478,77 merupakan saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2019 pada rekening giro Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 101431703. Saldo akhir rekening giro Kas Umum Daerah tersebut sebesar Rp426.098.480.862,23, termasuk didalamnya terdapat Kas Lainnya (CaLK nomor 5.1.1.1.f) sebesar Rp47.903.981.383,46. Saldo deposito per 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 karena telah dicairkan seluruhnya.

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp400.000,00 Rp353.036.515,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp400.000,00 berada pada Dinas Satpol PP yang tersimpan pada Bank Jambi Rekening Nomor 3001036547, turun sebesar Rp 352.636.515,00 atau 99,89% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp353.036.515,00.

5.3.1.1.c Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp0,00Rp4.138.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, turun sebesar Rp4.138.000,00 atau 100,00% dibanding dengan saldo tahun 2018 sebesar Rp4.138.000,00.

5.3.1.1.d Kas di Bendahara BLUD
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp23.560.071.446,84 Rp31.793.654.294,32

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp23.560.071.446,84 turun sebesar Rp8.233.582.847,48 atau 25,90% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp31.793.654.294,32. Rincian Kas di Bendahara BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Kas di Bendahara BLUD
(dalam rupiah)

No.	BLUD	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	BLUD Akademi Farmasi	0,00	1.369.810.464,40
2.	BLUD AAK	0,00	428.062.950,70
3.	BLUD Balai Lab Kesehatan	515.062.019,00	410.396.264,00
4.	BLUD RSUD Raden Mattaher	16.767.220.080,84	23.803.670.602,22
5.	BLUD RSJ	6.277.789.347,00	5.781.714.013,00
Jumlah		23.560.071.446,84	31.793.654.294,32

BLUD Balai Laboratorium Kesehatan

Kas di BLUD Balai Laboratorium Kesehatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp515.062.019,00 yang disimpan pada Bank BNI nomor rekening 0163725421 atas nama BLUD Balai Labkes Jambi.

BLUD RSUD Raden Mattaher

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Raden Mattaher per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.767.220.080,84 yang disimpan pada Bank Jambi dengan nomor rekening 101006875 atas nama Bendahara Penerima RSUD Raden Mattaher Jambi.

BLUD RSJ Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSJ Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.277.789.347,00 yang disimpan pada Bank Jambi dengan nomor rekening 0186729097 atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

5.3.1.1.e Kas di Bendahara BOS
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp18.568.458.744,84 Rp4.468.963.908,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.568.458.744,84 naik sebesar Rp14.099.494.836,84 atau 315,50% jika dibanding dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.468.963.908,00. Saldo awal Kas Bos 2019 ini ada penyesuaian penambahan sebesar Rp43.680.238,84 hal setelah dilakukan rekonsiliasi. Rincian saldo kas di bendahara BOS dapat dilihat dalam Lampiran 6.

5.3.1.1.f Kas lainnya 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp47.903.981.383,46 Rp45.899.624.074,46

Saldo Kas Lainnya adalah Kas yang dibatasi penggunaannya. Kas lainnya sebesar Rp47.903.981.383,46 naik sebesar Rp 2.004.357.309,00 atau 4,37% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp45.899.624.074,46 terdiri dari:

Tabel 5.28 Rincian Kas Lainnya
(dalam rupiah)

NO	Pemilik Kas Lainnya	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PT WKS	40.869.889.950,05	39.861.846.218,01	1.008.043.732,04	2,53
2	PT PKP	7.022.291.433,41	6.023.790.446,48	998.500.986,93	16,57
3	Bank Mandiri	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-
4	Pemda Muaro Jambi	-	7.187.409,97	(7.187.409,97)	(100)
5	Yeti Suhartini	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
	Jumlah	47.903.981.383,46	45.899.624.074,46	2.004.357.309,00	4,37

Setoran Ganti Rugi Tegakan dari PT. WKS sebesar Rp35.591.895.904,80 dan jasa gironya sebesar Rp5.277.994.045,25 yang salah setor ke Kas Daerah, seharusnya disetor ke Kas Negara;

Setoran PT. PKP sebesar Rp7.022.291.433,41 (Rp 6.487.293.750,00 serta jasa gironya Rp534.997.683,41) berupa kontribusi kerjasama BOT Jambi Bisnis



Center yang belum dapat diakui sebagai pendapatan karena status objek kerjasama berupa tanah masih dalam sengketa;

Uang Bank Mandiri yang lebih transfer ke kas daerah Rp6.800.000,00 (Rp500.000,00 atas transaksi setoran Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah dari Kantor Penghubung Pemda di Jakarta pada Tahun 2017 (seharusnya Rp500.000,00 terkirim Rp1.000.000,00) sesuai surat dari Bank Mandiri Nomor R04.Br.JCN/41/2019 tanggal 14 Februari 2018) dan tahun 2018 sebesar Rp6.300.000,00.

Uang setoran angsuran pelepasan hak atas tanah a.n. Yeti Suhartini sebesar Rp5.000.000,00 yang sebenarnya proses pelepasan tanah tersebut dihentikan sejak tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi Jambi, dan yang bersangkutan telah diberitahu sebelumnya, untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi tidak mengakui penerimaan tersebut sebagai lain-lain PAD yang sah akan tetapi mengakui sebagai utang lain lain.

5.3.1.1.g Investasi Jangka Pendek 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp0,00Rp0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang berjangka waktu 3 s.d 12 bulan. Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018.

5.3.1.1.h Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp251.859.944.722,63 Rp40.701.681.052,44

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp259.108.807.339,97 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp7.248.862.617,34 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp251.859.944.722,63 naik sebesar Rp211.158.263.670,19 atau 518,79% jika dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp40.701.681.052,44.

Piutang pendapatan disajikan sebesar net realizable value yaitu Rp259.108.807.339,97 setelah dilakukan penyisihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Piutang Pendapatan
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Piutang Pajak PKB dan BBNKB (Dinas Pendapatan)	53.447.985.462,00	51.991.300,00
2.	Piutang Retribusi	1.327.041.000,00	967.656.500,00
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	8.312.047.082,52	2.197.811.204,00

4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	25.785.183.349,45	38.518.912.463,25
5.	Piutang Lainnya	0,00	7.465.388.000,00
6.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Bagi Hasil Pajak	43.748.924.706,00	0,00
7.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	126.487.625.740,00	0,00
6.	Penyisihan Piutang	(7.248.862.617,34)	(8.500.228.414,81)
Jumlah		251.859.944.722,63	40.701.531.052,44

5.3.1.1.h.1. Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp53.395.994.162,00 Rp0,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp53.447.985.462,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp51.991.300,00 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp53.395.994.162,00 naik sebesar Rp53.395.994.162,00 atau 100% dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Piutang Pendapatan pajak ini adalah piutang pajak PKB dan BBNKB pada Badan Keuangan Daerah sejak tahun 2013 yang saat itu masih Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan piutang Pajak rokok sesuai dengan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : S-49/PK.4/2020 TGL 23-4-2020 dan Nomor: S-49/PK.4/2020 TGL 23-4-2020. Dengan rincian piutang pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

N o.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Pajak PKB dan BBNKB Pada Bakeuda :		
a.	PT. MEGA ANUGERAH SARANA	2.342.400,00	2.342.400,00
b.	PT. SUMBER TEHNIK	49.648.900,00	49.648.900,00
	Jumlah Piutang Pajak PKB dan BBNKB	51.991.300,00	51.991.300,00
2.	PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK) SESUAI SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN NO : S-49/PK.4/2020 TGL 23-4-2020	18.220.214.364,00	0,00



N o.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
3.	PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK) SESUAI SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN NO : S-49/PK.4/2020 TGL 23-4-2020	35.175.779.798,00	0,00
4.	Penyisihan Piutang Pajak	(51.991.300,00)	(51.991.300,00)
Jumlah		53.395.994.162,00	0,00

Rincian Piutang pajak daerah per umur piutang dapat dilihat dalam Lampiran 7.

5.3.1.1.h.2. Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp145.884.000,00 Rp19.234.000,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.327.041.000,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp1.181.157.000,00 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp145.884.000,00 naik sebesar Rp126.650.000, atau 658,47% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp19.234.000,00.

Piutang Retribusi dicatat berdasarkan saldo awal piutang saat ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan kebijakan akuntansi penyisihan piutang dengan membuat daftar umur piutang (aging schedule) menurut jenis piutang untuk menilai umur dan penentuan besaran yang akan disisihkan.

Piutang Retribusi terdiri dari piutang Retribusi 2 (dua) SKPD sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.31 Rincian Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Badan Penghubung Daerah	28.700.000,00	31.300.000,00
2.	Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.204.926.000,00	936.356.500,00
3.	Badan Pengelolaan Barang Milik	93.415.000,00	0,00
4.	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.181.157.000,00)	(948.422.500,00)
Jumlah		145.884.000,00	19.234.000,00

Mutasi Piutang Retribusi terdiri atas :

Saldo Akhir Badan Penghubung Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 28.700.000,- dikarenakan ada pembayaran piutang sebesar Rp. 2.600.000,-.

Saldo Akhir Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.204.926.000,- dikarenakan ada mutasi tambah dan pengurangan piutang pada BPMD, termasuk penambahan piutang daerah pada IKABAMA sebesar Rp. 65.000.000,- sesuai dengan review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Penambahan Piutang IKABAMA tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Yayasan Itiad Baik Berlima (IKABAMA) Jambi nomor : 1412/SPP.GUB/Setda.PBMD-2.3/2018 dan Nomor : 02/Y.Ikabama/IV /2018 Tanggal 26 April 2018 Tentang Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi dan Berdasarkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Permasalahan yang terjadi dalam perjanjian sewa tanah antara pihak Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak Yayasan Itikad Baik Berlima (IKABAMA) Jambi.

Terdapat koreksi atas piutang pendapatan retribusi Tahun 2019 yakni penyesuaian atas saldo piutang Retribusi sebesar Rp. 93.415.000,00,-.

Rincian Piutang Retribusi per umur piutang dapat dilihat dalam Lampiran 8.

5.3.1.1.h.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp4.811.130.904,93	Rp900.000.000,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.312.047.082,52. Atas saldo tersebut dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp3.500.916.177,59 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp4.811.130.904,93 naik sebesar Rp3.911.130.904,93 atau 434,57% dari tahun 2018 sebesar Rp900.000.000,00. Rincian saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.32 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan (dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Piutang atas tagihan PD Angso Putih	397.811.204,00	397.811.204,00
2.	Piutang royalti kerja sama BOT Pasar Angso Duo Baru (PT.Era Guna Bumi Nusa)	6.188.957.160,00	1.800.000.000,00
3.	Piutang kerja sama BOT Pembangunan WTC (PT.Simota Putra Parayudha)	1.225.278.718,52	0,00



No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
4.	Piutang kerja sama BOT Hotel & Resort (PT.Jambi Sapta Manunggal Pratama)	500.000.000,00	0,00
5.	Penyisihan Piutang	(3.500.916.177,59)	(1.297.811.204,00)
Jumlah		4.811.130.904,93	900.000.000,00

Piutang atas tagihan PD Angso Putih merupakan tagihan piutang PD Angso Putih yang sudah ditutup sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 dan menjadi Piutang Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33 Rincian Piutang atas tagihan PD Angso Putih (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Suhelmi, SE/KUD semangat 45 Bangko	58.760.255,00	58.760.255,00
2.	Junaidi Nainggolan	126.805.205,00	126.805.205,00
3.	AR Siregar	129.165.416,00	129.165.416,00
4.	Istiono/Bambang Sriyono	83.080.328,00	83.080.328,00
5.	Penyisihan Piutang	(397.811.204,00)	(397.811.204,00)
Jumlah Bersih		0,00	0,00

Piutang Royalti kerja sama BOT per 31 Desember 2019 jumlahnya sebesar Rp 4.811.130.904,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Piutang Kerjasama (BOT) (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	PT Simota Putra Parayuda (kerja sama BOT pembangunan WTC)	1.225.278.718,52	0,00
2.	PT Jambi Sapta Manunggal (kerja sama BOT pembangunan Hotel Tepian Ratu)	500.000.000,00	0,00
3.	PT Eraguna Bumi Nusa (kerja sama BOT pembangunan Pasar Angso Duo)	6.188.957.160,00	1.800.000.000,00



4.	Penyisihan Piutang	(3.103.104.973,59)	(900.000.000,00)
	Jumlah	4.811.130.904,93	900.000.000,00

Untuk Penyisihan Piutang PT. Simotha Putra Parayudha (Kerjasama BOT Pembangunan WTC) dan PT. Jambi Sapta Manunggal (Kerjasama BOT Pembangunan Hotel Tepian Ratu) sesuai dengan buku modul Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah bahwa penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi, penyisihan piutang atas kerjasama tersebut per 31 Desember 2019 dikategorikan “ Kualitas Lancar”, dengan taksiran piutang sebesar 0,5% .

Untuk PT. Eraguna Bumi Nusa (Kerjasama BOT Pembangunan Pasar Angso Duo) sesuai dengan buku modul Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi bahwa penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, Pemerintah Daerah telah melakukan penyisihan piutang atas Royalti kerjasama BOT per 31 Desember 2019 dengan kategori “Kualitas diragukan, dengan taksiran piutang tak tertagih sebesar 50% “ dengan penjelasan bahwa piutang dapat dikategorikan diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagian Kedua tidak dilakukan pelunasan”. Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan per umur piutang dapat dilihat dalam Lampiran 9.

5.3.1.1.h.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp24.121.567.961,95 Rp33.060.747.852,44

Saldo Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.785.183.349,45. Atas saldo tersebut dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp1.663.615.387,50 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp24.121.567.961,95 turun sebesar Rp8.939.179.890,49 atau 27,04% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp33.060.747.852,44, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD	18.779.448.499,25	22.832.419.010,25
2.	Piutang Pendapatan RSJ	3.933.420.616,00	5.075.638.685,00
3.	Piutang Denda PKB dan BBNKB	15.597.390,00	15.597.390,00
4.	Piutang Taspen atas uang Duka Wafat yang belum dibayarkan	0,00	0,00
5.	Piutang Samisake	3.056.716.844,20	10.595.257.378,00
6.	Penyisihan Piutang	(1.663.615.387,50)	(5.458.164.610,81)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	Jumlah	24.121.567. 961,95	33.060.747.8 52,44

Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah terdiri atas :

Saldo Akhir BLUD RSUD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp18.779.448.499,25 dikarenakan ada mutasi tambah piutang sebesar Rp18.374.987.476,00 dan mutasi kurang piutang sebesar Rp22.427.957.987,00

Saldo Akhir BLUD RSJD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp3.933.420.616,00 dikarenakan ada mutasi tambah piutang sebesar Rp2.872.790.147,00 dan mutasi kurang piutang sebesar Rp4.015.008.216,00

Saldo Akhir Piutang Pajak PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp15.597.390,00 tidak terdapat mutasi pada tahun 2019

Saldo Akhir Piutang Samisake Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp3.056.716.844,20 terdiri atas mutasi tambah piutang sebesar Rp1.556.716.844,20 (Samisake Kota Sungai Penuh) dan Mutasi Kurang piutang sebesar Rp9.095.257.378,00 terdiri atas :

pembayaran piutang Samisake Kabupaten Muaro Jambi
Rp4.616.125.533,00

pembayaran piutang Samisake Kabupaten Merangin
Rp2.979.131.845,00

pembayaran piutang Samisake Kabupaten Batanghari
Rp1.500.000.000,00

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per umur piutang dapat dilihat dalam Lampiran 10.

5.3.1.1.h.5 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Pendapatan Transfer -	31 Desember 2019	31
Desember 2018		
Pemerintah Pusat	Rp169.385.367.693,75	
Rp 0,00		

Saldo Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp170.236.550.446,00 atas saldo tersebut dilakukan penyisihan sebesar Rp851.182.752,25 sehingga piutang bersih sebesar Rp169.385.367.693,75 naik sebesar Rp169.385.367.693,75 atau 100% dari tahun 2018 sebesar Rp0,00.

Rincian saldo piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :

Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 43.748.924.706,00,-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 126.487.625.740,00,-
Jumlah	Rp 170.236.550.446,00,-

Tabel 5.36 Rincian Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Dana Bagi Hasil Pajak
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1	PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.20/2020	17.181.533. 961,00	-
	DANA BAGI HASIL PAJAK		
	1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	16.456.214. 223,00	-
	DBH - BAG. DAERAH	15.654.325. 896,00	-
	BP-PBB	801.888.327 ,00	-
	2. PPH	665.685.422 ,00	-
	PPH PS.21	-	-
	PPH.PASAL 25/29	665.685.422 ,00	-
	3. CUKAI TEMBAKAU	59.634.316, 00	-
2.	PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.36/2020	26.567.390. 745,00	-
	DANA BAGI HASIL PAJAK		
	1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	15.490.153. 065,00	-
	DBH - BAG. DAERAH	14.691.019. 230,00	-
	BP-PBB	799.133.835 ,00	-
	2. PPH	11.077.237. 680,00	-
	PPH PS.21	9.443.248.4 73,00	-

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	PPH.PASAL 25/29	1.633.989.207,00	-
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL PAJAK	43.748.924.706,00	-
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(218.744.623,53)	-
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL PAJAK NETTO	43.530.180.082,47	-

Rincian Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada Lampiran 11.

Tabel 5.37 Rincian Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	106.540.736.340,00	-
	SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.20/2020		
	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK		
	1. SUMBER DAYA ALAM	1.832.154.545,00	-
	DR	-	-
	IIUPH	-	-
	PSDH	1.832.154.545,00	-
	2. MIGAS	90.539.241.807,00	-



No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	GAS BUMI	68.503.482.331, 00	-
	MINYAK BUMI	22.035.759.476, 00	-
	3. MINERBA	14.169.339.988, 00	-
	LANDRENT	13.706.829,00	-
	ROYALTI	14.155.633.159, 00	-
2.	PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.36/2020	19.946.889.400, 00	-
	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK		
	1. SUMBER DAYA ALAM	848.859.274,00	-
	DR	-	-
	IIUPH	-	-
	PSDH	848.859.274,00	-
	2. MIGAS	15.529.084.192, 00	-
	GAS BUMI	2.656.672.616,0 0	
	MINYAK BUMI	12.872.411.576, 00	-
	3. MINERBA	3.568.945.934,0 0	-
	LANDRENT	182.563.110,00	-



No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	ROYALTI	3.386.382.824,00	-
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL BUKAN PAJAK	126.487.625.740,00	-
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(632.438.128,72)	-
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL BUKAN PAJAK NETTO	125.855.187.611,28	-

Rincian Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per umur piutang dapat dilihat dalam Lampiran 12.

5.3.1.1.i Piutang Lainnya 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp 0,00 Rp6.721.699.200,00

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar 0,00 atas saldo tersebut dilakukan penyisihan sebesar Rp0,00 sehingga piutang bersih sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp6.721.699.200,00 atau 100% dari tahun 2018 Rp6.721.699.200,00. Penurunan 100% ini dikarenakan Piutang tahun 2018 sudah diterima pembayarannya dan tahun 2019 tidak ada lagi piutang yang sejenis ini. Rincian saldo piutang Lainnya yaitu:

Tabel 5.38 Rincian Piutang Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Piutang Pengembalian Bantuan Keuangan Kabupaten Kerinci	0,00	7.435.388.000,00
2.	Dinas Perhubungan	0,00	30.000.000,00
3.	Penyisihan Piutang	0,00	(743.688.800,00)
Jumlah		0,00	6.721.699.200,00



5.3.1.1.j Beban Dibayar di Muka 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp845.725.257,05 Rp843.812.812,51

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp845.725.257,05 naik sebesar Rp1.912.444,54 atau 0,23% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp843.812.812,51 terdiri dari biaya asuransi yang belum jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Beban Dibayar Dimuka
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Asuransi di Sekretariat Daerah	320.749.408,25	389.495.493,20
2.	Asuransi di Dinas PU	325.679.943,24	259.203.526,93
5.	Dinas Satpol PP dan Damkar	8.218.997,00	10.678.327,23
6.	Badan Penghubung	170.179.797,94	170.200.017,89
7.	Dinas koperasi dan UKM	10.281.535,00	7.778.874,38
8.	Dinas ESDM	10.615.575,62	6.456.572,88
Jumlah		845.725.257,05	843.812.812,51

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 13.

5.3.1.1.k Persediaan 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp271.081.546.172,44 Rp236.520.682.507,89

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp271.081.546.172,44 naik sebesar Rp34.560.863.664,55 atau 14,61% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp236.520.682.507,89.

Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.40 Rincian Persediaan per Jenis
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Alat Tulis Kantor	968.526.236,04	1.354.441.068,33
2.	Obat-Obatan	15.676.450.708,12	16.818.057.014,32
3.	Bahan Kebersihan	659.552.954,71	345.043.177,06

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
4.	Bahan Makanan	1.487.769.134,13	1.350.600.748,38
5.	Bibit	1.229.080.620,00	1.812.205.960,00
6.	Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga	249.881.718.341,00	213.464.763.734,53
7.	Bahan Kimia	362.602.745,00	539.112.687,00
8.	Pupuk	27.885.000,00	83.600.000,00
9.	Alat Bengkel	0,00	5.480.000,00
10.	Bahan Bangunan	0,00	137.844.110,00
11.	Sandang/Pakaian	357.598.479,25	322.953.829,74
12.	Alat Kesehatan	194.640.104,19	140.340.688,53
13.	Bahan Listrik	235.721.850,00	146.239.490,00
Jumlah		271.081.546.172,44	236.520.682.507,89

Rincian saldo Persediaan per OPD dan per jenis persediaan dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Rincian Persediaan Aset Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga dapat dilihat pada Lampiran 15.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2019 31 Desember 2018
 Rp427.714.586.557,76 Rp386.387.041.199,31

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp427.714.586.557,76 naik sebesar Rp41.327.545.358,45 atau 10,70% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp386.387.041.199,31. Rincian saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.41 Rincian Investasi Jangka Panjang
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Investasi Nonpermanen	17.393.086.145,60	17.348.983.569,62
	Penyisihan KUPEM tak tertagih	(5.034.303.010,98)	(5.151.916.263,98)
	Jumlah Investasi Nonpermanen	12.358.783.134,62	12.197.067.305,64
2.	Investasi Permanen	415.355.803.423,14	374.189.973.893,67

Jumlah	427.714.586.557,76	386.387.041.199,31
--------	--------------------	--------------------

5.3.1.2.a Investasi Nonpermanen 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp12.358.783.134,62 Rp12.197.067.305,64

Saldo Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.358.783.134,62 naik sebesar Rp161.715.828,98 atau 1,33% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp12.197.067.305,64. Saldo Investasi Non permanen ini berupa saldo Investasi Non Permanen Lainnya yang terdiri dari Dana KUPEM dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya
(dalam rupiah)

N o.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Dana KUPEM	17.393.086.145,60	17.348.983.569,62
	Penyisihan Dana KUPEM tidak tertagih	(5.034.303.010,98)	(5.151.916.263,98)
	Jumlah Bersih Dana KUPEM	12.358.783.134,62	12.197.067.305,64

Saldo dana KUPEM per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.358.783.134,62 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43 Rincian Saldo KUPEM
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	KUPEM Pola Channeling (Tunggakan)	3.713.550.568,67	3.830.085.821,67
2.	Saldo Rekening KUPEM yang berada di Kab/Kota	10.293.293.525,90	10.132.077.696,92
3.	Saldo Giro Beku	2.065.489.608,72	2.064.989.608,72
4.	Tunggakan KUPEM Executting	1.246.138.381,31	1.246.638.881,31
5.	Tunggakan KUPEM Chanelling (pensertifikatan tanah)	74.614.061,00	75.191.561,00



No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	Jumlah Dana KUPEM	17.393.086.145,6	17.348.983.569,62
1.	penyisihan KUPEM channelling tak tertagih	(3.713.550.568,67)	(3.830.085.821,67)
2.	penyisihan KUPEM executing tak tertagih	(1.246.138.381,31)	(1.246.638.881,31)
3.	penyisihan KUPEM Pensertifikatan Tanah tak tertagih	(74.614.061,00)	(75.191.561,00)
	Jumlah Penyisihan KUPEM tidak tertagih	(5.034.303.010,98)	(5.151.916.263,98)
	Jumlah Nilai Bersih setelah (penyisihan)	12.358.783.134,62	12.197.067.305,64

KUPEM adalah kredit usaha dan investasi pengembangan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disalurkan melalui Bank Jambi kepada petani hortikultura, petani ikan, pedagang/pengumpul pemasaran duku dan industri kecil, dalam rangka pembiayaan usaha tani dan usaha industri kecil.

Terdapat dua pola pelaksanaan program KUPEM yaitu pola Executing yang dilaksanakan sejak tahun 2001 s.d. tahun 2004 dan pola Channeling yang dilaksanakan sejak tahun 2005. Perbedaan kedua pola tersebut adalah pada tanggung jawab penyaluran, pengelolaan dan pengawasan kredit, dimana pada pola Executing semua tanggung jawab tersebut ada pada Bank Jambi, dan pada pola Channeling tanggung jawab tersebut ada pada Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk pelaksanaan KUPEM dengan pola Channeling dan Executing tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Saldo Dana KUPEM per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.358.783.134,62 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pola Channeling, nilai bersih setelah penyisihan KUPEM pola channeling adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 KUPEM Pola Channeling (Tunggakan)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tunggakan kupem Chanelling Modal kerja per 31 Desember 2019	3.713.550.568,67
2.	Akumulasi penyisihan per 31 Desember 2019	(3.713.550.568,67)
	Jumlah nilai bersih disajikan	0,00

Saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 sama dengan tahun 2018 sebesar Rp0,00. Saldo sebesar Rp0,00 sudah dilakukan perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 (rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada Lampiran 16.



Tabel 5.45 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir KUPEM Chanelling
Modal kerja
(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Saldo Tunggakan 2019	Penyisihan per 31 Desember 2019	Jumlah (NRV)
1.	Kota Jambi	141.251.674,00	141.251.674,00	-
2.	Kabupaten Batang Hari	257.042.660,00	257.042.660,00	-
3.	Kabupaten Muaro Jambi	442.026.130,67	442.026.130,67	-
4.	Kabupaten Kerinci	303.844.736,00	303.844.736,00	-
5.	Kabupaten Merangin	428.311.666,00	428.311.666,00	-
6.	Kabupaten Sarolangun	515.710.890,00	515.710.890,00	-
7.	Kabupaten Bungo	271.934.467,00	271.934.467,00	-
8.	Kabupaten Tebo	233.292.331,00	233.292.331,00	-
9.	Kabupaten Tanjab Barat	240.034.955,00	240.034.955,00	-
10.	Kabupaten Tanjab Timur	880.101.059,00	880.101.059,00	-
Jumlah		3.713.550.568,67	3.713.550.568,67	-

Saldo dana KUPEM Channeling yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota sebesar Rp10.293.293.525,90.

Saldo dana KUPEM Channeling yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.293.293.525,90 naik sebesar Rp 161.215.828,98 atau 1,59% dibandingkan dengan saldo tahun 2018 sebesar Rp10.132.077.696,92. Saldo sebesar Rp10.293.293.525,90 tersebut terdapat pada Bank Jambi di kabupaten dan kota dengan rincian pada Lampiran 17.

Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.065.489.608,72, naik sebesar Rp500.000,00 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.064.989.608,72. Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku sebesar Rp2.065.489.608,72 merupakan saldo rekening KUPEM di Rekening Giro Beku pada Bank Jambi rekening nomor 0101010546.

Saldo bersih Dana KUPEM Executting per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, sama dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp0,00. Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100%.

Saldo bersih Dana KUPEM Executting pensertifikatan tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, sama dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp0,00. Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100%.

5.3.1.2.b Investasi Permanen 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp415.355.803.423,14 Rp374.189.973.893,67

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp415.355.803.423,14 naik sebesar Rp41.165.829.529,47 atau 11,00% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp374.189.973.893,67 merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi pada Bank Jambi, PT JII dan PT Askrida dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.46 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi (dalam rupiah)

N o.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Bank Jambi	413.040.917.925,76	371.443.091.788,27
2.	PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII)	1.124.885.497,38	1.556.882.105,40
3.	PT Asuransi ASKRIDA	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00
Jumlah		415.355.803.423,14	374.189.973.893,67

Hal-hal yang berkaitan dengan Investasi Permanen sebagai berikut:
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di Bank Jambi sebesar Rp173.364.000.000,00 yang terdiri dari modal dasar 173.364 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham. Jumlah seluruh saham yang dimiliki Bank Jambi adalah Rp681.778.000.000,00. Persentasi kepemilikan saham sebesar 23,24%. Berdasarkan kepemilikan saham yang lebih dari 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan maka pencatatan atas investasi menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Provinsi Jambi menjadi Rp413.040.917.925,76.

Tabel 5.47 Rincian Ekuitas Bank Jambi (dalam rupiah)

No.	Ekuitas Bank Jambi	per 31 Desember 2019	per 31 Desember 2018
1.	Modal saham	746.133.000.000,00	719.469.000.000,00
2.	modal donasi	-	-
3.	Tambahan Modal Disetor	2.590.969.736,00	12.255.024.736,00
4.	Saldo Laba di tahan yang telah ditentukan Penggunaannya	633.836.424.637,00	491.596.803.741,00

No.	Ekuitas Bank Jambi	per 31 Desember 2019	per 31 Desember 2018
5.	Saldo Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya	255.501.301.826,00	260.226.163.366,00
6.	Keuntungan (Kerugian) surat berharga tersedia untuk dijual	516.039.516,00	(16.867.490.963,00)
7.	Keuntungan (Kerugian) atas liabilitas Imbalan Pasca kerja	(14.236.979.032,00)	(5.927.970.959,00)
	TOTAL EKUITAS	1.624.340.756.683,00	1.460.751.529.921,00

Sumber dari Laporan Posisi Keuangan Bank Jambi Per 31 Desember 2019 (audited)

Nilai Investasi di Bank Jambi dengan Metode Ekuitas adalah

$\text{Rp}173.364.000.000,00 / \text{Rp}681.778.000.000,00 \times \text{Rp}1.624.340.756.683,00 = 413.040.917.925,76$.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII) sebesar Rp13.787.500.000,00. Persentasi saham sebesar 99,55%.

Berdasarkan presentasi kepemilikan saham yang lebih dari 20% maka pencatatan atas investasi menggunakan metode Ekuitas, sehingga nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Jambi di PT JII menjadi Rp1.124.885.497,38 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Penyertaan Modal di PT JII (dalam rupiah)

No.	Ekuitas PT JII	per 31 Desember 2019	per 31 Desember 2018
1.	Modal Saham Pemprov. Jambi	13.787.500.000,00	13.787.500.000,00
2.	Modal saham Afrizal	62.500.000,00	62.500.000,00
	Jumlah Saham	13.850.000.000,00	13.850.000.000,00
3.	Laba (Rugi) Tahun Lalu	(12.286.060.405,45)	(12.051.678.787,85)
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(433.954.888,21)	(231.291.627,60)
5	Lab (rugi) tahun 2019 kurang saji dikarenakan sampai dengan Pemeriksaan beakhir belum didapat Laporan Keuangan PT JII Audited.	0,00	(3.089.990,00)
	TOTAL EKUITAS	1.129.984.706,34	1.563.939.594,55

Sumber dari Laporan Keuangan PT. JII per 31 Desember 2019 (unaudited)



Nilai Investasi di PT. JII dengan Metode Ekuitas adalah
 $\text{Rp}13.787.500.000,00 / \text{Rp}13.850.000.000,00 \times \text{Rp}1.129.984.706,34 = \text{Rp}1.124.885.497,38.$

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT. ASKRIDA per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.190.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan modal. Persentasi kepemilikan saham sebesar 0,60%. Berdasarkan persentase kepemilikan saham yang kurang dari 20% maka pencatatan atas investasi menggunakan metode biaya (Cost Method) yaitu berdasarkan nilai penyertaan modal sebesar Rp1.190.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap 31 Desember 2019 31 Desember 2018
 Rp6.524.037.916.802,94 Rp6.138.019.136.778,04

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.524.037.916.802,94 naik sebesar Rp386.018.780.024,90 atau 6,29% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.138.019.136.778,04. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Aset Tetap
 (dalam rupiah)

N o.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Tanah	785.181.775.721,80	782.603.827.388,47
2.	Peralatan dan Mesin	1.513.917.191.769,31	1.276.370.389.402,12
3.	Gedung dan Bangunan	1.575.338.632.494,39	1.422.186.530.462,79
4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	7.333.105.832.486,33	6.953.653.854.201,34
5.	Aset Tetap Lainnya	502.637.720.745,30	458.019.324.660,14
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	110.279.947.679,01	60.307.829.961,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(5.296.423.184.093,20)	(4.815.122.619.297,82)
Jumlah		6.524.037.916.802,94	6.138.019.136.778,04

5.3.1.3.a Tanah 31 Desember 2019 31 Desember 2018
 Rp785.181.775.721,80 Rp782.603.827.388,47

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp785.181.775.721,80, naik sebesar Rp2.577.948.333,33 atau 0,33% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp782.603.827.388,47. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah tahun 2019 sebagai berikut:



Saldo Tahun 2018	Rp	782.603.827.388,47
Mutasi Tambah	Rp	9.934.628.480,00
Mutasi Kurang	Rp	(7.356.680.146,67)
Jumlah Rp		785.181.775.721,80

Nilai Aset Tetap Tanah diatas belum termasuk dua bidang tanah di pulau berhala dengan luas 3.692 M2, Hak pakai nomor HM No 343 Thn 2001 (Hasyimmahidan) di Desa Dabo Pulau Berhala dan tanah dengan luas 5.336 M2, Hak pakai nomor HM No 345 Thn 2001 (Zainal Arifin) di Desa Dabo Pulau Berhala, yang mana kedua bidang tanah tersebut belum tercatat (belum ada Nilai Perolehan).

Mutasi tambah sebesar Rp9.934.628.480,00 terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.983.673.286,00;

Mutasi tambah pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp4.950.955.194,00 yang merupakan Hibah Tanah SMA, SMK dan SLB dari Kabupaten Merangin dengan BAST Nomor 100112/BAST/BPKAD-ASET/2019 tanggal 6 Desember 2019.

Mutasi Kurang sebesar Rp7.356.680.146,67 terdiri dari:

Reklasifikasi kurang ke Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) sebesar Rp893.607.081,67 pada Dinas Pekerjaan Umum.

Mutasi kurang sebesar Rp283.085.743,00 pada Dinas Perhubungan yang dihibahkan pada Kementerian Perhubungan RI dengan BAST Nomor 028/1320A/SETDA.PBMD-3.1/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018.

Mutasi kurang karena Hibah pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp6.179.987.322,00 dengan rincian sebagai berikut:

Hibah tanah Kepada Kementerian Perhubungan RI sebesar Rp414.400.000,00 BAST Nomor 028/1320A/SETDA.PBMD-3.1/XII/2018.

Hibah tanah kepada Polda Jambi sebesar Rp2.117.220.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 3621/BAST/SETDA.PBMD-3.2/2018

Hibah tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp18.000.000,00 BAST Nomor 1528/BAST/SETDA.PBMD-3.2/2019.

Hibah tanah kepada RRI Jambi sebesar Rp3.316.127.322,00 BAST Nomor 3444/BAST/SETDA.PBMD-3.2/2018.

Hibah tanah kepada BPS sebesar Rp314.240.000,00 BAST Nomor 3446/BAST/SETDA.PBMD-3.2/2018.

Adapun Daftar Aset Tetap Tanah per OPD dapat dilihat pada Lampiran 18 Beberapa permasalahan tanah yang masih perlu penyelesaian lebih lanjut adalah:

Terdapat bangunan-bangunan permanen dan kios-kios milik masyarakat yang berada di atas tanah seluas 9.626 m2 terletak di Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura dengan sertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu sertifikat HP Nomor 40 Tahun 1972 seluas 1.100.923 m2 terletak di Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura, juga sebagian dikuasai oleh masyarakat.

Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Penertiban dan Penyelesaian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 413/KEP.GUB/SETDA. BPAKD.3.2/2013 tanggal 11 Juni 2013.



Tim telah melakukan:

Melakukan pendataan aset Tanah yang dikuasai oleh masyarakat, tumpang tindih, terutama Tanah HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 1972 yang sudah diganti dengan HP Nomor 8 Tahun 2010;

Menyiapkan action plan untuk langkah-langkah konkrit;

Menyurati pihak BPN untuk mendapat penjelasan tentang riwayat dan risalah Tanah yang bermasalah/dikuasai masyarakat atau tumpang tindih mengenai kepemilikan;

Membentuk Tim Kecil untuk melakukan Inventarisasi terhadap HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 2010 dengan melibatkan Pihak Pemerintah Provinsi Jambi, Camat, Lurah, RT dan masyarakat untuk melakukan inventarisasi, investigasi, pengukuran dilapangan dan melaksanakan negosiasi dengan masyarakat. Terhadap tanah dalam penguasaan masyarakat, penyelesaiannya diusahakan dengan musyawarah/mediasi untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila tidak ada kesepakatan akan diselesaikan secara hukum dan telah diserahkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk penyelesaian lebih lanjut;

Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi agar dapat mengeluarkan hasil inventarisasi/pengukuran yang telah dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Nomor 31/03-15.71/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014, perihal permohonan mengeluarkan hasil inventarisasi dilapangan. Pihak BPN Kota Jambi telah mengeluarkan hasil inventarisasi dan menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Jambi melalui Surat Nomor : 82/03-15.71/II/2014 perihal Permohonan Penjelasan Data dan Luas Tanah dan dilampiri dengan peta dan data lengkap yang nantinya akan dijadikan bahan oleh Biro Hukum untuk penyelesaian selanjutnya;

Dalam pengamanan Aset Tanah tersebut telah dilakukan pemasangan papan merk pada lokasi HP Nomor 40 Tahun 1972 dan Tanah HP Nomor 8 Tahun 2010.

Untuk tanah seluas 116.439 M2 dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972, sebagian dari luas tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah Drs. Zulkifli Nurdin seluas 20.878 M2 dan pada tahun 2017 mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 13/G/2017/PTUN.JBI tanggal 4 Desember 2017 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Mei 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 13/G/2017/PTUN.JBI.

Upaya Penyelesaian:

Untuk penghapusan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi seluas 20.878 M2 sebagian dari sertifikat HP Nomor 40 Tahun 1972 dimaksud, saat ini masih dalam proses pada Pemprov Jambi (Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk tanah HP Nomor 8 Tahun 2010 telah dilakukan pendataan nama pemakai/pemilik kios-kios/toko yang berdiri di atas tanah tersebut sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 593/31/SETDA.PBMD-2.2/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang mohon bantuan data pedagang, dan sesuai dengan surat Ketua RT 18 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi



tanggal 25 Februari 2019 tentang Penyampaian data warga. Selanjutnya akan diberlakukan dengan sewa pakai, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Upaya Penyelesaian:

Kesepakatan bersama antara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan Kejaksaan Tinggi Jambi tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara, Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor 250/SKU/SETDA.HKM-2.2/I/2020.

Tanah seluas 45.710 m² terletak di Kelurahan Pematang Sulur dengan Sertifikat HP Nomor 5 Tahun 1970 diantaranya seluas 19.668 m² digunakan untuk Cadika/Gedung Pramuka dan sisanya sebanyak 13 bidang tanah dikuasai oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengamanan melalui pemasangan papan nama sejak tahun 2013.

Upaya Penyelesaian:

Inventarisasi dan pengumpulan data untuk dilimpahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Tanah seluas 72.660 m² terletak di Kelurahan Simpang IV Sipin dengan Sertifikat HP Nomor 6 Tahun 1987 digunakan untuk Kompleks Perumahan DPRD Tingkat I dan Perumahan Pegawai Golongan III sebanyak 13 rumah, sedangkan sisanya merupakan tanah kosong yang ditempat oleh 5 kepala keluarga sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 180/SETDA.PBMD-2.2/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 hal penyampaian data nama yang menempati tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987, untuk penyelesaian lebih lanjut.

Upaya Penyelesaian:

Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Nomor SKK: 249/SETDA.HKM-2.2/I/2020

Tanah seluas 264.320 m² terletak di Kelurahan Pematang Sulur dengan Sertifikat HP Nomor 58 Tahun 1989 digunakan untuk lapangan golf, tanah kosong dan sebagian dikuasai oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan terhadap tanah dimaksud diatas yaitu telah dilakukan pengamanan dengan cara pemasangan papan nama pada tahun 2013002C selanjutnya secara bertahap akan diselesaikan apabila penyelesaian tanah HP Nomor 8 tahun 2010 dan HP Nomor 40 tahun 1972 tuntas.

Upaya Penyelesaian:

Inventarisasi dan pengumpulan data dilimpahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Nomor SKK: 250/SETDA.HKM-2.2/I/2020

5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp1.513.917.191.769,31	

Rp1.276.370.389.402,12

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.513.917.191.769,31 naik sebesar Rp237.546.802.367,19 atau 18,61% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.276.370.389.402,12. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	1.276.370.389.402,12
------------------	----	----------------------

Mutasi Tambah	Rp	267.322.841.142,38
Mutasi Kurang	Rp	(29.776.038.775,19)
Jumlah Nilai perolehan	Rp	1.513.917.191.769,31

Mutasi tambah sebesar Rp267.322.841.142,38 terdiri dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp138.708.396.761,46 tersebar pada 36 OPD yang dirinci pada Lampiran 19.

Reklasifikasi dari aset selain peralatan dan mesin sebesar Rp71.826.603.404,93 terdiri dari:

1)	Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	
-	Dinas Perhubungan	3.495.131.800,00
-	Dinas Pendidikan	5.156.450.970,00
	Jumlah (1)	8.651.582.770,00
2)	Reklasifikasi dari Aset Jalan Jaringan Irigasi	
-	Dinas Perhubungan	47.647.910.423,62
-	Biro PBMD	1.500.000,00
	Jumlah (2)	47.649.410.423,62
3)	Reklasifikasi Dari Aset Tetap Lainnya	
-	Biro PBMD	25.000.000,00
-	Dinas Pendidikan	15.500.610.211,31
	Jumlah (3)	15.525.610.211,31
	Jumlah (1+2+3)	71.826.603.404,93

Hibah sebesar Rp53.598.005.182,00 terdiri dari :

1)	Hibah dari KKP ke Dinas Kelautan dan Perikanan (BAST Nomor 23388/PSDKP.0.4.2/PL.930/XI/2018, Nomor B.13533/DJPT/PL.430.D1/X/2018 dan Nomor 4462/DJPB/PL.930.S1/V/2019)	1.461.337.886,00
2)	Hibah dari Kemenkes RI ke Rumah Sakit Jiwa (BAST Nomor KN.02.07/1/3600/2018 dan Nomor KN.02.07/1/3602/2018)	14.810.297.500,00
3)	Hibah dari Perpustakaan Nasional ke Dinas Perpustakaan dan Arsip (BAST Nomor 3587/4.1/PLK.03.05/IX.2019)	57.800.000,00
4)	Hibah dari BNPB ke BPBD (BAST Nomor 028/2342/SJ, BA.56/BNPB/04/2019, PRJ.04/BNPB/11/2018, BA.995/BNP/11/2018)	4.977.992.000,00
5)	Hibah dari Kementerian Pertanian ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (BAST Nomor 69/PL.130/BMN/B/04/2019, 70/PL.130/BMN/B/04/2019, 75/PL.130/BMN/B/04/2019)	26.334.360.576,00
6)	Hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan RI ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.792.656.320,00



	(BAST Nomor B.73/Naker-SJ/II/2019, B.320/Naker-SJ/IV/ 2019, B.104/Naker- SJ/III/2019, BA.1286/SETPHIJSK/XII/2018)	
7)	Hibah dari Kementerian Perhubungan ke Dinas Perhubungan (BAST Nomor BA.313/PL.301/DRJD/2019)	3.537.000.000,00
8)	Hibah dari Badan Restorasi Gambut ke Dinas Kehutanan (BAST-1681/DISHUT-TP/XII/2018)	626.560.900,00
	JUMLAH	Rp53.598.005.182,0 0

Penambahan Aset Peralatan dan mesin yang diperoleh dari hutang (belum dibayarkan) pada BPSDM sebesar Rp98.997.120,00, pada RSUD sebesar Rp991.258.436,40 dan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp73.400.000,00. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada Dinas Perkebunan sebesar Rp123.900,00, Dinas Ketahanan Pangan Rp50.248.000,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp199.589.499,89, Biro PBMD sebesar Rp111.810.500,00 dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura sebesar Rp627.493.000,00.

Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin yang diperoleh dari mutasi yang belum tercatat tahun lalu terdapat pada: Dinas Perkebunan sebesar Rp39.997.500,00, Dinas Kehutanan sebesar Rp529.654.600,00, Dinas ESDM sebesar Rp170.993.237,70 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp284.350.000,00.

Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin pada Biro PBMD yang diperoleh dari pencatatan kembali aset 2018 yang sudah dikeluarkan tahun 2018 sebagai ekstrakomptable sementara aset tersebut dimutasikan ke biro-biro dan baru dicatat tahun 2019 sebesar Rp11.920.000,00.

Mutasi kurang sebesar Rp29.776.038.775,19 terdiri dari:

Reklasifikasi ke Aset selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.169.386.670,02 sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi Ke Aset Gedung dan Bangunan
 - Badan Penghubung Daerah 16.600.000,00
 - Jumlah (1) 16.600.000,00
- 2) Reklasifikasi Ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Dinas Kesehatan 64.858.750,00
 - Dinas Kominfo 174.500.000,00
 - Jumlah (2) 239.358.750,00
- 3) Reklasifikasi Ke Aset Tetap lainnya
 - Set DPRD 24.310.000,00
 - Jumlah (3) 24.310.000,00
- 4) Reklasifikasi Ke Aset Lainnya

- Dinas Sosial Dukcapil	17.401.700,00
- Dinas PUPR	14.425.000,00
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	5.300.000,00
- Badan Keuangan Daerah	2.136.799.059,75
- Biro Umum	3.389.696.038,27
- Biro PBMD	1.963.166.004,00
- Badan Hukum	185.989.000,00
- Dinas Kominfo	48.175.000,00
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP	34.300.000,00
- Set. DPRD	1.483.875.843,00
- Balitbangda	12.425.000,00
- Dinas Kehutanan	538.400.000,00
- Dinas Ketahanan Pangan	46.000.000,00
Dinas Koperasi dan UMKM	13.165.275,00
Jumlah (4)	9.889.117.920,02
JUMLAH (1+2+3+4)	Rp10.169.386.670,02

Pengurangan atas barang yang nilai satuannya dibawah kapitalisasi sebesar Rp14.555.921.664,17 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut:

1) Dinas Sosial Dukcapil	16.935.000,00
2) Dinas Perkebunan	18.000.550,00
3) Dinas Kelautan dan Perikanan	95.834.636,00
4) RSUD	658.003.654,10
5) Dinas Koperasi	3.650.000,00
6) Dinas Kesehatan	70.939.099,00
7) Dinas Perindag	9.100.000,00
8) RSJD	85.377.533,00
9) Dinas PUPR	92.188.280,00
10) Dinas Perhubungan	79.475.000,00
11) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura	51.960.400,00
12) Badan Penghubung	7.992.000,00
13) Badan Keuangan Daerah	179.443.045,00
14) Biro Pemerintahan	1.000.000,00
15) Biro Kesramas	1.980.000,00
16) Biro Perekonomian	2.000.000,00
17) Biro Humas	5.940.000,00
18) Biro PBMD	14.800.000,00
19) Biro Organisasi	1.000.000,00
20) Dinas Pemberdayaan Peempuan	3.106.700,00
21) Dinas Kominfo	20.995.000,00
22) Dinas Penanaman Modal dan PTSP	24.100.000,00
23) Badan Kepegawaian Daerah	14.095.550,00



24)	Balitbangda	10.780.000,00
25)	Inspektorat	29.092.600,00
26)	Dinas Kehutanan	19.595.200,00
27)	Dinas Nakertrans	247.421.490,00
28)	Set DPRD	7.450.000,00
29)	BPSDM	14.949.000,00
30)	Dinas Pendidikan	12.738.308.927,04
31)	Biro Umum	30.408.000,03
	JUMLAH	Rp14.555.921.664,17

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp193.800.000,00 terdapat pada Dinas ESDM (SK Penghapusan Nomor 1184/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018 dan Nomor 764/KEP.GUB /SETDA.PBMD-3.2/2018)

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena penjualan Aset peralatan dan Mesin sebesar Rp791.547.500,00

1	Dinas Perindustian dan Perdagangan (SK Penghapusan Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	Rp65.300.000,00
2	Badan Kesbangpol (SK Penghapusan Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	Rp398.660.000,00
3	Biro Umum (SK Penghapusan Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	Rp125.000.000,00
4	Bappeda (SK Penghapusan Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	Rp202.587.500,00
	Jumlah	Rp791.547.500,00

Pengurangan aset Akibat Koreksi Nilai Pencatatan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp13.683.500,00.

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan karena Hibah ke Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.580.262.716,00 BAST Nomor 028/1320A/SETDA.PBMD-3.1/XII/2018.

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin pada RSUD Rd. Mattaher yang mana aset tersebut telah tercatat pada tahun lalu sebesar Rp1.283.814.795,00.

Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin pada RSUD Rd. Mattaher karena Double Pembayaran sebesar Rp1.680.000,00.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin yang ternyata merupakan belanja barang dan jasa pada RSUD Rd. Mattaher sebesar Rp181.081.930,00.



Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin karena menjadi temuan pemeriksa tahun 2018 pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp4.860.000,00.

Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin per OPD dapat dilihat pada Lampiran 20.

Beberapa permasalahan terkait peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Terdapat kendaraan dinas roda dua sebanyak 43 unit sebesar Rp360.528.194,30 yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum.

Terdapat Kendaraan Dinas Roda Dua Sebanyak 23 Unit dan Kendaraan Roda Empat Sebanyak 6 Unit Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD (dalam rupiah)

No	Nama OPD/Biro	Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tidak Dicatat	Hasil Konfirmasi Perkiraan Harga Kendaraan ke Samsat Kota Jambi		
			Jumlah Kendaraan Diketahui Perkiraan Harganya		Jumlah Kendaraan Tidak Diketahui Perkiraan Harganya
			Roda empat	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3-4)
A.	Kendaraan Roda Dua				
1.	Biro Umum	22	0	0	22
2.	Dinas Pekerjaan Umum	1	-	-	1
	Sub Jumlah	23	0	0	23
B	Kendaraan Roda Empat				
1.	Biro Umum	6	6		0
	Jumlah	29	6	0	23

Terdapat permasalahan terkait peminjaman kendaraan sebagai berikut:

Terdapat 26 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp4.915.607.777,55 yang dimanfaatkan oleh pihak lain telah kadaluarsa waktu perjanjian pinjam pakainya karena telah melebihi dua tahun dan sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp1.642.750.680,87 dimanfaatkan pihak lain tanpa didukung dengan dokumen pinjam pakai.

Sebanyak 3 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp41.468.238,00 digunakan oleh PNS yang telah pensiun sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Kendaraan Digunakan oleh PNS yang Telah Pensiun (dalam rupiah)

No.	Nama OPD/Biro	Kendaraan Roda 2		Kendaraan Roda 4	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai

		(buah)	(Rp)	(buah)	(Rp)
1.	Bappeda	1	6.200.000,00		-
2.	Dinas Kesehatan	1	4.500.000,00		-
3.	BPBMD	-	-	1	30.768.238,00
Jumlah		2	10.700.000,00	1	30.768.238,00

Terdapat Peralatan dan Mesin sebanyak 14 unit sebesar Rp95.155.500,00 di sembilan OPD yang hilang belum diproses penghapusan dari KIB dan belum diproses TP TGR sebagai berikut:

Tabel 5.52 Rincian Peralatan dan Mesin di Lima OPD Yang Hilang Belum Diproses Penghapusan dari KIB dan Belum Diproses TP TGR (dalam rupiah)

No	OPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai	Tgl Laporan ke Kepolisian
1.	Disbudpar	Laptop Toshiba	1	10.000.000,00	19-Nop-14
2.	RSJD	Laptop Sony Vaio Tahun 2014	1	10.400.000,00	10-Nop-14
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	03-Nop-11
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	20-Mei-11
		Printer Canon MP 287	1	955.000,00	21-Jun-12
3.	Bandiklatda	Televisi 24 Inci merk Sharp	7	24.255.000,00	17-Jun-14
4.	Dinkes	Honda NF 125 TRF	1	15.050.000,00	30-Mrt-15
5.	Dinas Perkebunan	Yamaha Vixion BH 3647 HZ	1	21.546.500,00	15-Mei-15
Jumlah			14	95.155.500,00	

Terdapat Peralatan dan Mesin sebanyak 2 unit sebesar Rp78.452.413,39 di dua OPD yang hilang dan sudah diproses TP TGR namun belum dihapus pada buku KIB sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Peralatan dan Mesin di Dua OPD Yang Hilang Sudah Proses TPTGR Namun Belum Dihapus pada Buku KIB (dalam rupiah)

No	OPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai	Tgl Laporan ke Kepolisian
1.	Biro Humas	Kamera video Sony	1	29.900.000,00	11-Des-14

2.	Biro Umum	Infokus	1	48.552.413,39	12-Nop-13
	Jumlah		2	78.452.413,39	

5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp1.575.338.632.494,39 Rp1.422.186.530.462,79

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.575.338.632.494,39 naik sebesar Rp153.152.102.031,60 atau 10,77% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.422.186.530.462,79. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2018	Rp	1.422.186.530.462,79
Mutasi Tambah	Rp	213.447.482.242,19
Mutasi Kurang	Rp	(60.295.380.210,59)
Jumlah Nilai perolehan	Rp	1.575.338.632.494,39

Mutasi tambah sebesar Rp213.447.482.242,19 terdiri dari:
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 yang tersebar pada 25 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp179.896.478.251,44 yang dirinci pada Lampiran 21.

Reklasifikasi sebesar Rp17.037.172.913,75 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada:

- Badan Penghubung	16.600.000,00
Jumlah (1)	Rp16.600.000,00

- 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada:

- BPSDM	38.203.000,00
- RSUD	7.606.237.152,55
- Dinas Kelautan dan Perikanan	372.293.000,00
- Disbudpar	421.040.500,00
- Penanaman Modal dan PTSP	393.683.953,00
- Dispora	7.986.350.308,20
Jumlah (2)	Rp16.817.807.913,75

- 3) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:

Dinas Kelautan dan Perikanan	47.400.000,00
Rumah Sakit Jiwa	108.360.000,00
Set. DPRD	47.005.000,00
Jumlah (3)	Rp202.765.000,00

Jumlah (1+2+3)	Rp17.037.172.913,75
----------------	---------------------

Pertambahan yang berasal dari hibah sebesar Rp15.176.455.077,00 terdiri dari:

- | | |
|--|---|
| 1) Dinas Kelautan dan Perikanan BAST
Nomor 2280/BASTB/DKP/V/2019 | 2.964.574.389,00 |
| 2) RSUD KN.02.07/I/2378/2018 | 9.788.484.688,00 |
| 3) Rumah Sakit Jiwa BASTB Nomor KN
.02.07/I/3598/2018 | 756.600.000,00 |
| 4) Biro Pengelolaan Barang Milik
Daerah Nomor
1487/NPH/SETDA.PBMD-3.2/2019 | 277634.000,00 |
| 5) BPBD BAST Nomor 028/4337/
Jumlah | 1.389.162.000,00
Rp15.176.455.077,00 |

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang dibiayai dari Hutang ada terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebesar Rp437.370.000,00
Mutasi tambah mencatat Gedung yang belum tercatat pada Dinas kehutanan sebesar Rp900.006.000,00

Mutasi kurang sebesar Rp60.295.380.210,59 terdiri dari:

Reklasifikasi ke aset selain gedung dan bangunan sebesar Rp51.956.911.410,59

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada:
Dinas Perhubungan | 3.495.131.800,00 |
| Dinas Pendidikan | 5.156.450.970,00 |
| Jumlah (1) | Rp8.651.582.770,00 |
| 2) Reklasifikasi ke Aset Jalan,
Jaringan dan Irigasi pada:
RSUD | 42.229.000,00 |
| Dinas Perhubungan | 3.082.671.746,67 |
| Dinas Perkebunan | 25.740.000,00 |
| Jumlah (2) | Rp3.150.640.746,67 |
| 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap
Lainnya pada:
Dinas Perkebunan | 1.000.600.000,00 |
| RSUD | 1.657.560.631,35 |
| Dinas PU PR | 25.261.858.026,97 |
| Dinas Perhubungan | 118.800.000,00 |
| Biro Pengelolaan Barang
Milik Daerah | 2.779.730.295,00 |
| Jumlah (3) | Rp30.818.548.953,32 |
| 4) Reklasifikasi ke Konstruksi
Dalam Pengerjaan pada:
Dinas Kelautan dan
Perikanan | 141.290.000,00 |
| RSUD Rd. Mattaher | 6.766.306.455,60 |



Badan Keuangan Daerah	198.812.000,00
Set. DPRD	80.096.000,00
Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	444.695.585,00
Dispora	1.561.438.900,00
Jumlah (4)	9.192.638.940,60
5) Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
Kominfo	28.900.000,00
Set.DPRD	114.600.000,00
Jumlah 5)	Rp143.500.000,00
Jumlah (1+2+3+4+5)	Rp51.956.911.410,59

Mutasi kurang karena nilai satuan barang dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp231.732.000,00 terdapat pada:

1) Dinas Kelautan dan Perikanan	852.000,00
2) Dinas Perhubungan	194.750.000,00
3) Badan Pengubung Daerah	16.600.000,00
4) Penanaman Modal dan PTSP	1.980.000,00
5) Dinas Pemuda dan Olahraga	5.550.000,00
6) Dinas Kehutanan	12.000.000,00
Jumlah	Rp231.732.000,00

Pengurangan nilai aset gedung dan bangunan karena hibah sebesar Rp8.106.736.800,00 terdapat pada Dinas Perhubungan dengan BAST Nomor: S-1574/DPUPR-1.3/VII/2019

Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada Lampiran 22.

5.3.1.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp7.333.105.832.486,33

Rp6.953.653.854.201,34

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.333.105.832.486,33 naik sebesar Rp379.451.978.284,99 atau 5,46% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.953.653.854.201,34. Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.333.105.832.486,33 ini masih termasuk aset jalan yang seharusnya telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp596.159.589.792,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1485/SETDA.PBMN-3.2/V/2018, karena Jalan tersebut merupakan Jalan Nasional akan tetapi Dinas Pekerjaan Umum belum dapat mengidentifikasi jalan-jalan mana saja yang harus diserahkan



kepada Pemerintah Pusat. Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	6.953.653.854.201,34
Mutasi Tambah	Rp	512.019.615.925,15
Mutasi Kurang	Rp	(132.567.637.640,16)
Jumlah Nilai perolehan	Rp	7.333.105.832.486,33

Mutasi tambah sebesar Rp512.019.615.925,15 terdiri dari:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 sebesar Rp496.203.734.974,48 yang tersebar pada 9 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan rincian pada Lampiran 23.

Mutasi dari Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan peternakan ke Sekretariat Dewan sebesar Rp58.996.000,00.

Reklasifikasi sebesar Rp11.443.351.440,67 dengan rincian sebagai berikut:

Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pada:

Dinas Pekerjaan Umum	Rp	8.003.816.944,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah	Rp	3.993.000,00
Dinas Kelautan perikanan	Rp	16.700.000,00
Jumlah 1		8.024.509.944,00

Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp239.358.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Kesehatan	Rp	64.858.750,00
Dinas Kominfo	Rp	174.500.000,00
Jumlah 2	Rp	239.358.750,00

Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.150.640.746,67 dengan rincian sebagai berikut:

Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	42.229.000,00
Dinas Perkebunan	Rp	25.740.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	3.082.671.746,67
Jumlah 3	Rp	3.150.640.746,67

Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	Rp	Rp28.842.000,00
Jumlah (1)+(2)+(3)+(4)	Rp	3.150.640.746,67

Mencatat Jalan dan Irigasi yang belum di catat pada Dinas Sosial Kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp138.000.000,00.

Mencatat dari Aset yang belum tercatat pada Dinas Eks Bakorluh Rp54.547.420,00 ke Dinas Kehutanan.



Mutasi tambah dari yang berasal dari Hibah berdasarkan BAST dengan Nomor: 4462/DJTB/PL.930.SI/V/2019 sebesar Rp4.120.986.090,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Mutasi dan Reklasifikasi kurang sebesar Rp132.567.637.640,16 terdiri dari: Reklasifikasi kurang Dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp47.649.410.423,62 yang berasal dari Dinas Perhubungan sebesar Rp47.647.910.423,62 dan Biro BPMD sebesar Rp1.500.000,00.

Reklasifikasi kurang pada Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp44.845.860.165,27 yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp16.700.000,00 dan Dinas PUPR sebesar Rp44.829.160.165,27

Mutasi Aset dari Dinas tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan ke Sekretariat dewan Rp58.996.000,00.

Reklasifikasi keluar dari Sekretariat Dewan ke Aset rusak berat Aset lain-lain sebesar Rp58.996.000,00.

Mutasi kurang Karena Hibah dari Dinas Perhubungan ke Kemenhub berdasarkan BAST Sekdaprov jambi Nomor: 028/1320/SETDA.PEMD-3/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang belum tercatat di tahun 2018 sebesar Rp2.161.642.000,00.

Mutasi kurang Karena Reklas ke aset lainnya berdasarkan Temuan BPK dengan Nomor LHP 24A/LHP/XVIII.JMB/2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebesar Rp7.837.212.679,18.

Temuan BPK dengan Nomor LHP 20/LHP/XVIII.JMB/2018 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp936.000,00.

Mutasi kurang karena nilai satuan di bawah kapitalisasi pada dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp38.709.000,00.

Mutasi kurang karena nilai satuan di bawah kapitalisasi Dinas perhubungan sebesar Rp2.531.180.800,00.

Koreksi JIJ pada Dinas PUPR, Perolehan Belanja Modal yang berupa nominalisasi sungai, sungai tidak dicatat sebagai Aset tetap Pemprov Jambi sebesar Rp5.535.697.000,00.

Koreksi JIJ pada Dinas PUPR, Perolehan Belanja Modal yang berupa pemeliharaan yang tidak menambah masa manfaat dan kapitalisasi aset sebesar Rp10.079.574.097,62.

Koreksi JIJ pada Dinas PUPR, perolehan Belanja Modal yang berupa pembangunan sumur di serahkan ke masyarakat sebesar Rp8.501.187.000,00.

Koreksi JIJ Pada Dinas PUPR, Perolehan belanja Modal ke KDP yang baru berupa perencanaan sebesar Rp3.268.236.474,47.

Adapun Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada Lampiran 24.

5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp502.637.720.745,30	Rp458.019.324.660,14

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp502.637.720.745,30 naik sebesar Rp44.618.396.085,16 atau sebesar 9,74% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp458.019.324.660,14 Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	458.019.324.660,14
Mutasi Tambah	Rp	77.295.686.411,19



Mutasi Kurang Rp (32.677.290.326,03)
Jumlah Rp 502.637.720.745,30

Mutasi tambah sebesar Rp77.295.686.411,19 diatas terdiri dari:
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp46.273.722.657,87 yang tersebar pada 8 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terinci pada Lampiran 25.

Reklasifikasi sebesar Rp31.021.963.753,32 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:

Dinas Perkebunan	1.000.600.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.657.560.631,35
Dinas PU PR	25.261.858.026,97
Dinas Perhubungan	118.800.000,00
Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.779.730.295,00
Jumlah (1)	30.818.548.953,32
- 2) Reklasifikasi dari Aset Peralatan Mesin pada:

Set. DPRD	24.310.000,00
-----------	---------------
- 3) Reklasifikasi dari Belanja barang dan Jasa pada:

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	179.104.800,00
Jumlah (1)+(2)+(3)	Rp31.021.963.753,32

Mutasi kurang sebesar Rp32.677.290.326,03 terdiri dari:

Reklasifikasi sebesar Rp24.399.607.216,86 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan pada:

BPSDM	38.203.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	372.293.000,00
RSUD	7.606.237.152,55
Disbudpar	421.040.500,00
Dinas Penanaman Modan dan PTSP	393.683.953,00
Jumlah (1)	8.831.457.605,55
- 2) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada:

- Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	25.000.000,00
- Dinas Pendidikan	15.500.610.211,31
Jumlah (2)	15.525.610.211,31



- 3) Reklasifikasi ke Aset Jalan Jaringan pada:
 - Dinas Pendidikan 28.842.000,00
- 4) Reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan pada:
 - Dinas Kelautan dan Perikanan 13.000.000,00
- 5) Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada:
 - Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah 697.400,00

Jumlah (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 24.399.607.216,86

Pengurangan Mutasi ke Dinas Dispora berupa Rehap GOR Kota Baru sebesar Rp7.986.350.308,20 dari Dinas PU PR.

Pengurangan karena Temuan di Dinas PU PR dengan nilai sebesar Rp291.332.800,97 dengan Nomor LHP 24A/LHP/XVIII.JMB/2019.

Adapun Daftar Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada Lampiran 26.

5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp110.279.947.679,01	Rp60.307.829.961,00

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp110.279.947.679,01 naik sebesar Rp49.972.117.718,01 atau 82,86% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp60.307.829.961,00. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2018	Rp	60.307.829.961,00
Mutasi Tambah	Rp	58.213.342.662,01
Mutasi Kurang	Rp	(8.241.224.944,00)
Jumlah Rp		110.279.947.679,01

Mutasi tambah sebesar Rp58.213.342.662,01 yang merupakan Reklasifikasi pada:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Tanah pada:
 - Dinas PU PR 893.607.081,67
- 2) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:
 - Dinas Kelautan dan Perikanan 141.290.000,00
 - RSUD 6.766.306.455,60
 - Badan Keuangan Daerah 198.812.000,00
 - Biro PBMD 444.695.585,00
 - Set DPRD 80.096.000,00
 - Jumlah (2) 7.631.200.040,60



3) Reklasifikasi dari Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada:	
Dinas PU PR	48.097.396.639,74
Dinas Kelautan dan Perikanan	16.700.000,00
Dispora	1.561.438.900,00
Jumlah (3)	49.675.535.539,74
4) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	
Dinas Kelautan dan Perikanan	13.000.000,00
Jumlah (4)	13.000.000,00
Jumlah (1)+(2)+(3)+(4)	58.213.342.662,01

Mutasi kurang sebesar Rp8.241.224.944,00 merupakan Reklasifikasi ke aset selain Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan pada:	
Dinas Kelautan dan Perikanan	47.400.000,00
Sekretariat DPRD	47.005.000,00
RSJD	108.360.000,00
Jumlah (1)	202.765.000,00
2) Reklasifikasi ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada:	
Dinas PU PR	8.003.816.944,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	16.700.000,00
RSJD	3.993.000,00
Jumlah (2)	8.024.509.944,00
3) Reklasifikasi ke Aset lainnya	
Sekretariat DPRD	13.950.000,00
Jumlah (3)	13.950.000,00
Jumlah (1)+(2)+(3)	8.241.224.944,00

KDP berada pada 13 OPD sebesar Rp110.279.947.679,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo 2019
1	Dinas Pendidikan	2.018.028.932,00
2	Dinas Kesehatan	247.460.000,00
3	RSUD Rd. Mattaheer	53.650.442.540,60
4	Rumah Sakit Jiwa	45.683.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum PR	48.991.003.721,41
6	Dinas Perhubungan	2.498.716.000,00
7	Dispora	1.561.438.900,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	156.610.000,00
9	Dinas Perkebunan	29.285.000,00



10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	332.941.000,00
11	Sekretariat DPRD	49.021.000,00
12	Biro PBMD	444.695.585,00
13	Badan Keuangan Daerah	254.622.000,00
	Jumlah	110.279.947.679,01

5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp5.296.423.184.093,20) (Rp4.815.122.619.297,82)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp5.296.423.184.093,20) naik sebesar (Rp481.300.564.795,38) atau 10,00% dibandingkan dengan tahun 2018 (Rp4.815.122.619.297,82). Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019.

Tabel 5.55 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Peralatan dan Mesin	(1.116.209.452.976,42)	(920.745.305.824,44)
2.	Gedung dan Bangunan	(326.690.123.138,07)	(309.115.614.169,54)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.853.506.975.978,71)	(3.585.261.699.303,84)
4.	Aset Tetap Lainnya	(16.632.000,00)	(0,00)
	JUMLAH	(5.296.423.184.093,20)	(4.815.122.619.297,82)

Rincian atas Akumulasi Penyusutan per jenis aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 27, sedangkan untuk Rincian atas Akumulasi Penyusutan Per OPD dapat dilihat pada Lampiran 28.

Mutasi tambah sebesar Rp505.776.053.590,09 terdiri dari :

Beban Penyusutan 2019 Rp477.520.233.721,25

Akumulasi Penyusutan atas aset yang diperoleh dari Hibah masuk sebesar Rp26.923.955.007,52 terdiri dari:

-	RSUD	1.370.387.856,32
-	RSJ	15.053.624.700,00
-	Dishub	503.571.428,58
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.907.492.847,42

- Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan peternakan	6.088.878.175,20
Jumlah (1)	26.923.955.007,52

Koreksi Tambah terdiri dari:

- Dinas PU PR	969.485.361,06
- Kesbangpol	480.897,70
- Sosdukcapil	55.200.000,00
- Dinas Perkebunan	37.177.500,00
- Biro Pemerintahan	1.085.500,00
- Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	88.149.888,27
- Balitbangda	50.285.714,29
- Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan peternakan	130.000.000,00
Jumlah (2)	1.331.864.861,32

Mutasi kurang sebesar Rp24.475.488.794,71 terdiri dari:

Hibah keluar :

- Dishub	4.596.075.862,62
Reklasifikasi ke akumulasi penyusutan aset lainnya :	
- Dinas Koperasi	667.658.269,21
- Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan peternakan	5.300.000,00
- Set. DPRD	1.270.475.000,00
- Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	965.166.004,00
- Biro Hukum	185.989.000,00
- Dinas PU PR	12.364.285,71
Jumlah (2)	3.106.952.558,92

Koreksi kurang terdiri dari :

- Dinas Kesehatan	52.263,73
- RSUD	27.014.399,99
- Dinas Ketahanan pangan	729.000,10
- Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan peternakan	314.347.109,68
- Dinas ESDM	7.033.474.937,68
- Badan Keuangan Daerah	2.117.965.504,70
- Dinas PU PR	178.818.198,70
- Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.673.782.458,54



- Badan Penghubung	1.440.929.000,00
Jumlah (3)	15.787.112.873,17

Penghapusan terdiri dari :

- Kesbangpol (SK Penghapusan Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	398.660.000,00
- Dinas ESDM (SK Penghapusan Nomor 1184/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018 dan Nomor 764/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018)	193.800.000,00
- Disperindag (SK Penghapusan Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	65.300.000,00
- Biro Umum (SK Penghapusan Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	125.000.000,00
- Bappeda (SK Penghapusan Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	202.587.500,00
Jumlah (4)	985.347.500,00
Jumlah (1)+(2)+(3)+(4)	Rp24.475.488.794,71

5.3.1.4 Dana Cadangan 31 Desember 2019 31 Desember 2018

- -

Dana Cadangan per 31 Desember 2019 adalah nihil. Dana cadangan merupakan alokasi dana yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (seperti pembangunan/belanja modal yang memerlukan dana beberapa tahun anggaran/multi years) dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

5.3.1.5 Aset Lainnya 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Rp997.951.967.208,05 Rp976.179.787.515,65

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp997.951.967.208,05 atau naik sebesar Rp21.772.179.692,40 atau 2,23% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp976.179.787.515,65. Mutasi dan Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	156.062.000,00	156.062.000,00
3.	Kemitraan dengan pihak ketiga (BOT)	189.742.089.055,00	189.742.089.055,00
4.	Aset Tidak berwujud	10.048.341.699,46	9.532.845.680,46
5.	Aset Lain-lain	825.337.202.002,01	793.799.303.969,51
6.	Akumulasi Amortisasi	(7.179.144.083,80)	(6.861.088.450,47)
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain	(20.152.583.464,52)	(10.189.424.738,85)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	Jumlah	997.951.967.208,15	976.179.787.515,65

5.3.1.5.a Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp156.062.000,00 Rp156.062.000,00

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp156.062.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp156.062.000,00 dan tidak terdapat mutasi, merupakan saldo tagihan piutang Ganti Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan surat pembebanan. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdapat pada:
Tabel 5.57 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
(dalam rupiah)

No.	OPD	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Biro Humas dan Protokol	29.900.000,00	29.900.000,00
2.	Bakeuda	78.345.500,00	78.345.500,00
3.	Badan Kesbangpol	12.316.500,00	12.316.500,00
4.	Dinas Kehutanan	35.500.000,00	35.500.000,00
	Jumlah	156.062.000,00	156.062.000,00

5.3.1.5.b Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp189.742.089.055,00 Rp189.742.089.055,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) per 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat mutasi, masing-masing jumlahnya sebesar Rp189.742.089.055,00 dan Rp189.742.089.055,00 yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT (Build Operate Transfer/Bangun Guna Serah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	BOT dengan PT Jambi Sapta Manunggal	8.333.440.000,00	8.333.440.000,00
2.	BOT dengan PT Simota Putra Prayudha (WTC)	13.986.560.000,00	13.986.560.000,00



3.	BOT dengan PT Eraguna Bumi Nusa	167.422.089.055,00	167.422.089.055,00
Jumlah		189.742.089.055,00	189.742.089.055,00

Hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan kerjasama BOT dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP) dalam pembangunan dan pengelolaan Jambi Tepian Ratu River View & Resort di Jalan Slamet Riyadi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Kontrak produksi. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT pada tanggal 27 Januari 1995.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan sebidang tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) seluas 52.084 m² yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura dan PT JSMP akan memanfaatkan tanah dengan status Hak Guna Bangun (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) selama

30 tahun sejak ditandatanganinya kontrak produksi, untuk mendirikan Hotel secara bertahap berkapasitas 92 kamar dalam jangka waktu 5 tahun.

PT JSMP harus membayar kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 atas pemberian hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dan harus menyediakan dana investasi Rp20.521.096.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun ke-3 sesuai perjanjian. Setiap keterlambatan pembayaran royalti akan

dikenakan denda sebesar 1 per mil setiap hari. Jangka waktu BOT tersebut selama 30 tahun.

Pencatatan Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) dengan PT JSMP diakui sebesar nilai investasi yaitu Rp8.333.440.000,00 yaitu seluas 52.084 m² dengan Nilai Tanah Tahun 2002 sebesar Rp160.000,00/m².

BOT dengan PT Simota Putra Prayudha sesuai dengan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Prayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Jambi yang telah diubah melalui Addendum I Kesepakatan Bersama Nomor 1/KB/OHK/II/2006 dan Nomor 028/SPP-KB/II/2006 tanggal 28 April 2006. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Prayudha ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Nomor 101 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Simota Putra Prayudha yang telah diubah melalui Akta Notaris Nomor 24 tanggal 18 Desember 2019 tentang Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Simota Putra Prayudha. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (Build, Operate, Transfer/Bangun, Guna, Serah).

Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa kerjasama tersebut dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kawasan pusat perdagangan dan jasa yang terdiri dari pusat perbelanjaan/Mall dan/atau Hotel. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 10.765 m² senilai Rp13.986.560.000,00. PT Simota Putra Prayudha berkewajiban melakukan pembayaran biaya kompensasi bangunan milik PT

Pelindo II, membayar biaya pembuatan sertifikat HPL untuk dan atas nama PT Pelindo II sebesar 50% dari biaya seluruhnya, mengganti tanah dan membangun gedung pusat kesehatan pelabuhan, mengganti pembangunan gedung administrator pelabuhan dan membiayai pembangunan pusat perdagangan/perbelanjaan dan jasa dengan perkiraan investasi Rp105.000.000.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak pengoperasian/grand opening. Jangka waktu BOT tersebut selama 30 tahun.

BOT dengan PT Eraguna Bumi Nusa sesuai dengan Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru Nomor 06/PK.GUB/PU/2014 - Nomor : 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal

9 Juni 2014 yang telah diubah melalui Addendum Pertama Nomor 644/09/Setda.PKS/X/2018 - Nomor 09/X/EBN/PKS 2018 tanggal 11 Oktober 2018. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (Build, Operate, Transfer/Bangun, Guna, Serah).

Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa kerjasama tersebut dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 71.757 m² senilai Rp167.422.089.055,00. PT Eraguna Bumi Nusa berkewajiban menyediakan biaya pembangunan sebesar Rp176.600.000.000,00 untuk membangun pasar dan fasilitas penunjang lainnya serta berkewajiban membayar kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp17.660.000.000,00 selama jangka waktu perjanjian tersebut selama 20 tahun terhitung sejak diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB).

Selain BOT di atas, Pemprov Jambi juga mengadakan kerjasama BOT dengan PT Putra Kurnia Properti sesuai dengan perjanjian $\frac{\text{Nomor : PK.GUB/PU/2014}}{\text{Nomor : 001/JBC-PKP/VI/2014}}$ tanggal 9

Juni 2014 perihal kerja sama pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center (JBC). Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (Build, Operate, Transfer/Bangun, Guna, Serah) dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Pemprov Jambi menyerahkan tanah seluas 76.750 m² dan bangunan di atasnya dengan nilai appraisal sebesar Rp208.000.000.000,00 yang beralamat di Jalan Kapten A. Bakarudin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura sedangkan PT Putra Kurnia Properti membangun fasilitas dan mengelola Jambi Bisnis Center dengan perkiraan biaya pembangunan dan biaya pengelolaan sebesar Rp1.501.267.500.000,00 serta wajib membayar biaya kontribusi sebesar Rp56.411.250.000,00 yang diangsur selama

30 tahun. Sampai 31 Desember 2018, status tanah yang dikerjasamakan masih berupa hak pakai dan belum menjadi hak pengelolaan serta masih dalam sengketa yang telah diputuskan di Pengadilan Tinggi Jambi

No. 62/PDT/2014/PT.JMB tanggal 26 Januari 2015 dan sekarang masih dalam proses banding di Mahkamah Agung. Oleh karena itu nilai BOT dengan PT Putra Kurnia Properti belum dapat dicatat sebagai Aset Lainnya.

5.3.1.5.c Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp10.048.341.699,46

Rp9.532.845.680,46



Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.048.341.699,46 naik sebesar Rp515.496.019,00 atau 5,41% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.532.845.680,46

Saldo Tahun 2019	Rp	9.532.845.680,46
Mutasi Tambah	Rp	515.496.019,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Rp		10.048.341.699,46

Mutasi Tambah sebesar Rp515.496.019,00 terdiri dari:

Belanja Modal pada Bappeda sebesar Rp434.800.000,00.

Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp28.994.319,00 dengan BAST Nomor B.13533/DJPT/PL.430.D1/X/2018

Reklasifikasi tambah dari Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosdukcapi sebesar Rp17.401.700,00.

Reklasifikasi tambah dari Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp34.300.000,00.

Rincian atas Aset Tidak Berwujud Per OPD dapat dilihat pada Lampiran 29.

5.3.1.5.d Aset Lain-lain	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp825.337.202.002,01	Rp793.799.303.969,51

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp825.337.202.002,01 naik sebesar Rp31.537.898.032,50 atau 3,97% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp793.799.303.969,51. Rincian mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	793.799.303.969,51
Mutasi Tambah	Rp	47.296.808.328,17
Mutasi Kurang	Rp	(15.758.910.295,67)
Jumlah Rp		825.337.202.002,01

Mutasi tambah sebesar Rp47.296.808.328,17 yang terdiri dari:

Reklasifikasi sebesar Rp10.054.559.620,02 berupa:

1) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada:	
Dinas Ketahanan Pangan	46.000.000,00
Dinas Koperasi	13.165.275,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	14.425.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.300.000,00
Badan Keuangan Daerah	2.136.799.059,75
Biro Umum	3.389.696.038,27
Biro PBMD	1.963.166.004,00
Dinas Kominfo	48.175.000,00
Sekretariat DPRD	1.483.875.843,00
Dinas Kehutanan	538.400.000,00
Inspektorat	12.425.000,00



Biro Hukum	185.989.000,00
Jumlah (1)	9.837.416.220,02
2) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:	
- Dinas Kominfo	28.900.000,00
- Sekretariat DPRD	114.600.000,00
Jumlah (2)	143.500.000,00
3) Reklasifikasi dari Aset Jalan Jaringan pada:	
- Sekretariat DPRD	58.996.000,00
4) Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada:	
- Sekretariat DPRD	13.950.000,00
5) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada:	
Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	697.400,00
Jumlah (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	10.054.559.620,02

Mutasi Tambah yang berasal dari koreksi aset yang belum tercatat pada tahun lalu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sebesar Rp44.124.750,00

Penyesuaian Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pada Dinas ESDM sebesar Rp29.053.903.478,00

Penambahan Piutang lainnya (hasil pemeriksaan) pada Dinas PU sebesar Rp8.144.220.480,15

Mutasi kurang sebesar Rp15.758.910.295,67 akibat penghapusan dikarenakan Aset telah dilelang yang terdiri dari:

Penghapusan:

1	Penghapusan Aset pada RSUD (berdasarkan Keputusan Sekda Nomor 20/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	Rp 8.127.801.507,43
2	Penghapusan pada Dinas Ketahanan Pangan karena penjualan Aset/Lelang	Rp 34.000.000,00
3	Penghapusan pada Biro Umum (berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	Rp 1.671.680.991,70
4	Penghapusan pada Dinas Sosial dan Dukupil (berdasarkan Keputusan Sekda Nomor 19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019)	Rp 141.500.000,00
	Jumlah	Rp 9.974.982.499,13



Mutasi Kurang karena karena penghapusan Aset rusak berat pada Badan Penghubung Daerah yang baru dicatat tahun ini sebesar Rp1.212.612.922,40 (berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 175/KEP-GUB/SETDA.BPBMD/2017).

Pengurangan karena pelunasan Temuan Pemeriksaan Total sebesar Rp4.571.314.874,14 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.242.039.944,18 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.332.170,00 dan Dinas Tanaman Pangan sebesar Rp321.942.759,96.

Adapun Rincian Aset Lainnya Per OPD terdapat pada Lampiran 30

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp825.337.202.002,01 sebagai berikut:

Aset yang secara fungsi dan keberadaannya dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp608.330.923.323,02 yang terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp124.001.084.453,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp484.329.838.870,02.

Aset rusak berat sejumlah Rp167.228.243.369,01 terdapat pada 42 OPD.

Aset Lain-lain berupa SID Perluasan Sawah Kegiatan P3A dan Tata Air Mikro sebesar Rp798.980.000,00 pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.

Piutang jangka panjang berupa komitmen kontribusi dari perjanjian BOT yang jatuh tempo lebih dari setahun, yaitu lebih dari 31 Desember 2018 sebesar Rp10.893.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1	PT Jambi Sapta Manunggal	Rp	1.750.000.000,00
.	Pratama		
2	PT Eraguna Bumi Nusa	Rp	9.143.600.000,00
.			
	Jumlah	Rp	10.893.600.000,00

Hewan ternak yang digulirkan oleh petani yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp30.556.674.298,60.

Aset yang hilang pada Biro Umum yang belum ditetapkan surat pembebanan atas ganti kerugiannya sebesar Rp144.573.349,91.

Nilai kerugian atas Jaminan Pelaksanaan dan Kekurangan Volume yang belum diterima oleh Pemprov dan belum ditetapkan SK Pembebanannya/SKTJM nya sebesar Rp7.384.207.661,47 dengan rincian yaitu:

Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp466.122.300,00; Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.918.085.361,47.

5.3.1.5.e Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp7.179.144.083,80) (Rp6.861.088.450,47)

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp7.179.144.083,80). Naik sebesar (Rp318.055.633,33) dibandingkan dengan tahun 2018 (Rp6.861.088.450,47) atau naik sebesar 4,64%. Rincian mutasi akumulasi amortisasi sebagai berikut:



Saldo Tahun 2018	Rp	(6.861.088.450,47)
Mutasi Tambah	Rp	(318.055.633,33)
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Rp		(7.179.144.083,80)

Mutasi tambah sebesar (Rp318.055.633,33) yang terdiri dari:
Mutasi tambah dari beban amortisasi tahun berjalan sebesar

Rp

(199.956.675,000):

1)	Dinas Kesehatan	Rp	(2.508.000)
2)	Rumah Sakit Umum	Rp	(13.820.000)
3)	Dinas Sosial Dukcapil	Rp	(290.028,33)
4)	Dinas Kominfo	Rp	(41.909.480,00)
5)	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Rp	(39.715.000,00)
6)	Biro Umum	Rp	(22.605.000,00)
7)	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	(10.985.000,00)
8)	Bappeda	Rp	(11.436.666,67)
9)	Badan Keuangan Daerah	Rp	(56.687.500,00)
Jumlah		Rp	(199.956.675,00)

Mutasi tambah kurang catat pada tahun sebelumnya terdapat pada Badan Keuangan Daerah sebesar (Rp118.098.958,33).

Adapun Rincian Akumulasi Amortisasi per31 Desember 2019 dan 2018 terdapat pada tabel dibawah.

Tabel 5.59 Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

No.	OPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018
1.	Dinas Pendidikan	(2.400.000.000,00)	(2.400.000.000,00)
2.	Dinas kesehatan	(15.466.000,00)	(12.958.000,00)
3	Rumah Sakit Umum	(96.795.000,00)	(82.975.000,00)
4.	Pekerjaan Umum	(1.170.064.000,00)	(1.170.064.000,00)
5.	Dinas Perhubungan	(1.704.608.000,00)	(1.704.608.000,00)
6.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(131.548.333,33)	(91.833.333,33)
7.	Biro Hukm	(129.480.000,00)	(129.480.000,00)
8.	Biro Pembangunan dan kerja sama	(57.120.800,00)	(57.120.800,00)

No.	OPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018
9.	biro umum	(99.890.380,47)	(77.285.380,47)
10.	Biro PBMD	(49.340.416,67)	(38.355.416,67)
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.138.318.000,00)	(1.096.408.520,00)
12.	Dinas Sosial Dukcapil	(290.028,33)	0,00
13.	Bappeda	(11.436.666,67)	0,00
14.	Bakeuda	(174.786.458,33)	0,00
Jumlah		(7.179.144.083,80)	(6.861.088.450,47)

5.3.1.5.f Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain

31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp20.152.583.464,52) (Rp10.189.424.738,85)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar (Rp20.152.583.464,52), naik sebesar (Rp9.963.158.725,67) dibanding tahun 2018 (Rp10.189.424.738,85) atau naik sebesar 97,78 %. Adapun Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018.

Saldo Tahun 2018 Rp (10.189.424.738,85)
Mutasi Tambah Rp (11.622.328.242,06)
Mutasi Kurang Rp (1.659.169.516,39)
Jumlah Rp (20.152.583.464,52)

Mutasi tambah sebesar (Rp11.622.328.242,06) yang terdiri dari:
Mutasi tambah karena reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp7.269.920.864,24) yang terdiri dari

1)	Dinas Pekerjaan Umum	Rp	(12.364.285,71)
2)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan	Rp	(5.300.000,00)
3)	Badan Keuangan Daerah	Rp	(2.117.965.504,75)
4)	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	(965.166.004)
5)	Biro Umum	Rp	(3.293.702.800,57)
6)	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp	(667.658.269,21)
7)	Sekretariat DPRD	Rp	(21.775.000)
8)	Biro Hukum	Rp	(185.989.000)
	Jumlah	Rp	(7.269.920.864,24)



Mutasi tambah yang berasal dari beban penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp1.558.745.851,93) yang terdiri dari:

1)	Dinas Ketahanan Pangan	Rp	(46.000.000,00)
2)	Dinas Koperasi & UMKM	Rp	(940.376,79)
3)	Sekretariat DPRD	Rp	(1.415.812.237,44)
4)	Biro Umum	Rp	(95.993.237,7)
	Jumlah	Rp	(1.558.745.851,93)

Mutasi tambah yang berasal dari koreksi akibat akumulasi penyusutan aset lainnya – aset lain-lain yang belum tercatat pada tahun sebelumnya sebesar (Rp1.572.508.044,00) yang berasal dari :

1)	Dinas Perhubungan	Rp	(1.554.547.264,00)
2)	Badan Keuangan Daerah	Rp	(17.960.780,00)
	Jumlah	Rp	(1.572.508.044,00)

Mutasi tambah yang berasal dari Mutasi antar OPD sebesar (Rp1.221.153.481,89) yang terdiri dari :

1)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pernakan	Rp	(44.124.750,00)
2)	Sekretariat DPRD	Rp	(179.028.731,89)
3)	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	(998.000.000,00)
	Jumlah	Rp	(1.221.153.481,89)
	Jumlah Total (1+2+3+4)	Rp	

(11.622.328.242,06)

Mutasi kurang sebesar (1.659.169.516,39) yang berasal dari penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain karena telah dilelang terdapat pada :

1)	Biro Umum	Rp	(1.625.169.516,39 .)
2)	Dinas Ketahanan Pangan	Rp	(34.000.000,00)

Jumlah Rp. (1.659.169.516,39)

Adapun rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain Lain Tahun 2019 terdapat pada 16 OPD.

Tabel 5.60 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya- Aset Lain Lain per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

No.	OPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018
1.	Satpol PP	(20.852.295,00)	(20.852.295,00)
2.	Biro Umum	(9.194.505.443,23)	(7.429.978.921,35)

No.	OPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018
3.	Kominfo	(41.942.736,00)	(41.942.736,00)
4.	RSJ	(476.044.858,00)	(476.044.858,00)
5.	Set DPRD	(3.406.999.358,33)	(1.790.383.389,00)
6.	Badan Kesbangpol	(208.084.101,50)	(208.084.101,50)
7.	Badan Penanaman Modal Daerah dan PTSP	(204.952.438,00)	(204.952.438,00)
8.	Bakeuda	(2.149.312.284,75)	(13.386.000,00)
9.	Dinas Sosial Dukcapil	(3.800.000,00)	(3.800.000,00)
10.	Dinas Pekerjaan Umum	(12.364.285,71)	0,00
11.	Dinas Perhubungan	(1.554.547.264,00)	0,00
12.	Dinas Koperasi dan UKM	(668.598.646,00)	0,00
13.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	(49.424.750,00)	0,00
14.	Biro PBMD	(1.963.166.004,00)	0,00
15.	Biro Hukum	(185.989.000,00)	0,00
16.	Dinas Ketahanan Pangan	(12.000.000,00)	0,00
Jumlah		(20.152.583.464,52)	(10.189.424.738,85)

5.3.2 Kewajiban 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp411.030.632.725,79 Rp445.044.323.195,12

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2019, kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp411.030.632.725,79 turun sebesar Rp34.013.690.469,33 atau 7,64% dari tahun 2018 sebesar Rp445.044.323.195,12 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Rincian mutasi kewajiban sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp411.030.632.725,79 Rp445.044.323.195,12

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp411.030.632.725,79 atau turun sebesar Rp34.013.690.469,33 atau 7,64% dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp445.044.323.195,12. Kewajiban Jangka Pendek tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.61.a Kewajiban Jangka Pendek
(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Utang PFK	-	-
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	45.899.624.074,46
3.	Utang Belanja	270.437.818.403,33	1.810.228.744,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	140.592.814.322,46	397.334.470.376,66
Jumlah		411.030.632.725,79	445.044.323.195,12

5.3.2.1.a Utang PFK 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp0,00Rp0,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah nihil Pemerintah Provinsi Jambi telah menyetorkan seluruh PFK yang dipungut ke Kas Daerah. Utang PFK tahun 2019 tidak ada mutasi.

5.3.2.1.b Utang Kepada Pihak Ketiga
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp0,00Rp45.899.624.074,46

Nilai Utang lain lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp45.899.624.074,46 dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp45.899.624.074,46. Penurunan 100% ini dikarenakan utang ini di reklasifikasi pencatatannya ke utang jangka pendek lainnya.

5.3.2.1.c Utang Belanja
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp270.437.818.403,33 Rp1.810.228.744,00

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp270.437.818.403,33 atau naik sebesar Rp268.627.589.659,33 atau 14.839,43% dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.810.228.744,00.

Adapun rincian utang belanja adalah sebagai berikut :

Utang belanja jasa sebesar Rp 1.831.369.509 yang dapat dirinci pada lampiran 31. Utang pada Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp42.129.264.615,59 yang terdiri dari

Tabel 5.61.b Utang pada Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
----	--------	--------

1	Hutang Belanja Pegawai BLUD	13.575.777.450,76
2	Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.124.858.728,43
3	Hutang Belanja Modal BLUD	1.428.628.436,40
	Jumlah	42.129.264.615,59

Utang pada Bakeuda-SKPKD sebesar Rp224.889.234.180,54 yang merupakan utang Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Air Permukaan dan Pajak Rokok serta kurang salur PBB-KB tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

3.a. Bagi Hasil PKB Tahun 2019 sebesar Rp38.695.776.995,70 tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62 Rincian Utang Bagi Hasil PKB Tahun 2019
(dalam rupiah)

No	KAB/ KOTA	JUMLAH
1	KOTA JAMBI	13.993.182.812,70
2	KABUPATEN BATANGHARI	2.663.093.475,00
3	KABUPATEN BUNGO	2.926.914.247,00
4	KABUPATEN TEBO	2.749.668.975,00
5	KABUPATEN MERANGIN	2.965.191.098,00
6	KABUPATEN SAROLANGUN	2.530.755.329,00
7	KABUPATEN MUARO JAMBI	2.731.221.839,00
8	KABUPATEN TANJAB. BARAT	2.530.358.123,00
9	KABUPATEN TANJAB. TIMUR	1.970.504.748,00
10	KOTA SUNGAI PENUH	1.593.740.148,00
11	KABUPATEN KERINCI	2.041.146.201,00
	JUMLAH	38.695.776.995,70

3.b. Bagi Hasil BBN-KB Tahun 2019 sebesar Rp35.006.666.096,70 tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Rincian Utang Bagi Hasil BBN-KB Tahun 2019
(dalam rupiah)

No	KAB/ KOTA	JUMLAH
1	KOTA JAMBI	13.733.317.919,52
2	KABUPATEN BATANGHARI	2.267.737.127,10
3	KABUPATEN BUNGO	2.492.409.602,65
4	KABUPATEN TEBO	2.341.475.140,10



No	KAB/ KOTA	JUMLAH
5	KABUPATEN MERANGIN	2.763.002.143,71
6	KABUPATEN SAROLANGUN	2.155.040.396,04
7	KABUPATEN MUARO JAMBI	2.325.728.139,55
8	KABUPATEN TANJAB. BARAT	2.154.708.138,56
9	KABUPATEN TANJAB. TIMUR	1.677.967.824,29
10	KOTA SUNGAI PENUH	1.357.139.559,08
11	KABUPATEN KERINCI	1.738.140.106,10
	JUMLAH	35.006.666.096,70

3.c. Bagi Hasil PKB Tahun 2019 sebesar Rp97.990.986.831,15 tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Utang Bagi Hasil PBB-KB Tahun 2019
(dalam rupiah)

No	KAB/ KOTA	JUMLAH
1	KOTA JAMBI	18.277.505.227,36
2	KABUPATEN BATANGHARI	9.355.137.797,36
3	KABUPATEN BUNGO	10.351.590.402,26
4	KABUPATEN TEBO	8.394.025.212,77
5	KABUPATEN MERANGIN	9.367.239.400,56
6	KABUPATEN SAROLANGUN	8.296.186.265,56
7	KABUPATEN MUARO JAMBI	9.440.842.289,76
8	KABUPATEN TANJAB. BARAT	7.880.987.864,64
9	KABUPATEN TANJAB. TIMUR	7.103.601.814,55
10	KOTA SUNGAI PENUH	4.553.585.537,45
11	KABUPATEN KERINCI	4.970.285.018,88
	JUMLAH	97.990.986.831,15

3.d. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2019 sebesar Rp391.859.800,99 tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2019
(dalam rupiah)

No	KAB/ KOTA	JUMLAH
1	KOTA JAMBI	123.093.338,33
2	KABUPATEN BATANGHARI	18.034.227,59



3	KABUPATEN BUNGO	27.392.665,87
4	KABUPATEN TEBO	6.517.758,47
5	KABUPATEN MERANGIN	15.944.252,77
6	KABUPATEN SAROLANGUN	10.836.968,74
7	KABUPATEN MUARO JAMBI	24.511.330,16
8	KABUPATEN TANJAB. BARAT	121.291.121,91
9	KABUPATEN TANJAB. TIMUR	4.048.855,32
10	KOTA SUNGAI PENUH	14.872.360,04
11	KABUPATEN KERINCI	25.316.921,79
	JUMLAH	391.859.800,99

3.e. Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2019, sebesar Rp52.803.944.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2019 (dalam rupiah)

No	KAB/ KOTA	JUMLAH
1	KOTA JAMBI	8.275.758.531,00
2	KABUPATEN BATANGHARI	5.518.381.325,00
3	KABUPATEN BUNGO	5.299.999.199,00
4	KABUPATEN TEBO	3.460.999.004,00
5	KABUPATEN MERANGIN	3.561.198.928,00
6	KABUPATEN SAROLANGUN	3.026.718.908,00
7	KABUPATEN MUARO JAMBI	5.575.365.863,00
8	KABUPATEN TANJAB. BARAT	4.807.182.129,00
9	KABUPATEN TANJAB. TIMUR	4.660.729.800,00
10	KOTA SUNGAI PENUH	3.745.323.066,00
11	KABUPATEN KERINCI	4.872.287.703,00
	JUMLAH	52.803.944.456,00

Utang Bakeuda atas Pengadaan barang/jasa non konstruksi Nomor : 027/189/PJPHP/Bakeuda.XI/2019 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp73.400.000,00

Utang Dinas Pendidikan sebesar Rp62.610.000,00 merupakan biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan RKB tahun 2018.



Utang pada Dinas PUPR sebesar sebesar Rp1.352.942.978,20 merupakan kontrak pekerjaan di Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019 yang pekerjaannya sebagian sudah dikerjakan ditahun 2019 namun belum terselesaikan dan belum dibayar sama sekali.

Utang Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa pengadaan Laptop yang mana Laptop sudah diterima dengan BAST Nomor:03/SAP-LPG/XI/2019 tanggal 14 Desember 2019 namun belum dapat dibayarkan sebesar Rp98.997.120,00.

5.3.2.1.d Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
------------------	------------------

Rp140.592.814.322,46	Rp397.334.470.376,66
----------------------	----------------------

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar

Rp140.592.814.322,46 turun sebesar Rp256.741.656.054,20 atau 64,62% dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp397.334.470.376,66. Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:

Kewajiban Penerimaan Dana Reklamasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp92.688.832.939,00. Kewajiban Penerimaan Dana Reklamasi ini merupakan Jaminan Pasca tambang yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pasca tambang di bidang pertambangan umum. Jaminan pasca tambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. Rincian dari Jaminan Pasca tambang yang disediakan oleh perusahaan pertambangan dapat dilihat pada Lampiran 32.

Setoran Ganti Rugi Tegakan dari PT WKS sebesar Rp35.591.895.904,80 yang salah setor ke Kas Daerah, seharusnya disetor ke Kas Negara.

Setoran dari PT Putra Kurnia Properti sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.487.293.750,00 (sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp5.641.125.000,00, dan tahun 2019 sebesar Rp846.168.750,00 sebagai kontribusi perjanjian kerjasama bangun guna serah pembangunan Jambi Bisnis Center. Namun perjanjian ini belum efektif berjalan karena status tanah yang dikerjasamakan masih sengketa kepemilikan dengan masyarakat.

Penambahan Jasa Giro dari PT WKS sebesar Rp5.277.994.045,25 (tahun 2014 S/d 2018 sebesar Rp4.269.950.313,21 dan tahun 2019 sebesar Rp1.008.043.732,00).

Penambahan Jasa Giro dari PT Kurnia Property sebesar Rp534.997.683,41 (sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp382.665.446,48 dan tahun 2019 sebesar Rp152.332.236,93).

Kelebihan transfer ke kas daerah sebesar Rp6.800.000,00 atas transaksi setoran Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah dari Kantor Penghubung Pemda di Jakarta tahun 2017 (seharusnya Rp500.000,00 terkirim Rp1.000.000,00) sesuai surat dari Bank Mandiri Nomor R04.Br.JCN/41/2019 tanggal 14 Februari 2018, dan Rp6.300.000 di tahun 2018

Setoran sebesar Rp5.000.000,00 a.n Yeti Suhartini atas pembayaran pelepasan hak atas tanah Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di Pakuan baru, yang mana proses pelepasan tanah tersebut dihentikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2018, dan yang bersangkutan juga sudah diberitahu tentang penghentian pelepasan hak atas tanah tersebut. Atas uang setoran tersebut pemerintah provinsi Jambi mencatat sebagai utang jangka pendek lainnya.



5.3.2.1.e Utang Lain-Lain 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp0,00

Rp0,00

Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki utang lain-lain.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp0,00Rp0,00

Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp8.530.688.465.049,08 Rp8.050.788.260.633,50

Ekuitas Tahun 2019 sebesar Rp8.530.688.465.049,08 naik sebesar Rp479.900.204.415,58 atau 5,96% jika dibanding tahun 2018 sebesar Rp8.050.788.260.633,50.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN LO 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp4.335.671.728.025,05 Rp4.429.102.691.626,36

Pendapatan-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.335.671.728.025,05 turun sebesar Rp93.430.963.601,31 atau sebesar 2,11% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp4.429.102.691.626,36. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut.

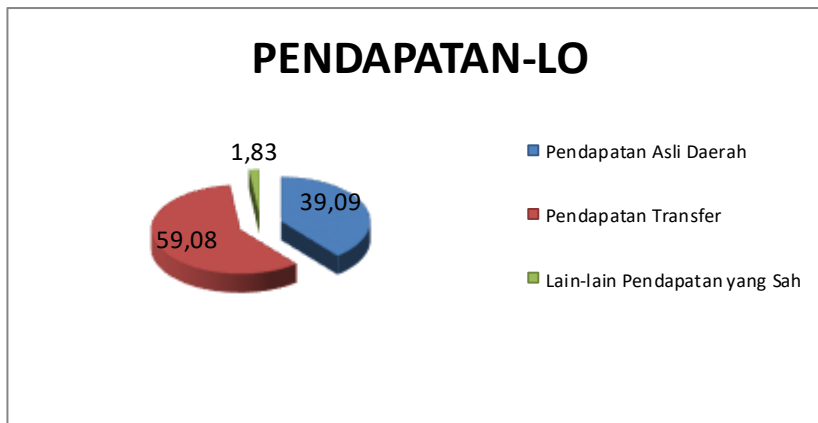
Tabel 5.67 Realisasi Pendapatan Daerah-LO Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	% Thd Total Pendapatan	Realisasi 2018
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.694.695.356.316,05	39,09	1.673.207.723.627,36
2.	Pendapatan Transfer	2.561.492.975.847,00	59,08	2.754.346.967.999,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	79.483.395.862,00	1,83	1.548.000.000,00
Jumlah		4.335.671.728.025,05	100,00	4.429.102.691.626,36

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 39,09% dan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah

sebesar 59,08% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 1,83% seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan- LO TA 2019



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 59,08% dari keseluruhan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp4.335.671.728.025,05 dan Pendapatan LRA Tahun 2019 sebesar Rp4.575.192.849.736,33 terdapat selisih sebesar Rp239.521.121.711,28, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Realisasi Pendapatan LRA dan LO Periode 2019
(dalam Rupiah)

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH
Pendapatan Asli Daerah	1.651.089.944.335,33	1.694.695.356.316,05	43.605.411.980,72
Pendapatan Pajak Daerah	1.345.106.684.308,21	1.403.278.989.024,21	58.172.304.716,00
Pendapatan Retribusi Daerah	19.109.708.620,00	19.469.093.120,00	359.384.500,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.064.882.846,62	37.179.118.725,14	6.114.235.878,52
Lain-lain PAD Yang Sah	255.808.668.560,50	234.768.155.446,70	(21.040.513.113,80)
Pendapatan Transfer	2.922.494.905.401,00	2.561.492.975.847,00	(361.001.929.554,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.896.753.806.401,00	2.535.751.876.847,00	(361.001.929.554,00)
Bagi Hasil Pajak	144.621.955.642,00	188.370.880.348,00	43.748.924.706,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	251.920.066.705,00	378.407.692.445,00	126.487.625.740,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.433.203.410.000,00	1.433.203.410.000,00	0,00

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.067.008.374.054,00	535.769.894.054,00	(531.238.480.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	25.741.099.000,00	25.741.099.000,00	0,00
Dana Penyesuaian - LRA	25.741.099.000,00	25.741.099.000,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.608.000.000,00	79.483.395.862,00	77.875.395.862,00
Pendapatan Hibah	1.608.000.000,00	79.483.395.862,00	77.875.395.862,00
Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	-	-	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Jumlah	4.575.192.849.736,33	4.335.671.728.025,05	239.521.121.711,28

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp1.694.695.356.316,05 Rp1.673.207.723.627,36

Pendapatan Asli Daerah-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.694.695.356.316,05 turun sebesar Rp21.487.632.688,69 atau sebesar 1,28% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.673.207.723.627,36. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2019 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.69 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2019 (dalam rupiah)

N o.	Uraian	Realisasi2019	% thd PAD	Realisasi2018	% thd PAD
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.403.278.989.024,21	82,80	1.381.931.751.242,31	82,59
2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.469.093.120,00	1,15	20.199.308.413,00	1,21
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	37.179.118.725,14	2,20	29.835.510.780,83	1,78

N o.	Uraian	Realisasi2019	% thd PAD	Realisasi2018	% thd PAD
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	234.768.155.4 46,70	13,8 5	241.241.153. 191,22	14,4 2
Jumlah		1.694.695.356. 316,05	100, 00%	1.673.207.72 3.627,36	100, 00%

Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.694.695.356.316,05 dan Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.651.089.944.335,33 terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp43.605.411.980,72, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA dan LO Periode 2019
(dalam rupiah)

No	Realisasi Pendapatan LRA	Realisasi Pendapatan LO	Selisih
Pendapatan Asli Daerah			
Pendapatan Pajak Daerah	1.345.106.684.30 8,21	1.403.278.989.0 24,21	58.172.304.71 6,00
Pendapatan Retribusi Daerah	19.109.708.620,0 0	19.469.093.120, 00	359.384.500,0 0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.064.882.846,6 2	37.179.118.725, 14	6.114.235.878 ,52
Lain-lain PAD Yang Sah	255.808.668.560, 50	234.768.155.446 ,70	(21.040.513.1 13,80)
Jumlah	1.651.089.944.33 5,33	1.694.695.356.3 16,05	43.605.411.98 0,72

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp1.403.278.989.024,21 Rp1.381.931.751.242,31

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.



Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 terealisasi sebesar Rp1.403.278.989.024,21 naik sebesar Rp21.347.237.781,90 atau sebesar 1,54% dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp1.381.931.751.242,31, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Periode 2018 dan 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	457.833.100.330,00	444.056.622.162,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	374.030.159.175,00	406.098.313.000,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	315.579.366.913,21	332.619.004.479,47
4.	Pajak Air Permukaan	1.503.017.937,00	1.401.946.005,00
5.	Pajak Rokok	254.333.344.669,00	197.755.865.595,84
Jumlah		1.403.278.989.024,21	1.381.931.751.242,31

Secara keseluruhan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2019 sebesar Rp1.403.278.989.024,21 dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2019 sebesar Rp1.345.106.684.308,21 sehingga terdapat selisih pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp58.172.304.716,00. Adapun selisih tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi atas pencatatan tambahan pengakuan piutang pajak rokok sebesar Rp19.028.122.447,00 berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Nomor : S-49/PK.4/2020 tanggal 23 April 2020.

Koreksi atas pencatatan tambahan pengakuan piutang pajak rokok sebesar Rp35.175.779.798,00 yang merupakan PAD pajak rokok Provinsi yang menjadi hak Kabupaten/Kota (RKUD) yang ada di provinsi Jambi berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah.

Koreksi atas pencatatan tambah pajak rokok secara bruto terhadap potongan BPJS sebesar Rp2.927.482.691,00 periode triwulan I 2019 berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Nomor. S-76/PK.3/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Koreksi atas pencatatan tambah pajak rokok secara bruto terhadap potongan BPJS sebesar Rp1.040.919.780,00 periode Desember 2018 berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Nomor. S-76/PK.3/2019 tanggal 2 Mei 2019.

5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp19.469.093.120,00 Rp20.199.308.413,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.



Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 sebesar Rp19.469.093.120,00 turun sebesar Rp730.215.293,00 atau sebesar 3,62% dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp20.199.308.413,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	1.196.035.000,00	1.243.455.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.917.312.830,00	1.592.405.000,00
3	Retribusi Laboratorium	4.488.301.644,00	4.748.608.400,00
4	Retribusi Ruangan	1.369.550.000,00	1.513.670.000,00
5	Retribusi Kendaraan Bermotor	531.003.396,00	423.804.814,00
6	Retribusi Fasilitas Pasar / Pertokoan	8.505.000,00	7.500.000,00
7	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	403.810.500,00	322.647.500,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	14.500.000,00	13.350.000,00
9	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.419.150.000,00	1.365.200.000,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi	2.992.423.000,00	3.308.063.000,00
11	Retribusi Tempat Olahraga	2.986.136.000,00	2.974.524.000,00
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.130.365.750,00	2.211.347.800,00
13	Retribusi Izin Trayek	12.000.000,00	13.500.000,00
14	Retribusi Perpanjangan IMTA	0,00	413.632.800,00
15	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	0,00	47.600.000,00
Jumlah		19.469.093.120,00	20.199.308.413,00

Secara keseluruhan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2019 sebesar Rp19.469.093.120,00 dan Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2019 sebesar Rp19.109.708.620,00 sehingga terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp359.384.500,00. Adapun selisih tersebut disebabkan sebagai berikut. Penambahan pendapatan LO yang bersumber dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu penambahan piutang Kampus IKABAMA Rp65.000.000,00 dan mutasi piutang tahun 2019 BMD sebesar Rp203.569.500,00.

Mutasi piutang Badan Penghubung Daerah sehingga mengurangi pendapatan LO sebesar Rp2.600.000,00.

Koreksi atas saldo pendapatan retribusi sebesar Rp93.415.000,00 Tahun 2019. Perbedaan realisasi pendapatan retribusi daerah-LRA dan LO diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5.73 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA dan LO Periode 2019
(dalam rupiah)

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH	KETERANGAN
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TERDIRI DARI :				

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH	KETERANGAN
A. Retribusi Jasa Umum	1.196.035.000,00	1.196.035.000,00	-	
B. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :	17.901.673.620,00	18.167.643.120,00	265.969.500,00	
1. Pemakaian atas Kekayaan Daerah	7.944.183.370,00	8.212.752.870,00	268.569.500,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.555.328.330,00	1.823.897.830,00	268.569.500,00	Penambahan pendapatan ter atas : penamba piutang IKABAMA Rp65.000.000, dan mutasi piutang tahun 2019 sebesar Rp203.569.500
Retribusi Laboratorium	4.488.301.644,00	4.488.301.644,00	-	
Retribusi Ruangan	1.369.550.000,00	1.369.550.000,00	-	
Retribusi Kendaraan Bermotor	531.003.396,00	531.003.396,00	-	
2. Pengelolaan pasar	8.505.000,00	8.505.000,00	-	
3. Retribusi Tempat Lelang	403.810.500,00	403.810.500,00	-	
4. Retribusi tempat parkir	14.500.000,00	14.500.000,00	-	
5. Retribusi tempat penginapan	1.421.750.000,00	1.419.150.000,00	(2.600.000,00)	Mutasi piutang tahun 2019, sehingga mempengaruhi pendapatan LO
6. Tempat rekreasi	5.978.559.000,00	5.978.559.000,00	-	
Retribusi Tempat Rekreasi	2.992.423.000,00	2.992.423.000,00	-	
Retribusi Tempat Olahraga	2.986.136.000,00	2.986.136.000,00	-	



URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH	KETERANGAN
7. Retribusi Produksi Usaha Daerah	2.130.365.750,00	2.130.365.750,00	-	
C. Retribusi Perizinan Tertentu	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
D. Koreksi atas Saldo Piutang Retribusi Tahun 2019	0,00	93.415.000,00	93.415.000,00	
Jumlah	19.109.708.620,00	19.469.093.120,00	359.384.500,00	

5.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp37.179.118.725,14 Rp29.835.510.780,83

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 sebesar Rp37.179.118.725,14 naik sebesar Rp7.343.607.944,31 atau 24,61% dari realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 sebesar Rp29.835.510.780,83, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74 Realisasi Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta	448.486.355,00	571.714.491,00
2	Bagi Laba penyertaan pada BPD Jambi	28.764.104.049,99	28.763.796.289,83
3	Bagi Laba atas Penyertaan Modal PT. JSMP Jambi	500.000.000,00	500.000.000,00
4	Bagi Laba atas Penyertaan Modal PT. Simota Putra Parayuda	3.077.571.160,15	0,00
5	Bagi Laba atas Penyertaan Modal PT. Eraguna Bumi Nusa	4.388.957.160,00	-
6	Bagi Laba atas penyertaan Modal pada PT. JBC	-	-
Jumlah		37.179.118.725,14	29.835.510.780,83

Secara keseluruhan Pendapatan Kekayaan Pengelolaan Daerah yang dipisahkan- LO Tahun 2019 sebesar Rp37.179.118.725,14 dan Pendapatan Kekayaan Pengelolaan Daerah yang dipisahkan-LRA Tahun 2019 sebesar Rp31.064.882.846,62 terdapat selisih pada Pendapatan Kekayaan Pengelolaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.114.235.878,52. Adapun selisih tersebut disebabkan sebagai berikut.

Penambahan pendapatan LO yang bersumber dari Piutang Kerjasama BOT Tepian Ratu (PT. Jambi Sapta Manunggal Pratama) Rp500.000.000,00. Mutasi Piutang pendapatan LO yang bersumber dari Piutang Kerjasama BOT Pembangunan WTC (PT. Simota Putra Parayudha) yaitu penambahan piutang sebesar Rp2.531.598.398,15 dan pengurangan piutang sebesar Rp1.306.319.679,63 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.225.278.718,52. Penambahan Piutang pendapatan LO yang bersumber dari Piutang Kerjasama BOT Pembangunan Angso Duo (PT. Era Guna Bumi Nusa) yaitu sebesar Rp4.388.957.160,00.

Perbedaan Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan- LRA Tahun 2019 dan LO Tahun 2019 diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5.75 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LRA dan LO Periode 2019
(dalam rupiah)

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH	KETERANGAN
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
Bank Jambi	28.764.104.049,99	28.764.104.049,99	-	
PT JSMP	-	500.000.000,00	500.000.000,00	Penambahan atas piutang tahun 2019, sehingga menambah pendapatan LO
PT Simota Putra Parayuda	1.306.319.679,63	2.531.598.398,15	1.225.278.718,52	Penambahan atas piutang tahun 2019, sehingga menambah pendapatan LO
PT Simotha Putra Parayuda	545.972.762,00	545.972.762,00	-	Penambahan atas bagi hasil tahun baku 201
PT Bangun Askrida	448.486.355,00	448.486.355,00	-	
(PT.Era Guna Bangun Nusa)	-	4.388.957.160,00	4.388.957.160,00	Penambahan atas piutang tahun 2019, sehingga

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH	KETERANGAN
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
				menambah pendapatan LO
Jumlah	31.064.882.846,62	37.179.118.725,14	6.114.235.878,52	

5.4.1.1.d Lain-lain PAD Yang Sah – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp234.768.155.446,70 Rp241.241.153.191,22

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp234.768.155.446,70 turun sebesar Rp6.472.997.744,52 atau 2,68% dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018 sebesar Rp241.241.153.191,22.

Tabel 5.76 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Periode 2019 (dalam rupiah)

N o.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	-	2.247.711.058,65
2	Penerimaan Jasa Giro	5.505.165.400,56	6.073.068.828,46
3	Pendapatan bunga	65.980.726.027,11	45.592.230.450,36
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.100.000,00	4.350.000,00
5	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	2.653.088.614,32	630.927.599,00
6	Pendapatan Denda Pajak	6.619.992.772,00	12.050.801.052,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	16.766.400,00	5.429.500,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	-	-
9	Pendapatan Zakat	-	-
10	Pendapatan BLUD	141.454.772.775,51	163.001.881.072,61
11	Pendapatan pengambilan gaji/tunjangan/Taspen	-	-
12	Pendapatan Pengembalian Setoran Pihak ke 3	-	-

N o.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Lain-lain PAD yang Sah	(14.955.617.833,80)	(6.213.568.041.93)
13	Hasil Penjualan Aset lainnya	-	628.742.000,00
14	Penerimaan Lain-lain	27.488.161.291,00	17.219.579.672,07
15	Pendapatan Uang Duka dari PT. Taspen	-	-
Jumlah		234.768.155.446,70	241.241.153.191,22

Secara keseluruhan Lain-lain PAD yang sah-LO Tahun 2019 sebesar Rp234.768.155.446,70 dan Lain-lain PAD yang sah-LRA Tahun 2019 sebesar Rp255.808.668.560,50 terdapat selisih pada Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp21.040.513.113,80. Adapun selisih tersebut berasal dari mutasi atas transaksi pada SKPKD sebesar Rp15.845.324.533,80 dan mutasi piutang atas pendapatan BLUD sebesar Rp5.195.188.580,00 sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.77 Realisasi Lain-lain PAD yang sah- LRA dan LO Periode 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH
1. Lain-lain Pendapatan yang sah pada SKPKD	109.158.707.204,99	93.313.382.671,19	(15.845.324.533,80)
1. Hasil Penjualan Tanah – LRA	0	0	-
2. Jasa Giro Kas Daerah – LRA	5.225.763.936,32	5.225.763.936,32	-
3. Jasa Giro Bendahara – LRA	249.708.099,04	249.708.099,04	-
4. Jasa Giro Bendahara BLUD	29.693.365,20	29.693.365,20	-
5. Pendapatan Bunga Deposito – LRA	65.980.726.027,11	65.980.726.027,11	-
6. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan	5.100.000,00	5.100.000,00	-

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH
Bendaharawan – LRA			
7.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan – LRA	6.366.336,00	6.366.336,00	-
8.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan – LRA	195.413.407,41	195.413.407,41	-
9.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum – LRA	2.434.225.623,91	2.434.225.623,91	-
10. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA	859.968,00	859.968,00	-
11.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LRA	16.223.279,00	16.223.279,00	-
12. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	5.976.917.690,00	5.976.917.690,00	-
13.Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	201.033.600,00	201.033.600,00	-
14.Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	435.396.912,00	435.396.912,00	-



URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH
15.Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan – LRA	6.644.570,00	6.644.570,00	-
16.Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	16.766.400,00	16.766.400,00	-
17.Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA terdiri dari :	18.310.700,00	-	(18.310.700,00)
a. Mengkoreksi Penerimaan PFK lainnya yang merupakan Penerimaan Daerah tahun 2019.	9.910.700,00	-	(9.910.700,00)
b. penambahan sewa lahan koperasi-LO	8.400.000,00		(8.400.000,00)
18.Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO terdiri dari :	-	(14.955.617.833,80)	(14.955.617.833,80)
18.1. Pengurangan Lain-Lain PAD yang sah :			
1.Pengurangan atas piutang bantuan keuangan daerah		(7.435.388.000,00)	(7.435.388.000,00)
2. Pengurangan pendapatan atas Saldo Awal Piutang samisake		(10.595.257.378,00)	(10.595.257.378,00)
Jumlah		(18.030.645.378,00)	(18.030.645.378,00)
18.2. Penambahan atas Lain-Lain PAD yang sah :			
1. Mengkoreksi Penerimaan PFK lainnya yang merupakan Penerimaan Daerah tahun 2019.		9.910.700,00	9.910.700,00



URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH
2. penambahan sewa lahan koperasi-LO		8.400.000,00	8.400.000,00
3. mutasi pendapatan piutang samisake tahun 2019		3.056.716.844,20	3.056.716.844,20
Jumlah		3.075.027.544,20	3.075.027.544,20
19.Temuan Hasil Pemeriksaan – LRA	6.359.202.075,56	6.359.202.075,56	-
20.Pengembalian Gaji/Tunjangan/Taspen – LRA	370.453.212,00	370.453.212,00	-
21.Pengembalian Setoran Pihak Ketiga – LRA	21.629.902.003,44	20.758.506.003,44	(871.396.000,00)
2. Pendapatan BLUD (RSUD, RSJ, LABKES)	146.649.961.355,51	141.454.772.775,51	(5.195.188.580,00)
RSUD			
- Pendapatan LRA	125.848.996.178,51	125.848.996.178,51	-
- Mutasi Piutang		(4.052.970.511,00)	(4.052.970.511,00)
Jumlah RSUD	125.848.996.178,51	121.796.025.667,51	(4.052.970.511,00)
RSJD			
- Pendapatan LRA	19.209.445.185,00	19.209.445.185,00	
- Mutasi Piutang		(1.142.218.069,00)	(1.142.218.069,00)
Jumlah RSJD	19.209.445.185,00	18.067.227.116,00	(1.142.218.069,00)
c. Labkesda	1.591.519.992,00	1.591.519.992,00	
Jumlah	255.808.668.560,50	234.768.155.446,70	(21.040.513.113,80)



5.4.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp2.561.492.975.847,00 Rp2.754.346.967.999,00

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2019 adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.561.492.975.847,00. Realisasi Tahun Anggaran 2019 tersebut turun sebesar Rp192.853.992.152,00 atau 7,00% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.754.346.967.999,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.78 Pendapatan Transfer -LO Provinsi Jambi Periode 2019
(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.535.751.876.847,00	99,00	2.745.221.967.999,00	99,67
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	25.741.099.000,00	1,00	9.125.000.000,00	0,33
Jumlah		2.561.492.975.847,00	100,00	2.754.346.967.999,00	100,00

5.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp2.535.751.876.847,00 Rp2.745.221.967.999,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.535.751.876.847,00 turun sebesar Rp209.470.091.152,00 atau 7,63% dibanding dengan Tahun 2018 sebesar Rp2.745.221.967.999,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	BagiHasilPajak	188.370.880.348,00	168.557.795.503,00
2.	BagiHasilBukanPajak/SDA	378.407.692.445,00	238.247.178.484,00
3.	Dana AlokasiUmum	1.433.203.410.000,00	1.399.367.134.000,00
4.	Dana AlokasiKhusus	535.769.894.054,00	939.049.860.012,00
Jumlah		2.535.751.876.847,00	2.745.221.967.999,00

Secara keseluruhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2019 sebesar Rp2.535.751.876.847,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA Tahun 2019 sebesar Rp2.896.753.806.401,00 terdapat selisih sebesar Rp361.001.929.554,00. Adapun selisih tersebut disebabkan sebagai berikut.

Penerimaan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp43.748.924.706,00 diakui sebagai piutang, yang terdiri dari :

PMK No.20/PMK.07/2020 Dana bagi Hasil pajak Atas PBB sebesar Rp16.456.214.223,00

PMK No.36 Tahun 2020-PPh Pasal 21 & 25/29 sebesar Rp11.077.237.680,00

PMK No. 20 tahun 2020-Piutang CHT sebesar Rp59.634.316,00

PMK No.20 Tahun 2020-PPh Pasal 25/29 sebesar Rp665.685.422,00

PMK N0.36 Tahun 2020 Bagi hasil Pajak PBB sebesar Rp15.490.153.065,00

Penerimaan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp126.487.625.740,00 diakui sebagai piutang, yang terdiri dari :

PMK No.36 Tahun 2020-SDA Kehutanan sebesar Rp848.859.274,00

PMK No.36 Tahun 2020-Bagi Hasil Bukan Pajak-SDA Migas sebesar Rp15.529.084.192,00

PMK No.36 tahun 2020-Bagi Hasil Bukan Pajak-SDA Minerba-Landrent sebesar Rp182.563.110,00

PMK No.36 Tahun 2020-SDA Minerba-Royalti sebesar Rp3.386.382.824,00

PMK No.20 Tahun 2020-Kehutanan sebesar Rp1.832.154.545,00

PMK No.20 Tahun 2020-Gas Bumi sebesar Rp68.503.482.331,00

PMK No.20 Tahun 2020-Minyak Bumi sebesar Rp22.035.759.476,00

PMK No.20 Tahun 2020-Landrent sebesar Rp13.706.829,00

PMK No.20 Tahun 2020-Royalti sebesar Rp14.155.633.159,00

Penerimaan transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK) mengeluarkan Pengakuan Pendapatan Transfer BOS dan Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kab/Kota sesuai Buletin Teknis 21 sebesar Rp531.238.480.000,00.

Tabel 5.79.1 Realisasi Pendapatan Transfer - LRA dan LO Periode 2019

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
Bagi Hasil Pajak	144.621.955.642,00	188.370.880.348,00	43.748.924.706,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	251.920.066.705,00	378.407.692.445,00	126.487.625.740,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.433.203.410.000,00	1.433.203.410.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.067.008.374.054,00	535.769.894.054,00	(531.238.480.000,00)
Jumlah	2.896.753.806.401,00	2.535.751.876.847,00	(361.001.929.554,00)

5.4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya– LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp25.741.099.000,00 Rp9.125.000.000,00



Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp25.741.099.000,00 atau sebesar 182,09% dari realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 naik sebesar Rp16.616.099.000,00 dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp9.125.000.000,00.

5.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp79.483.395.862,00 Rp1.548.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp79.483.395.862,00 naik sebesar 77.935.395.862,00 atau sebesar 5.034,59% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.548.000.000,00. Realisasi Lain - lain Pendapatan yang Sah tersebut didalamnya adalah pendapatan hibah dari Jasa Raharja sebesar Rp1.608.000.000,00 dan pendapatan hibah yang bersumber dari hibah aset atas Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp77.875.395.862,00. Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO Tahun 2019 sebesar Rp79.483.395.862,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA Tahun 2019 sebesar Rp1.608.000.000,00 terdapat selisih pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp77.875.395.862,00.

5.4.3.1 Pendapatan Hibah – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp79.483.395.862,00 Rp1.548.000.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2019 sebesar Rp79.483.395.862,00 naik sebesar Rp77.935.395.862,00 atau sebesar 5.034,59% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.548.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.80 Pendapatan Hibah Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	1.608.000.000,00	1.548.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Kementrian/Lembaga	77.875.395.862,00	
Jumlah		79.483.395.862,00	1.548.000.000,00

Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO Tahun 2019 sebesar Rp79.483.395.862,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA Tahun 2019 sebesar Rp1.608.000.000,00. Terdapat selisih pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp77.875.395.862,00. Adapun selisih tersebut disebabkan sebagai berikut.

Pencatatan Pendapatan Hibah Aset Kendaraan Bermotor, Gedung, Bangunan Irigasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.211.989.324,00.

Pencatatan Pendapatan Hibah Aset Lain-lain (Software) dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp28.994.319,00.

Mencatat pendapatan hibah alat kantor dari Kemenaker sebesar Rp1.792.656.320,00.

Mencatat pendapatan hibah dari BNPB berupa mesin pompa apung dan karhutla sebesar Rp479.930.000,00.

Mencatat pendapatan hibah dari Alat Kantor dari Kantor Dinas Kehutanan sebesar Rp626.560.900,00.

Mencatat pendapatan hibah dari Alat Kantor (Light Tower Portable) dari BNPB sebesar Rp251.350.000,00.

Mencatat pendapatan hibah dari Alat Kantor (alat keamanan) dari Kantor BNPB sebesar Rp955.977.000,00.

Mencatat pendapatan hibah dari Kantor Tanaman Pangan sebesar Rp26.334.360.576,00.

Mencatat pendapatan hibah dari RSJ sebesar Rp15.566.897.500,00.

Mencatat pendapatan hibah dari Perpustakaan Nasional sebesar Rp57.800.000,00.

Mencatat pendapatan hibah dari RSUD sebesar Rp9.788.484.688,00.

Mencatat pendapatan hibah tanah dari Kab.Merangin (Tanah SMAN SMKN SLB) sebesar Rp4.950.955.194,00.

Mencatat pendapatan hibah alat angkutan Roda 2 dari KKP Sem 2 sebesar Rp69.850.000,00.

Mencatat pendapatan hibah alat pertanian dari KKP Sem 2 sebesar Rp189.368.000,00.

Mencatat pendapatan hibah alat kantor dari KKP Sem 2 sebesar Rp534.460.000,00.

Mencatat pendapatan hibah alat kedokteran dari KKP Sem 2 sebesar Rp10.620.000,00.

Mencatat pendapatan hibah alat laboratorium dari KKP Sem 2 sebesar Rp36.000.000,00.

Mencatat pendapatan hibah Bangunan gedung dari KKP Sem 2 sebesar Rp1.318.953.691,00.

Mencatat pendapatan hibah bangunan monumen dari KKP Sem 2 sebesar Rp163.814.600,00.

Mencatat pendapatan hibah jalan dan jembatan dari KKP Sem 2 sebesar Rp364.880.250,00.

Mencatat pendapatan hibah bangunan air irigasi KKP Sem 2 sebesar Rp3.646.962.500,00.

Mencatat pendapatan hibah Gedung Bangunan dari BPBD sebesar Rp1.389.162.000,00.

Mencatat pendapatan hibah peralatan mesin dari BPBD Sebesar Rp207.075.000,00.

Mencatat pendapatan hibah peralatan mesin dari BPBD sebesar Rp3.083.660.000,00.

Mencatat pendapatan hibah dari Dishub sebesar Rp3.537.000.000,00.

Mencatat pendapatan hibah dari RRI sebesar Rp277.634.000,00.

5.4.3.2 Pendapatan Lainnya – LO



31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp0,00Rp0,00

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2019 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2018 sebesar Rp0,00. Secara keseluruhan Pendapatan lainnya – LRA dan LO Tahun Anggaran 2019 Nihil.

5.4.4 BEBAN

31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp3.873.717.461.732,55 Rp3.796.302.233.200,48

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.873.717.461.732,55,,naik 2,04% atau sebesar Rp77.415.228.532,07 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp3.796.302.233.200,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73 Realisasi Beban Provinsi Jambi Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Operasi	3.063.663.006.125,67	3.116.406.690.112,58
2	Beban Transfer	810.054.455.606,88	679.895.543.087,90
Jumlah		3.873.717.461.732,55	3.796.302.233.200,48

5.4.4.1. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2019 sebesar Rp3.063.663.006.125,67 turun 1,69% atau sebesar Rp52.743.683.986,91 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp3.116.406.690.112,58 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74 Realisasi Beban Operasi Provinsi Jambi Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Beban Operasi	Jumlah 2019	Jumlah 2018
1	Beban Pegawai	1.382.612.319.837,00	1.304.348.986.013,66
2	Beban Persediaan	160.510.384.052,81	217.929.952.513,40
3	Beban Jasa	601.025.093.852,33	529.589.354.503,40
4	Beban Pemeliharaan	51.826.354.043,73	48.243.770.973,30
5	Beban Perjalanan Dinas	196.920.070.945,00	165.621.246.557,00
6	Beban Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00
7	Beban Hibah	160.326.682.562,96	487.359.693.428,00

No	Beban Operasi	Jumlah 2019	Jumlah 2018
8	Beban Bantuan Sosial	5.059.511.054,00	7.760.541.266,84
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	481.089.971.242,51	350.081.997.854,08
10	Beban Penyisihan Piutang	- 1.251.215.797,47	4.971.147.002,90
11	Beban Lain-lain	25.043.834.332,80	0,00
Jumlah Beban Operasi		3.063.663.006.125,67	3.116.406.690.112,58

5.4.4.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp1.382.612.319.837,00 naik sebesar Rp78.263.333.823,34 atau 6,00% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp1.304.348.986.013,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76 Realisasi Beban Pegawai Provinsi Jambi Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	771.834.512.284,00	749.134.278.914,14
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	406.463.950.853,00	298.718.646.677,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH WKDH-LO	11.915.350.000,00	10.670.010.641,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	29.963.696.063,00	34.061.640.708,00
5	Beban Belanja Pegawai BLUD	0,00	65.763.849.573,52
	Beban Honorarium Operator LPPK dan Teppra	0,00	560.000.000,00
6	Beban Tunjangan Profesi Guru	158.582.362.637,00	145.073.559.800,00

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
8	Beban Tunjangan Penghasilan Guru	3.610.000.000,00	329.012.500,00
9	Beban Tunjangan Khusus Guru	242.448.000,00	37.987.200,00
Jumlah Beban Pegawai		1.382.612.319.837,00	1.304.348.986.013,66

Tidak terdapat perbedaan antara Beban Pegawai LO TA 2019 dan Belanja Pegawai LRA TA 2019.

5.4.4.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2019 sebesar Rp160.461.904.052,81 turun sebesar Rp57.468.048.460,59 atau 26,37% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp217.929.952.513,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Realisasi Beban Persediaan Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Bahan Pakai Habis	42.840.128.093,53	45.644.019.814,85
2	Beban Persediaan Bahan/Material	54.478.619.966,55	51.411.461.118,55
3	Beban Cetak dan Penggandaan	17.928.695.160,00	16.135.007.147,00
4	Beban Makanan dan Minuman	60.630.914.709,00	59.755.085.314,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	6.096.924.370,00	5.432.889.200,00
6	Beban Pakaian Kerja	1.222.841.560,00	1.145.248.820,00
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.807.554.822,00	3.127.658.100,00
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-26.543.774.628,27	35.278.582.999,00
Jumlah Beban Persediaan		160.461.904.052,81	217.929.952.513,40

5.4.4.3 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2019 sebesar Rp601.073.573.852,33 naik sebesar Rp71.484.219.348,93 atau 13,50% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp529.589.354.503,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78 Realisasi Beban Jasa Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Jasa Kantor	125.762.705.222,11	137.801.445.288,00
2	Beban Premi Asuransi	19.736.510.713,06	6.240.678.625,08

3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.078.566.014,00	3.605.605.198,00
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	17.378.533.700,00	12.904.930.000,00
5	Beban Sewa Alat Berat	649.000.000,00	0,00
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.892.873.000,00	6.464.051.850,00
7	Beban Jasa Konsultasi	14.692.269.683,00	6.569.614.908,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	877.750.000,00	1.426.547.500,00
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.375.838.899,00	4.074.579.050,00
10	Beban Honorarium PNS	18.363.122.881,00	19.563.438.082,00
11	Beban Honorarium Non PNS	111.800.116.315,00	89.994.104.750,00
12	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	61.609.735.906,84	3.503.850.000,00
13	Beban Barang Dana BOS	113.702.045.089,00	150.460.067.792,00
14	Beban Jasa Iuran	634.560.000,00	96.400.000,00
15	Beban Perlengkapan/Peralatan Kantor	283.043.444,00	680.196.820,00
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	85.074.492.985,32	70.656.254.640,32
17	Beban Bea siswa Pendidikan	14.192.500.000,00	14.697.240.000,00
18	Beban Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis	921.430.000,00	850.350.000,00
19	Beban Perlengkapan/Peralatan Olagraga	48.480.000,00	0,00
	Jumlah Beban Jasa	601.073.573.852,33	529.589.354.503,40

5.4.4.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 sebesar Rp51.826.354.043,73 naik sebesar Rp3.582.583.070,43 atau 7,43% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp48.243.770.973,30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79 Realisasi Beban Pemeliharaan Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	19.865.974.987,00	21.186.377.754,00
2	Beban Pemeliharaan	31.960.379.056,73	27.057.393.219,30
	Jumlah Beban Pemeliharaan	51.826.354.043,73	48.243.770.973,30

5.4.4.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 sebesar Rp196.920.070.945,00 naik sebesar Rp31.298.824.388,00 atau 18,90% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp165.621.246.557,00.

Belanja Barang dan Jasa LRA TA 2019 di sajikan sebesar

Rp1.024.032.706.551,84 sedangkan pada LO disajikan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.010.281.902.893,87 yang terdiri dari : Beban Persediaan sebesar Rp160.461.904.052,81, Beban Jasa sebesar Rp601.073.573.852,33, Beban Pemeliharaan sebesar Rp51.826.354.043,73 dan Beban Perjalan Dinas sebesar Rp196.920.070.945,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp13.750.803.657,97 yang berasal dari :

Terdapat selisih Rp19.050.000 antara LRA dan LO atas Belanja Barang Jasa yang tercatat di Belanja Hibah.

Penambahan Beban sebesar Rp267.673.666.536,03 yang berasal dari:

Pengakuan Hutang Tahun 2019 Rp30.309.171.215,63

Penggunaan Persediaan Tahun Tahun 2018 Rp236.520.682.507,89

Saldo Asuransi Tahun sebelumnya yang jatuh tempo Rp843.812.812,51.

Pengurangan Beban sebesar (Rp281.443.520.194,00) yang berasal dari:

Pengakuan saldo Persediaan 2019 (Rp271.081.546.172,44)

Asuransi Tahun 2019 yang belum Jatuh Tempo (Rp845.725.257,05)

Pelunasan utang barang dan jasa berupa listrik, air dan telepon Tahun 2018 (Rp8.547.468.564,51)

Reklas ke Aset Tetap terkait kapitalisasi (Rp968.780.200,00).

5.4.4.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2019 sebesar Rp500.000.000,00 merupakan subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya. Beban Subsidi Tahun 2019 ini sama dengan Beban Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp500.000.000,00. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Subsidi pada LO Tahun 2019 dengan Belanja Subsidi pada LRA Tahun 2019.

5.4.4.7 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2019 sebesar Rp160.326.682.562,96 turun sebesar Rp327.033.010.865,04 atau 67,10% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp487.359.693.428,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80 Realisasi Beban Hibah Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah	19.311.714.581,00	0.00
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	14.339.312.356,96	0.00
3	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	96.230.801.425,00	15.762.413.428,00

4	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan dasar	0.00	471.597.280.000,00
5	Beban Hibah kepada pihak ketiga	30.444.854.200,00	0.00
Jumlah Beban Hibah		160.326.682.562,96	487.359.693.428,00

Beban Hibah pada LO TA 2019 tersaji sebesar Rp160.326.682.562,96 sedangkan Belanja Hibah pada LRA TA 2019 tersaji sebesar Rp672.272.497.981,96 sehingga terdapat selisih sebesar Rp511.945.815.419,00 yang berasal dari : Hibah Barang Kepada Pemerintah sebesar Rp19.311.714.581,00. Reklas Beban Hibah terkait BOS ke Pendapatan Transfer –LO sesuai Buletin Teknis 21 sebesar (Rp531.238.480.000,00).

5.4.4.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar Rp5.059.511.054,00 merupakan bantuan sosial kepada masyarakat dan Bantuan Sosial yang Tidak Di rencanakan. Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 turun sebesar Rp2.701.030.212,84 atau 34,80% dibandingkan Tahun 2018 Beban Bantuan Sosial sebesar Rp7.760.541.266,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Realisasi Beban Bansos Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	7.642.341.266,84
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	283.200.500,00	118.200.000,00
3	Beban Bantuan Sosial yang Tidak Di rencanakan	4.776.310.554,00	0,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial		5.059.511.054,00	7.760.541.266,84

Beban Bantuan Sosial pada LO TA 2019 tersaji sebesar Rp5.059.511.054,00 sedangkan Belanja Bantuan Sosial pada LRA tersaji sebesar Rp283.200.500,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.776.310.554,00 yang berasal dari Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan berupa potongan BPJS atas Pajak Rokok sebesar Rp3.968.402.471,00 berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Nomor S-76/PK.3/2019 tanggal 2 Mei 2019 dan sebesar Rp807.908.083,00 berdasarkan S-49/PK.4/2019 tanggal 23 April 2020.

5.4.4.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 sebesar Rp481.089.971.242,51 naik sebesar Rp131.007.973.388,43 atau 37,42% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp350.081.997.854,08 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	110.096.185.025,70	86.354.838.171,12
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.992.488.586,94	27.785.101.557,76
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	339.430.372.108,62	235.324.158.610,53
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.188.000,00	0,00
5.	Beban Penyusutan aset lainnya	3.372.288.846,25	204.952.438,00
6.	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	197.448.675,00	412.947.076,67
Jumlah		481.089.971.242,51	350.081.997.854,08

Tabel 5.83 Realisasi Beban Penyusutan OPD
Provinsi Jambi Periode 2019
(dalam rupiah)

No	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
1.	Dinas Pendidikan	22.128.037.580,59	13.392.483.959,68	145.322.610,32	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	1.613.190.036,23	475.665.607,08	83.787.092,47	0,00	2.508.000,00
3.	Rumah Sakit Daerah	33.824.870.234,63	2.851.332.450,47	319.401.882,76	0,00	0,00
4.	Rumah Sakit Jiwa	2.223.651.518,10	1.292.605.714,30	190.638.847,88	0,00	0,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	7.555.514.218,68	1.182.876.526,26	324.149.679,671,98	0,00	0,00
6.	Badan Kesbangpol	200.694.596,57	16.673.992,72	1.676.425,00	0,00	0,00
7.	Satpol PP	639.468.422,29	24.744.952,24	3.313.971,26	0,00	0,00
8.	Dinas Sosial DUKCAPIL	538.754.939,27	240.872.731,78	10.108.562,83	0,00	0,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana	4.460.563.697,61	272.252.708,18	7.378.544,16	0,00	0,00

N o	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
10.	Dinas Nakertrans	2.628.274.726,26	129.833.703,62	300.000,00	0,00	0,00
11.	Dinas Perbendayaan Perempuan, PA dan PP	140.836.011,57	13.255.760,00	400.000,00	0,00	0,00
12.	Dinas Ketahanan Pangan	175.193.050,39	12.517.100,00	1.376.287,50	0,00	46.000.000,00
13.	BLHD	1.256.757.958,96	126.412.352,13	13.144.283,34	0,00	0,00
14.	Dinas Perhubungan	2.801.398.552,74	180.678.824,18	2.114.571.484,01	1.188.000,00	0,00
15.	Dinas Kominfo	986.928.832,73	8.098.520,00	16.815.072,95	0,00	0,00
16.	Dinas Koperasi	816.922.467,17	204.621.463,72	12.385.265,34	0,00	940.376,79
17.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	336.781.162,04	70.878.687,84	0,00	0,00	0,00
18.	Dispora	626.800.481,31	722.911.023,58	3.727.440,00	0,00	0,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	807.412.496,58	292.165.378,82	13.100.984,20	0,00	0,00
20.	Dinas Perpustakaan	584.895.253,73	51.040.350,00	14.868.888,90	0,00	0,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.767.945.467,61	-418.244.240,29	499.067.775,95	0,00	0,00
22.	Dinas Tanaman Pangan	5.112.003.381,10	1.319.781.953,65	170.109.086,56	0,00	0,00
23.	Dinas Perkebunan	856.932.237,69	73.871.075,00	2.141.133.045,80	0,00	0,00
24.	Dinas Kehutanan	2.137.500.124,12	330.798.367,01	207.980.804,76	0,00	0,00
25.	Dinas ESDM	519.336.947,53	35.841.317,26	9.124.586.639,10	0,00	0,00

N o	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
26.	Dinas Perindag	824.395.220,87	163.570.682,81	3.230.300,00	0,00	0,00
27.	Sekretariat DPRD	2.972.503.035,69	632.102.653,52	437.500,00	0,00	15.676.888,89
28.	Biro Pemerintahan	42.726.801,33	0		0,00	0,00
29.	Biro Kesramas	42.391.368,00	0		0,00	0,00
30.	Biro Perekonomian dan SDA	47.344.901,53	0		0,00	0,00
31.	Biro Pemb dan Kerjasama	89.801.909,00	0		0,00	0,00
32.	Biro Umum	3.165.602.211,99	1.133.042.322,06	84.518.167,46	0,00	3.293.702.800,57
33.	Biro Humas dan Protokol	163.497.269,33	0	900.000,00	0,00	0,00
34.	Biro PBMD	947.119.031,59	998.899.986,03	1.701.145,00	0,00	0,00
35.	Biro Hukum	43.310.048,56	0		0,00	0,00
36.	Biro Organisasi	52.822.482,17	0		0,00	0,00
37.	Badan Penghubung	710.482.227,52	909.854.120,54	6.833.000,00	0,00	0,00
38.	Inspektorat	535.888.872,55	88.714.189,21	499.250,00	0,00	0,00
39.	Bappeda	478.128.712,98	59.419.424,17	25.666.966,67	0,00	0,00
40.	Bakeuda	2.819.467.694,13	719.138.156,15	27.555.033,76	0,00	13.460.780,00
41.	Bakeuda SKPKD	0	0	00,00	0,00	0,00
42.	Badan Kepegawaian Daerah	301.509.074,63	22.063.061,60	1.239.550,00	0,00	0,00
43.	BPSDM	936.021.962,20	361.713.711,62	32.916.528,67	0,00	0,00
44.	Balitbangda	182.507.806,13	0	0	0,00	0,00

N o	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
	Jumlah	110.096.185 .025,70	27.992.488. 586,94	339.430.372 .108,62	1.188.00 0,00	3.372.288.8 46,25

Tabel 5.84 Realisasi Beban Penyusutan OPD
Provinsi Jambi Periode 2018
(dalam rupiah)

N o	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
1.	Dinas Pendidikan	- 10.298.720. 979,39	12.484.255. 444,53	212.687.094 ,09	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	2.910.685.7 29,55	455.667.626 ,81	81.911.231, 36	0,00	0,00
3.	Rumah Sakit Daerah	36.510.308. 469,94	2.439.790.9 78,61	130.315.326 ,99	0,00	0,00
4.	Rumah Sakit Jiwa	2.266.167.5 66,30	1.196.004.2 66,52	189.402.462 ,93	0,00	0,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	8.718.090.9 81,39	1.124.048.6 08,04	223.848.428 .696,29	0,00	0,00
6.	Badan Kesbangpol	325.625.600 ,00	16.467.710, 72	1.676.425,0 0	0,00	0,00
7.	Satpol PP	427.344.174 ,75	24.744.952, 24	3.313.971,2 6	0,00	0,00
8.	Dinas Sosial DUKCAPIL	401.035.986 ,20	256.944.853 ,34	4.089.197,8 2	0,00	0,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana	4.627.730.3 76,20	44.989.125, 00	7.378.544,1 6	0,00	0,00
10.	Dinas Nakertrans	807.698.625 ,36	112.209.934 ,36	300.000,00	0,00	0,00
11.	Dinas Perbendaharaan Perempuan, PA dan PP	222.239.229 ,54	13.255.760, 00	400.000,00	0,00	0,00



N o	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
1 2.	Dinas Ketahanan Pangan	143.918.994 ,48	12.517.100, 00	1.376.287,5 0	0,00	0,00
1 3.	BLHD	1.192.530.2 33,32	117.251.564 ,16	13.144.283, 34	0,00	0,00
1 4.	Dinas Perhubungan	1.480.490.5 69,19	511.439.227 ,23	4.869.105.7 53,02	0,00	0,00
1 5.	Dinas Kominfo	1.347.282.6 92,04	8.676.520,0 0	11.012.981, 35	0,00	0,00
1 6.	Dinas Koperasi	530.139.840 ,00	185.856.302 ,93	12.385.265, 34	0,00	0,00
1 7.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	468.870.522 ,62	69.483.419, 10	0,00	0,00	204.952.438 ,00
1 8.	Dispora	613.259.988 ,57	820.517.071 ,32	3.727.440,0 0	0,00	0,00
1 9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.401.327.3 75,01	280.033.662 ,68	12.177.234, 20	0,00	0,00
2 0.	Dinas Perpustakaan	770.668.899 ,44	51.040.350, 00	14.868.888, 90	0,00	0,00
2 1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.213.048.4 85,58	731.851.783 ,07	398.518.815 ,86	0,00	0,00
2 2.	Dinas Tanaman Pangan	3.254.268.9 37,73	1.182.824.8 44,89	161.307.588 ,50	0,00	0,00
2 3.	Dinas Perkebunan	876.302.627 ,53	43.606.693, 33	2.130.054.5 20,80	0,00	0,00
2 4.	Dinas Kehutanan	8.697.149.0 68,69	693.368.993 ,64	252.718.266 ,26	0,00	0,00
2 5.	Dinas ESDM	563.438.813 ,12	40.640.918, 67	2.783.162.3 13,59	0,00	0,00
2 6.	Dinas Perindag	856.908.316 ,22	242.226.792 ,87	3.230.300,0 0	0,00	0,00
2 7.	Sekretariat DPRD	3.275.248.7 69,77	561.121.636 ,77	247.000,00	0,00	0,00
2 8.	Biro Pemerintahan	23.656.800, 00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
29.	Biro Kesramas	72.343.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Biro Perekonomian dan SDA	38.357.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Biro Pemb dan Kerjasama	46.022.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Biro Umum	4.676.450.479,66	1.133.042.322,06	84.518.167,46	0,00	0,00
33.	Biro Humas dan Protokol	117.392.050,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
34.	Biro PBMD	992.346.608,52	885.735.491,75	1.283.671,25	0,00	0,00
35.	Biro Hukum	50.344.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Biro Organisasi	63.511.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Badan Penghubung	657.666.715,06	909.854.120,54	6.833.000,00	0,00	0,00
38.	Inspektorat	445.868.240,50	87.657.817,54	499.250,00	0,00	0,00
39.	Bappeda	534.446.749,07	64.352.317,21	22.179.050,00	0,00	0,00
40.	Bakeuda	2.557.981.252,49	644.512.106,66	27.555.033,76	0,00	0,00
41.	Bakeuda SKPKD	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
42.	Badan Kepegawaian Daerah	300.363.629,68	15.021.440,76	1.239.550,00	0,00	0,00
43.	BPSDM	969.377.287,13	324.089.800,41	32.460.999,50	0,00	0,00
44.	Balitbangda	205.649.225,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	86.354.838.171,12	27.785.101.557,76	235.324.158.610,53	0,00	204.952.438,00

Tabel 5.85 Realisasi Beban Amortisasi per OPD Provinsi Jambi Periode 2018 (dalam rupiah)

No.	OPD	Beban Amortisasi TA 2019	Beban Amortisasi TA 2018
-----	-----	--------------------------	--------------------------

1.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	5.016.000,00
3.	Rumah Sakit Daerah	13.820.000,00	21.105.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	90.220.000,00
5.	Dinas Sosial Dukcapil	290.028,33	0,00
6.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
7.	Dinas Kominfo	41.909.480,00	234.964.000,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	39.715.000,00	38.000.000,00
9.	Biro Pemb dan Kerjasama	0,00	11.424.160,00
10.	Biro Umum	22.605.000,00	11.302.500,00
11.	Biro PBMD	10.985.000,00	915.416,67
12.	Biro Hukum	0,00	0,00
13.	Bappeda	11.436.666,67	0,00
14.	Badan keuangan daerah	56.687.500,00	0,00
	Jumlah	197.448.675,00	412.947.076,67

5.4.4.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 sebesar (Rp1.251.215.797,47) merupakan penyisihan piutang Provinsi Jambi yang terdapat pada 7 OPD, turun sebesar Rp6.222.362.800,37 atau 125,17% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp4.971.147.002,90 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85 Rincian Beban Penyisihan Piutang Per OPD Periode 2019 (dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	
		Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	(19.567.866,05)	8.474.993,59
2.	Rumah Sakit Jiwa	(5.711.090,35)	9.596.750,43
3.	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00
4.	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	(1.458.521.341,07)	4.965.271.758,88
5.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	235.334.500,00	(7.646.500,00)
6.	Badan Penghubung Daerah	(2.600.000,00)	(4.700.000,00)
7.	Dinas Perhubungan	(150.000,00)	150.000,00
	JUMLAH	(1.251.215.797,47)	4.971.147.002,90

5.4.4.11 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun 2019 sebesar Rp25.043.834.332,80 merupakan penyisihan piutang Provinsi Jambi yang terdapat pada 33 OPD yaitu beban atas Belanja



modal yang tidak bisa masuk ke neraca ataupun ke daftar Barang Milik Daerah (Buku Inventaris) karena nilai satuan barangnya dibawah kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan Tahun 2018 tidak ada anggaran maupun realisasi Beban Lain-lain, sehingga naik Rp25.043.834.332,80 atau 100% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86 Rincian Beban Lain-lain Per OPD Periode 2019
(dalam rupiah)

No	OPD	Beban Lain-lain 2019
1.	Dinas Pendidikan	12.738.308.927,04
2.	Dinas Kesehatan	70.939.099,00
3.	Rumah Sakit Daerah	839.085.584,10
4.	Rumah Sakit Jiwa	85.377.533,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	5.627.885.280,00
6.	Dinas Sosial Dukcapil	16.935.000,00
7.	Dinas Nakertrans	247.421.490,00
8.	Dinas Perbendayaan Perempuan, PA dan PP	3.106.700,00
9.	Dinas Perhubungan	2.805.405.800,00
10.	Dinas Kominfo	20.995.000,00
11.	Dinas Koperasi	3.650.000,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	26.080.000,00
13.	Dispora	5.550.000,00
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	135.395.636,00
15.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	51.960.400,00
16.	Dinas Perkebunan	18.000.550,00
17.	Dinas Kehutanan	31.595.200,00
18.	Dinas Perindag	9.100.000,00
19.	Sekretariat DPRD	7.450.000,00
20.	Biro Pemerintahan dan Otda	1.000.000,00
21.	Biro Kesramas	1.980.000,00
22.	Biro Perekonomian dan SDA	2.000.000,00
23.	Biro Umum	30.408.000,03
24.	Biro Humas dan Protokol	5.940.000,00
25.	Biro PBMD	18.882.138,63
26.	Biro Organisasi	1.000.000,00
27.	Badan Penghubung	24.592.000,00
28.	Inspektorat	29.092.600,00
29.	Bakeuda	179.443.045,00
30.	Bakeuda (SKPKD)	1.965.429.800,00
31.	Badan Kepegawaian Daerah	14.095.550,00
32.	BPSDM	14.949.000,00

No	OPD	Beban Lain-lain 2019
33.	Balitbangda	10.780.000,00
	Jumlah	25.043.834.332,80

5.4.4.12 Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer Tahun 2019 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp810.054.455.606,88, naik sebesar Rp130.158.912.518,98 atau 19,14% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp679.895.543.087,90 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87 Rincian Beban Transfer Periode 2019
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	
		Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab/Kota	644.587.955.606,88	579.768.148.687,90
2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	81.526.500.000,00	14.126.500.000,00
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.940.000.000,00	83.940.000.000,00
4.	Beban Transfer Bantuan kepada Partai Politik	0,00	2.060.894.400,00
5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	0,00	0,00
JUMLAH		810.054.455.606,88	679.895.543.087,90

Perbedaan realisasi sebesar Rp68.019.171.593,84 antara Belanja Transfer pada LRA sebesar Rp878.073.627.200,72 dengan Beban Transfer LO sebesar Rp810.054.455.606,88 terdapat pada :

Koreksi Beban Transfer Kurang Salur bagi hasil pajak Tahun 2018 sebesar (Rp290.942.980.974,38) yang tidak menjadi beban Tahun berjalan.

Penambahan utang beban kurang salur bagi hasil pajak Tahun 2019 Rp224.889.234.180,54.

Reklas Beban yang berasal dari Belanja Transfer Bantuan Kepada Partai Politik pada LRA sebesar (Rp1.965.424.800,00) ke beban lain-lain sesuai dengan SAP 02 dan Buletin Teknis No.4.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Jumlah Surplus untuk Tahun 2019 dari Operasi sebesar Rp461.954.266.292,50 turun sebesar Rp170.846.192.133,38 atau 27% dibandingkan Tahun 2018 Rp632.800.458.425,88.

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Surplus untuk Tahun 2019 dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp33.765.520.122,71 naik sebesar Rp33.765.520.122,71 atau 100% dibandingkan Tahun 2018 Rp0,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019

sebesar Rp33.765.520.122,71 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp41.209.932.105,45 dan Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp7.444.411.982,74.

5.4.7 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus untuk Tahun 2019 sebelum pos Luar Biasa sebesar Rp495.719.786.415,21 turun sebesar Rp137.080.672.010,67 atau 21,66% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp632.800.458.425,88.

5.4.8 POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa Tahun 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan 2018 Rp0,00. Beban Luar Biasa untuk Tahun 2019 tersaji sebesar Rp91.193.409,97 turun sebesar (Rp5.488.781,80) atau 5,68% dibandingkan Tahun 2018 Rp96.682.191,77. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Luar Biasa pada LO Tahun 2019 dengan Belanja Tak Terduga pada LRA Tahun 2019.

SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus LO untuk Tahun 2019 Rp495.628.593.005,24 turun sebesar Rp137.075.183.228,87 atau 21,66% dibandingkan Tahun 2018 Rp632.703.776.234,11.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 201	31 Desember 2018
Rp570.667.756.558,19	Rp1.002.718.779.544,95

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp570.667.756.558,19 turun sebesar Rp432.051.022.986,76 atau sebesar 43,08% dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp1.002.718.779.544,95. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Rincian Arus kas dari aktivitas operasi TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2019	Tahun 2018
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	1.345.106.684.308,21	1.374.289.409.975,47
Penerimaan Retribusi Daerah	19.109.708.620,00	20.204.081.913,00



Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31.064.882.846,62	30.511.006.521,83
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	257.309.204.189,85	82.337.219.795,96
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	396.542.022.347,00	406.804.973.987,00
Dana Alokasi Umum	1.433.203.410.000,00	1.399.367.134.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.067.008.374.054,00	939.049.860.012,00
Dana Penyesuaian	25.741.099.000,00	9.125.000.000,00
Pendapatan Hibah	1.608.000.000,00	1.548.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	4.576.693.385.365,68	4.263.236.686.205,26
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.383.198.400.500,00	1.238.031.136.440,14
Belanja Barang	1.115.452.317.196,80	854.516.651.512,50
Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00
Hibah	628.426.890.000,00	487.359.693.428,00
Bantuan Sosial	283.200.500,00	118.200.000,00
Belanja Tak Terduga	91.193.409,97	96.682.191,77
Bagi Hasil Pajak	710.641.702.400,72	579.768.148.687,90
Belanja Bantuan Keuangan	165.466.500.000,00	98.066.500.000,00
Bantuan Keuangan Partai Politik	1.965.424.800,00	2.060.894.400,00
Jumlah Arus Kas Keluar	4.006.025.628.807,49	3.260.517.906.660,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	570.667.756.558,19	1.002.718.779.544,95

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp833.897.072.832,60) (Rp766.392.325.805,51)

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp833.897.072.832,60) turun sebesar Rp67.504.747.027,09 atau sebesar 8,80% dibanding dengan tahun 2018 sebesar (Rp766.392.325.805,51). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Rincian Arus kas dari aktivitas investasi TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:



Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2019	Tahun 2018
Arus Kas Masuk		
Pelepasan Hak Atas Tanah	0,00	2.247.711.058,65
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	871.391.000,00	628.742.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	871.391.000,00	2.876.453.058,65
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	4.983.673.286,00	1.477.206.406,00
Belanja Peralatan dan Mesin	138.751.999.261,46	111.313.374.516,20
Belanja Gedung dan Bangunan	179.908.425.653,79	131.543.812.912,44
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	496.203.734.974,48	505.320.632.964,52
Belanja Aset Tetap Lainnya	14.485.830.656,87	19.613.752.065,00
Belanja Aset Lainnya	434.800.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	834.768.463.832,60	769.268.778.864,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(833.897.072.832,60)	(Rp766.392.325.805,51)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp0,00 Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp533.565.043,70 Rp1.858.049.098,16

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2019 sebesar Rp533.565.043,70 turun sebesar Rp1.324.484.054,46 atau sebesar 71,28% dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp1.858.049.098,16. Arus kas bersih aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk



pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2019	Tahun 2018
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	224.295.713.235,00	213.101.193.123,83
Penerimaan Utang Pihak Ketiga	2.011.544.718,97	2.108.667.063,16
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	357.174.515,00	102.418.550,00
Jumlah Arus Kas Masuk	226.664.432.468,97	215.312.278.736,99
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	224.295.713.235,00	213.101.193.123,83
Pengeluaran Utang Pihak Ketiga	7.187.409,97	0,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	400.000,00	353.036.515,00
Pengeluaran Koreksi	1.827.566.780,30	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	226.130.867.425,27	213.454.229.638,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	533.565.043,70	1.858.049.098,16

5.5.4 Saldo Akhir Kas 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp468.227.411.053,91 Rp717.180.441.962,78

Saldo Akhir Kas Tahun 2019 sebesar Rp468.227.411.053,91 turun sebesar Rp248.953.030.908,87 atau sebesar 34,71% dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp717.180.441.962,78, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Tahun 2019	Tahun 2018
Kenaikan/Penurunan Kas	(262.695.751.230,71)	238.184.502.837,60
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	712.354.303.539,78	-
Saldo Awal Kas di BUD	680.560.649.245,46	442.376.146.407,86
Kas awal Kas di Bendahara BLUD	31.793.654.294,32	-
Saldo Akhir Kas di BUD	-	680.560.649.245,46



Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	449.658.552.309,07	-
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.138.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	400.000,00	353.036.515,00
Kas di Bendahara BLUD	-	31.793.654.294,32
Kas Di Bendahara BOS	18.568.458.744,84	4.468.963.908,00
Saldo Akhir Kas	468.227.411.053,91	717.180.441.962,78

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal Tahun 2019 sebesar Rp8.050.788.260.633,50 merupakan saldo akhir Tahun 2018.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp495.628.593.005,24.

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2019 adalah sebesar (Rp15.728.388.589,66) yang terdiri dari:

Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar (Rp2.569.724.533,46)

Koreksi ekuitas penyesuaian aset lancar terdiri dari:

Penambahan dari kurang saji saldo dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp43.680.238,84.

Pengurangan karena koreksi Kas di Bendahara Penerimaan BLUD AAK yang disimpan pada Bank Bukopin nomor rekening 2801200149 atas nama BLUD Akademi Analisis Kesehatan sebesar (Rp436.504.369,30).

Pengurangan karena koreksi Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Akademi Farmasi yang disimpan pada Bank Jambi nomor rekening 0101046273 atas nama BLUD Akademi Farmasi sebesar (Rp1.391.062.411,00).

Pengurangan karena koreksi Persediaan Gudang Medis (Obat-Obatan) yang kadaluarsa (expired) tahun 2014-2018 pada RSUD sebesar (Rp755.837.992).

Pengurangan karena pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp30.000.000,00).

Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap Rp674.819.212,70

Rincian koreksi ekuitas penyesuaian aset tetap dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.96 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap



(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.285.494.795,00)	Pengurangan karena: Pelunasan Utang Rp1.283.814.795,00 Lebih Saji Rp1.680.000,00
2	Dinas Perhubungan	(14.619.500,00)	Pengurangan karena: Lebih Saji Rp13.683.500,00 Temuan Temuan BPK dengan Nomor LHP 20/LHP/XVIII.JMB/2018 Rp936.000,00
3	Dinas Perkebunan	39.997.500,00	Penambahan dari kurang saji tahun sebelumnya
4	Dinas Ketahanan Pangan	(4.860.000,00)	Pengurangan karena temuan
5	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	138.000.000,00	Penambahan dari kurang saji tahun sebelumnya
6	Dinas Lingkungan Hidup	284.350.000,00	Penambahan dari kurang saji tahun sebelumnya
7	Dinas Kehutanan	1.484.208.020,00	Penambahan dari kurang saji tahun sebelumnya
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	44.124.750,00	Penambahan dari kurang saji tahun sebelumnya
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(22.806.762,30)	Penambahan dari kurang saji tahun sebelumnya Rp170.993.237,70 Pengurangan karena penghapusan berdasarkan SK Nomor: 764/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018 Rp47.500.000 1184/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018 Rp146.300.000,-
10	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.920.000,00	Penambahan dari kurang saji tahun sebelumnya
	Jumlah	674.819.212,70	



Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp8.544.014.499,17)
Rincian koreksi ekuitas akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.97 Rincian Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	52.263,73	Penambahan dari lebih saji tahun sebelumnya
2	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.343.373.456,33)	Penambahan dari lebih saji tahun sebelumnya Rp27.014.399,99 Pengurangan karena hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST Nomor KN.02.07/I/2378/2018 sebesar Rp1.370.387.856,32
3	Rumah Sakit Jiwa	(15.053.624.700,00)	Pengurangan karena hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan: BAST Nomor KN.02.07/I/3598/2018 BAST Nomor KN.02.07/I/3600/2018 BAST Nomor KN.02.07/I/3602/2018
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(790.667.162,36)	Penambahan dari temuan BPK dengan Nomor LHP 24A/LHP/XVIII.JMB/2019 Rp178.818.198,70 Pengurangan karena: Reklas Masuk ke JIJ dari KDP Rp962.741.420,74 Kurang Saji Tahun Sebelumnya Rp6.743.940,32
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.341.622,70)	Pengurangan karena: Mutasi dari BPBMD Rp860.725,00 Kurang saji tahun sebelumnya Rp480.897,70



No	OPD	Jumlah	Keterangan
6	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(531.115.750,00)	Pengurangan karena hibah dari Kementerian Perhubungan Rp503.571.428,58 Mutasi dari BPBMD Rp475.915.750,00 Kurang saji tahun sebelumnya Rp55.200.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	(297.970.999,90)	Penambahan dari temuan Rp729.000,10 Pengurangan karena: Mutasi dari BPBMD Rp168.700.000,00 Mutasi dari Biro Umum Rp130.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	4.092.504.434,04	Penambahan dari hibah ke Kementerian Perhubungan Rp4.596.075.862,62 Pengurangan karena hibah dari Kementerian Perhubungan Rp503.571.428,58
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.907.492.847,42)	Penambahan dari lebih saji tahun sebelumnya Rp49.758.530,83 Pengurangan karena hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp3.857.734.316,59
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	(4.650.104.911,25)	Penambahan dari: Mutasi ke Sekretariat DPRD Rp1.331.510.819,92 Lebih saji tahun sebelumnya Rp107.262.444,03 Pengurangan karena hibah dari Kementerian Pertanian Rp6.088.878.175,20
11	Dinas Perkebunan	(37.177.500,00)	Pengurangan karena mutasi dari BPBMD



No	OPD	Jumlah	Keterangan
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.227.274.937,68	Penambahan dari: Lebih saji tahun sebelumnya Rp7.033.474.937,68 Penghapusan Rp 193.800.000,00
13	Sekretariat DPRD	124.273.845,73	Penambahan karena reklasifikasi ke Aset Lainnya Rp1.248.700.000,00 Pengurangan karena mutasi dari Dinas Tanaman Pangan Rp1.124.426.154,27
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(571.241,67)	Pengurangan karena mutasi dari BPBMD
15	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	(1.835.900,01)	Pengurangan karena mutasi dari BPBMD
16	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(65.695.224,80)	Pengurangan karena: Mutasi dari BPBMD Rp64.845.375,00 Kurang saji tahun sebelumnya Rp849.849,80
17	Biro Umum	(51.085.500,00)	Pengurangan karena: Mutasi Masuk dari Dinas Kehutanan Rp50.000.000,00 Kurang saji tahun sebelumnya Rp1.085.500,00
18	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.951.852.058,71	Penambahan dari mutasi ke Semua Biro Rp5.437.669.808,35 Pengurangan karena: Mutasi dari Badan Penghubung Rp401.750.000,00 Kurang saji tahun sebelumnya Rp84.067.749,64
19	Biro Hukum	(308.508,33)	Pengurangan karena: Mutasi dari BPBMD Rp75.375,00



No	OPD	Jumlah	Keterangan
			Kurang saji tahun sebelumnya Rp233.133,33
20	Badan Penghubung Daerah	1.842.679.000,00	Penambahan dari mutasi ke BPBMD
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(50.285.714,29)	Pengurangan karena kurang saji tahun sebelumnya
	Jumlah	(8.544.014.499,17)	

Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya (Rp10.060.257.128,68)

Rincian koreksi ekuitas penyesuaian aset lainnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.98 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya (dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(4.242.039.944,18)	Pengurangan karena: Setoran temuan Rp3.075.861.368,74 Lebih saji tahun sebelumnya Rp1.166.178.575,44
2	Dinas Perhubungan	(1.561.879.434,00)	Pengurangan karena: Kurang saji akumulasi penyusutan aset lainnya tahun sebelumnya Rp1.554.547.264,00 Setoran temuan Rp7.332.170,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(366.067.509,96)	Pengurangan karena: Setoran Temuan Rp321.942.759,96 Kurang saji akumulasi penyusutan aset lainnya tahun sebelumnya Rp44.124.750,00
4	Sekretariat DPRD	(1.579.164.080,44)	Pengurangan karena: Kurang Saji Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Sebelumnya Rp1.415.812.237,44



			Mutasi akumulasi penyusutan aset lainnya dari Tanaman Pangan Rp163.351.843,00
5	Biro Umum	(95.993.237,70)	Pengurangan karena kurang saji akumulasi penyusutan aset lainnya tahun sebelumnya Rp95.993.237,70
6	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	(998.000.000,00)	Pengurangan karena mutasi akumulasi penyusutan aset lainnya dari Badan Penghubung
7	Badan Penghubung Daerah	(1.212.612.922,40)	Pengurangan karena penghapusan aset
8	Badan Keuangan Daerah	(4.500.000,00)	Pengurangan karena kurang saji akumulasi penyusutan aset lainnya tahun sebelumnya
	Jumlah	(10.060.257.128,68)	

Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp118.098.958,33)
Koreksi ekuitas akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar (Rp118.098.958,33) merupakan kurang saji akumulasi penyusutan aset lainnya tahun sebelumnya pada Badan Keuangan Daerah.

Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen Rp117.613.253,00 Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp117.613.253,00 merupakan penyesuaian data penyisihan piutang KUPEM.

Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban Rp4.771.274.064,28

Rincian koreksi ekuitas penyesuaian aset lainnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.99 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah	3.059.594.364,28	Penambahan dari pelunasan utang tahun sebelumnya
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.711.679.700,00	Penambahan dari pelunasan Utang Tahun Sebelumnya Rp1.711.679.700,00

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah	3.059.594.364,28	Penambahan dari pelunasan utang tahun sebelumnya
	Jumlah	4.771.274.064,28	

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Jumlah ekuitas akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp8.530.688.465.049,08 dengan rincian sebagai berikut:

1	Ekuitas Awal	Rp	8.050.788.260.633,50
2	Surplus/Defisit LO	Rp	495.628.593.005,24
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(15.728.388.589,66)
4	Ekuitas Akhir	Rp	8.530.688.465.049,08



BAB VI

INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering di bagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat di barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas di bagian tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia “IMS-GT” (Indonesia, Malaysia, Singapura – *Growth Triangle*). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Sumberdaya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian, dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu terdapat pula daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari satu Sekretariat Daerah dengan sembilan Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Inspektorat, dua puluh dua dinas, delapan badan, dan dua unit pelaksana teknis daerah.

6.2. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam Tahun 2019

Dalam TA 2019 terdapat penggantian manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

6.3. Informasi Lainnya

Dalam TA 2019 telah mengakomodir hibah untuk pemilihan kepala daerah tahap I dengan berpedoman ketentuan dan peraturan yang berlaku.



BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- *Pada Laporan Realisasi Anggaran:* Target pendapatan yang ditetapkan tahun 2019 sebesar Rp4.566.472.026.795,00 telah direalisasi sebesar Rp4.575.197.849.736,33 atau sebesar 100,19%, dan pada sisi belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp5.222.752.844.683,32 terealisasi sebesar Rp4.824.366.351.412,74 atau sebesar 92,37%. Dari angka defisit APBD yang ditargetkan sebesar (Rp656.280.817.888,32) dalam realisasinya terjadi surplus sebesar (Rp249.173.501.676,41) atau sebesar 37,97%. Dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp669.496.931.346,86, maka terdapat SILPA sebesar Rp420.323.429.670,45;
- *Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL):* Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 sebesar Rp420.323.429.670,45, ini berarti ada penurunan sebesar Rp250.957.388.217,87 atau 37,38% dibanding dengan saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 sebesar Rp671.280.817.888,32. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 sebesar Rp669.496.931.346,86 dan terdapat saldo SAL Tahun 2019 yang tidak digunakan sebesar Rp420.323.429.670,45;
- *Dalam Neraca:* Posisi Aset pada akhir tahun 2019 sebesar Rp8.941.719.097.774,87 bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp8.495.832.583.828,62 naik sebesar 5,25%. Posisi Kewajiban pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp411.030.632.725,79 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp445.044.323.195,12 turun sebesar 7,64%. Posisi Ekuitas pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp8.530.688.465.049,08 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp8.050.788.260.633,50 naik sebesar 5,96%;
- *Pada Laporan Operasional (LO):* Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp4.335.671.728.025,05 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp1.694.695.356.316,05, pendapatan transfer LO sebesar Rp2.561.492.975.847,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp79.483.395.862,00. Sedangkan Beban Tahun 2019 sebesar Rp3.873.717.461.732,55 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp3.063.663.006.125,67, Beban Transfer sebesar Rp810.054.455.606,88 sedangkan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional surplus sebesar Rp461.954.266.292,50. Nilai Surplus Kegiatan Non Operasional adalah Rp33.765.520.122,71. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp495.719.786.415,21. Nilai Pendapatan luar biasa adalah Rp0,00, Beban Luar Biasa Rp91.193.409,97 sehingga Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Defisit (Rp91.193.409,97) sehingga Surplus/Defisit LO sebesar Rp495.628.593.005,24.



- *Pada Laporan Arus Kas:* Saldo Arus Kas pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp468.227.411.053,91 dibandingkan saldo arus kas pada akhir Tahun 2018 sebesar Rp717.180.441.962,78 sehingga terjadi penurunan saldo akhir kas akhir tahun ini sebesar Rp248.953.030.908,87.
- *Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):* Ekuitas awal sebesar Rp8.050.788.260.633,50 Surplus/Defisit LO sebesar Rp495.628.593.005,24 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar (Rp15.728.388.589,66) sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp8.530.688.465.049,08.

Jambi, Juni 2020
GUBERNUR JAMBI

H. FACHRORI UMAR

